



**MAWARDI YAHYA
LEBIH COCOK
BERSAMA ANITA
NOERINGHATI**

**BEA CUKAI ANTARA
ASAP DAN API**

**MENANTI PANSEL
CAPIM KPK
PILIHAN JOKOWI**

**PRIMA SALAM
JADI REBUTAN
DI PILKADA
PALEMBANG**

**SETOP BUDAYA
KEKERASAN SEKOLAH
KEDINASAN**

PROGRAM SERENTAK AGUS FATONI ANGKAT EKONOMI SUMSEL

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

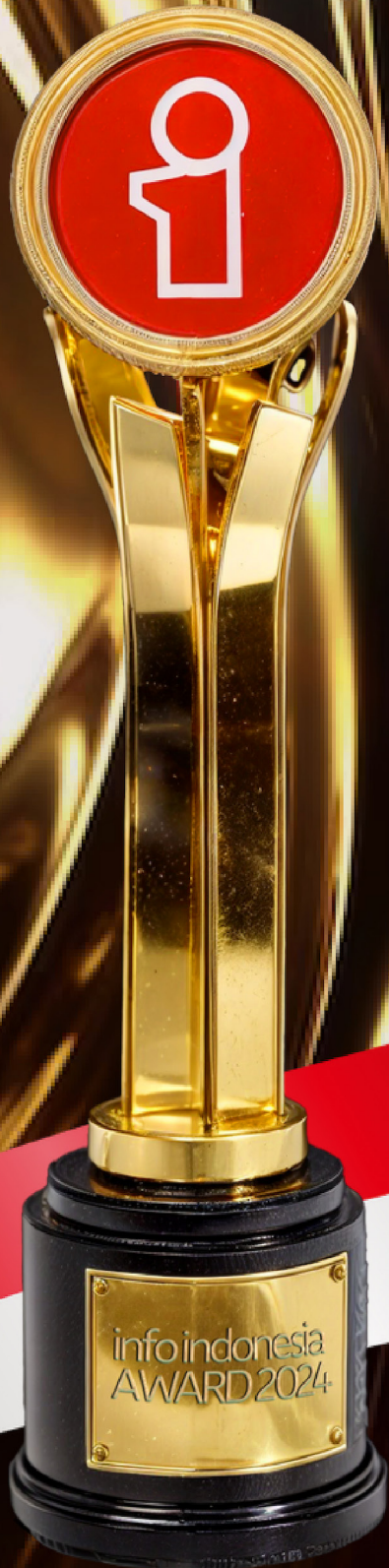


Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

info indonesia
AWARD 2024

DARI
SUMSEL
UNTUK
INDONESIA
EMAS



EDISI
BULAN
MEI
2024

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sudah terjadwal. Susunan kabinet pemerintahannya yang menjadi soal.



22

INFO SUMSEL

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak akan berlangsung aman dan tanpa gejolak. Untuk mempertegas tekad tersebut Provinsi Sumsel meluncurkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode tahun 2024-2029.



36

INFO KALTIM

Geliat pembangunan di Kalimantan Timur semakin terasa sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Banyak investor yang masuk ke Benua Etam untuk berpartisipasi dalam pembangunan megaprojek bernilai ratusan triliun.



38

INFO PROFIL

Nama Calon Gubernur (Cagub) Sumsel 2024 menjadi perhatian serius, bahkan menjadi perbincangan hangat.



68

INFO NASIONAL

Kementerian Dalam Negeri menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024.



76

INFO MUBA

Satu demi satu permasalahan yang menyangkut fasilitas umum masyarakat maupun infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin berhasil diselesaikan Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud. Mulai dari jalan, penerangan hingga fasilitas kesehatan telah dibenahi dan ditingkatkan pelayanannya.



87

INFO KHUSUS

Tak ada asap jika tiada api. Keluhan terhadap layanan petugas Bea dan Cukai adalah asapnya. Apinya? Ya regulasi.

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

30 INFO LAPSUS SUMSEL

78 INFO EKONOMI

82 INFO ISTANA

86 KAJI

60

INFO PILKADA

Sejumlah nama Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024 mulai menjadi perbincangan hangat publik.



TRANSISI

Menyimak berbagai peristiwa sejak memasuki Mei 2024, sudah selayaknya kita menjawab pertanyaan apakah kebutuhan perorangan kita yang paling dasar sudah benar-benar terpenuhi? Dalam hierarki ahli psikologi Abraham Harold Maslow (1908-1970), yang mendasar itu berupa kebutuhan fisik (physiological needs) untuk bertahan hidup (survival), antara lain bernapas, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan tidur.

Kebutuhan fisiologis itu berada di tingkat dasar dari lima tingkatan dalam hierarki Maslow. Setelah kebutuhan fisiologis, kebutuhan perorangan di atasnya adalah perlindungan dan keamanan (safety and security), cinta dan kepemilikan (love and belonging), harga diri (self esteem), dan aktualisasi diri (self-actualization).

Nah, kembali ke berbagai peristiwa sejak memasuki Mei 2024, kita dapat menyimak katakanlah bencana galodo di Sumatera Barat; kecelakaan bus tak layak jalan yang meminta korban siswa SMK di Depok, Jawa Barat; letusan Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara; pesawat jamaah haji yang harus kembali ke landasan di Makassar, Sulawesi Selatan; juga berbagai tindak kekerasan yang menyebabkan korban jiwa. Belum lagi kecenderungan kenaikan harga pangan dan biaya transportasi.

Jadi, belakangan ini kita banyak menghadapi masalah mendasar untuk bertahan hidup. Selanjutnya masalah perlindungan dan keamanan.

Maslow berpendapat bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkatnya, semakin sulit memenuhi kebutuhan yang terkait dengan tahap tersebut, karena hambatan antarpribadi dan lingkungan yang pasti membuat kita frustrasi. Frustrasi sederhananya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Kebutuhan yang lebih tinggi menjadi semakin bersifat psikologis dan berjangka panjang dibandingkan dengan kebutuhan fisiologis berjangka pendek, seperti pada kebutuhan terkait kelangsungan hidup. Nah, jika masih banyak yang menghadapi masalah kelangsungan hidup, perlindungan dan keamanan, akan berarti lebih sulit dan lama lagi memenuhi kebutuhan kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri yang lebih luhur semisal berprestasi dan berbuat yang terbaik bagi lingkungan luas.

Pada titik inilah kita dapat saling mengingatkan dalam suasana transisi pergantian kekuasaan Presiden dan pembentukan kabinetnya, juga menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024. Bahwa pemenuhan kebutuhan perorangan yang mendasar dan segera untuk bertahan adalah bagian penting dalam penyelenggaraan negara, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setiap pengembalian kekuasaan di semua tingkatan hendaknya benar-benar dapat berbuat yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, perlindungan, dan keamanan. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @1nfoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadh, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



DINAMIKA SUSUNAN KABINET

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sudah terjadwal. Susunan kabinet pemerintahannya yang menjadi soal.



Padahal hak prerogatif Presiden. Namun, penyusunan kabinet menteri Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi perbincangan tak putus-putus di pentas politik nasional. Bahkan menjelang Mahkamah Konstitusi memutuskan pemenang Pemilihan Presiden 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, pembicaraan kabinet itu sudah mulai.

Begitulah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani

yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden, baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat Presiden dan Wakil Presiden. "Memahami dan menyetujui terhadap program Presiden dan Wakil Presiden adalah sebuah keharusan karena Menteri adalah pembantu Presiden. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri," ujarnya.

Menurut Muzani, kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjema-

Nah, sehari setelah putusan MK, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan soal kabinet akan dimulai setelah KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres terpilih. Selain itu, sambungnya, banyak hal lain harus disiapkan setelah penetapan oleh KPU. Ada waktu sekitar enam bulan sebelum akhirnya Prabowo-Gibran resmi menjabat pada Oktober mendatang. "Tentunya (peran) Bapak Presiden Joko Widodo menjadi penting untuk membawa kita



mengemukakan, pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK pada Senin, 22 April 2024.

"Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024.

Muzani juga menyebut syarat untuk menjadi pembantu Presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka

han dari kebijakan presiden. "Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," ucapnya.

Ia menyebut pihaknya akan memperhitungkan orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan yang dianggap memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat atau diusulkan. "Tentu saja semua kan menganggap yang diusulkan oleh pimpinan partai politik adalah orang-orang ahli di bidangnya. Karena itu kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan partai politik di dalam pengajuan nama dan posisi itu kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka," kata Muzani.

sampai dengan bulan Oktober nanti," ujar Airlangga di sela acara Halalbihalal Keluarga Besar Satuan Karya Ulama Indonesia, Selasa, 23 April 2024.

Toh sebelumnya Airlangga pernah menyebut bahwa partainya layak memperoleh lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran karena besarnya kontribusi Golkar terhadap kemenangan Prabowo-Gibran. Pernyataan ini ia kemukakan di forum internal Syukuran dan Konsolidasi Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, pertengahan Maret 2024.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga, Jumat, 15 Maret 2024.

Airlangga mengatakan kontribusi Golkar memenangkan Prabowo seharusnya dapat menyediakan ruang bagi para kader jadi menteri. Dia mengaku sudah berbicara kepada Prabowo soal itu.

Menurut dia, 75 persen kader Golkar sudah memilih Prabowo. Berbeda dengan Pilpres periode lalu yang hanya 53 persen kader memilih capres dan cawapres yang tidak diusung Golkar. "Jadi, Partai Golkar benar-benar di depan memenangkan Pak Prabowo dan Mas

bersamaan dalam komitmen koalisi, saya kira itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi presiden dan wakil presiden terpilih untuk menetapkan komposisi susunan menteri, dan itu tentu saja akan dibicarakan presiden dan wakil presiden untuk membahas hal itu," katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya tidak membedakan latar belakang profesional ataupun politik dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran. "Kami menganggap bahwa tidak ada

posisi yang pasti karena ini semua masih diexercise ya, masih terus 'ini pas atau enggak'," ucapnya.

Beriringan dengan itu, muncul pula daftar perkiraan susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran di berbagai platform media. Yang teridentifikasi pertama kali muncul di media sosial adalah susunan kabinet bertajuk Kabinet Indonesia Emas yang viral setelah pasangan Prabowo-Gibran muncul sebagai pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat (quick count) hasil survei pemilihan yang



Gibran," kata Airlangga.

Meski begitu, muncul pula tanda tanya mengapa Airlangga menyebut lima, padahal Menteri Golkar yang duduk di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pun lima menteri. Malah enam jika menghitung Wakil Menteri: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

Sedangkan Muzani mengakui kontribusi perolehan suara partai politik akan ikut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan komposisi kabinet Prabowo-Gibran. "Sebagai sebuah ke-

dikotomi antara profesional dengan orang partai politik. Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu. Karena itu, sekali lagi apa yang diajukan oleh pimpinan partai politik terhadap nama-nama itu kami menganggap orang-orang itu orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya," tambahnya.

Toh Sekjen Partai Gerindra ini masih enggan memberikan angka pasti terkait jumlah kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang dialokasikan untuk Partai Gerindra maupun partai politik Koalisi Indonesia Maju lainnya.

"Belum ada angka pasti, belum ada

keluar dari Tempat Pemungutan Suara pada Hari H pemungutan suara, Rabu, 14 Februari 2024.

Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, ikut mengomentari poster tersebut di akun X miliknya. Awalnya, ada salah satu follower Gibran yang menanyakan soal kebenaran soal poster tersebut. Wali Kota Solo itu menjawab singkat, bahwa poster itu tidak benar.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyebut poster tersebut sebagai hoaks. Kata dia, poster itu tak bisa diklarifikasi karena sumbernya tidak jelas. "Urusan menteri itu hak prerogatif presiden," kata Nusron, kepada wartawan, Selasa, 20 Februari 2024.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai

Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan, semua bocoran mengenai susunan kabinet menteri Prabowo-Gibran adalah hoaks. Menurut dia, poster macam itu biasanya hanya asumsi dan prediksi orang untuk tujuan tertentu. Namanya prediksi, bisa benar bisa juga salah. Namun, berdasarkan pengalaman yang ada, prediksi susunan kabinet pemerintahan selalu salah.

Lagi pula, kata Saras, saat ini Prabowo-Gibran masih menunggu hasil resmi dari KPU. Prabowo-Gibran tidak terburu-buru dalam menyusun kabinet. Prabowo-Gibran saat ini masih fokus mengamankan suara yang diraih. Demikian juga dengan parpol-parpol koalisi.

"Masih banyak teman-teman kita

Budisatrio Djiwandono sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyatakan bahwa belum ada pembahasan mendetail mengenai nama-nama calon menteri Prabowo-Gibran. "Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetail tentang nama-nama," kata Drajad pada Selasa, 20 Februari 2024.

Drajad mengungkapkan bahwa meskipun belum ada pembahasan mengenai nama-nama calon menteri, prinsip umum dalam penyusunan kabinet sudah disepakati. Menurut dia, hal ini telah didiskusikan oleh Presiden Joko Widodo, Prabowo, Gibran, dan Ketua Umum partai politik Koalisi Indonesia

Mengenai hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," kata Dasco, Minggu, 28 April 2024.

Dasco pun menegaskan tak ada satupun daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar di tengah masyarakat itu akurat. "Kepada masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran belum dimulai. Alasannya, Menteri Pertahanan RI itu masih terus melakukan komunikasi dan kajian untuk merumuskan komposisi kabinet pemerintahan 2024-2029. "Komunikasi-komunikasi masih dilakukan, kemudian Pak Prabowo masih melihat portofolio-portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian-pengkajian kementerian-kementerian yang ada sehingga terlalu dini rasanya kemudian susunan-susunan kabinet itu sudah keluar," katanya.

Menurut dia, daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar itu mungkin sebuah aspirasi bagi penyusunan kursi-kursi menteri periode mendatang. "Bahwa itu juga mungkin dikeluarkan untuk menjadi aspirasi ya mungkin, tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," tukasnya.

Dasco juga meminta masyarakat tidak bingung. "Ini banyak yang bertanya dan WA (WhatsApp) apakah versi ini, yang mana yang benar? Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi, tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo Subianto maupun timnya," kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu. ●



yang berjuang untuk memastikan suaranya aman untuk pemilihan legislatif. Kita fokus dulu. Biarkan kami berjalan selangkah demi langkah," kata keponakan Prabowo.

Mengenai susunan menteri, Saras menyatakan, kubu Prabowo-Gibran terbuka terhadap siapa pun. Jadi kabinet nanti kemungkinan tak hanya diisi dari partai pengusung. "Jangan lupa kita masih terbuka kepada siapa pun yang mau bergabung di pemerintahan ke depan. Pak Prabowo sudah tegaskan itu," tambah Saras.

Dalam susunan kabinet Prabowo-Gibran yang disebut bocoran itu, dua keponakan Prabowo juga mendapatkan jatah jabatan menteri, yaitu Rahayu Saraswati sebagai Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan, dan Anak, serta

Maju.

Selanjutnya, pada Maret 2024, muncul pula poster susunan kabinet bertajuk "Kabinet Indonesia Maju Jilid 2". Malah dalam versi ini, termuat antara lain foto Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Erick Thohir yang dinarasikan sebagai Menteri Koordinator. Selain itu, di jabatan Menteri Bidang Teknis muncul foto, AHY, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sri Mulyani, Yenny Wahid, Kaesang Pangarep hingga pesohor Raffi Ahmad.

Sedangkan pada April 2024, muncul susunan kabinet bertajuk "Update Top 3 Kandidat: Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Pasca Pengumuman KPU Maret 2024". Tampilan posternya mirip format yang beredar pada Februari 2024



Menteri Koordinator



MENTERI KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM DAN HAM

MAHFUD MD



MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN

AIRLANGGA HARTANTO



MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PENGANGKUTAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

ZULKIFLI HASAN



MENTERI KOORDINATOR BIDANG
MARITIM DAN INVESTASI

ERIK TOHIR

Menteri Bidang Teknis



MENTERI PERTAHANAN
AGUS HARIMURTI YUDHOYONO



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
PROF. SUMI DASCO AHMAD



MENTERI DALAM NEGERI
TITO KARNAVIAN



MENTERI LUAR NEGERI
ANIES RASYID BASWEDAN



MENTERI AGAMA
PROF. DR. KH. NASARUDDIN UMAR



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
YUSRIL IHZA MAHENDRA



MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
SANDIAGA UNO



MENTERI KESEHATAN
TERAWAN AGUS PUTRANTO



MENTERI SOSIAL
GANJAR PRANOWO



MENTERI URUSAN PONDOK PESANTREN
MUHAMMID ISKANDAR



MENTERI PERINDUSTRIAN
TONI LEMBONG



MENTERI PERDAGANGAN
ARISAD RASYID



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ROSAN ROESLANI



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PEMERINTAHAN SAKTIF
BASUKI HADIMULJONO



MENTERI PERHUBUNGAN
MARWAN SIRAIT



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FADLI ZON



MENTERI PERTANIAN
ABDUL HALIM ISKANDAR



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
BUDI ARIE SETIADI



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
SITI HUBSANAH



MENTERI TINGGI KEMAHAMATAN DAERAH
TINGGAL DAN TRANSMIGRASI
YENNY WAHID



MENTERI AGRIKULTUR DAN TATA RUANG
/KA BPPI
HADI TJAHJANTO



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
/KA BAPPENAS
DAHIL ANKAR SIMAMUNTAK



MENTERI PENGANTAR APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI Birokrasi
RIWANTO KAMIL



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NASYIM DJOJOHADIKUSUMO



MENTERI DESA, KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
IR. YIFATUL SEMBIRING



MENTERI PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF
/KEPALA BADAN PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAFLI AHMAD



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK
RETNO MARSUDI



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAESANG PANGAREP



MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANJAMAN MODAL
BAHIL LAHADALIA

Pejabat Setingkat Menteri



SEKRETARIS KABINET
M. IDRIS



JAKSA AGUNG
ST. BURHANUDDIN



PANGKALMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
JENDERAL TNI AGUS SUBIYANTO



KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
JENDERAL POL. LISTYO SIGIT PRABOWO



KEPALA STAF KEPRESIDENAN
FAHRI HAMZAH

SUSUNAN KABINET INDONESIA MAJU 2024 - 2029



Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto



Menko Bidang Pangan, Gizi
& Pembangunan Manusia
Erick Thohir



Menko Bidang Energi,
Investasi dan
Lingkungan Hidup
Hatta Rajasa



Menko Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan
Tito Karnavian



Menteri
Pertahanan
**Sjafrudin
Sjamsuddin**



Wki. Menteri
Pertahanan
M. Herindra



Menteri Sekretaris
Negara
Ahmad Muzani



Wakil Menteri
Sekretaris Negara
Nezar Patria



Menteri Sekretaris
Kabinet
Rosan Roeslani



Menteri Dalam
Negeri
Sufmi Dasco



Menteri Luar
Negeri
Fadli Zon



Wki Menteri
Luar Negeri
**Teuku Riefky
Harsya**



Menteri
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Joko Santoso



Wki Menteri
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Helmi Yahya



Menteri Agama
**Yaqut Cholil
Qoumas**



Wakil Menteri
Agama
**Asep Saepudin
Jahar**



Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia
**Yusril Ihza
Mahendra**



Wamenkumham
**Holman Paris
Hutapea**



Menteri Pendidikan,
Kebudayaan dan
Teknologi
Arif Satria



Wakil Mendikbud
dan Teknologi
**Ace Hasan
Syadzily**



Menteri Kesehatan
dan Badan Gizi
Terawan

SUSUNAN KABINET INDONESIA MAJU 2024 - 2029



Wakil Menteri
Kesehatan dan
Badan Gizi
Benny Otdavianus



Mensos
Kesejahteraan,
Perempuan
dan Anak
Rahayu Saraswati



Wakil Menteri
Sosial, Kesejahteraan,
Perempuan
dan Anak
Grace Natalie



Menteri Riset
& Kepala BRIN
Dudung Abdurachman



Menteri
Ketenagakerjaan
Ahmad Doli Kurnia Tanjung



Wakil Menteri
Ketenagakerjaan
Agus Jabo



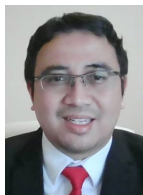
Menteri
Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita



Wakil Menteri
Perindustrian
Haris Rusly Mof



Menteri Energi
dan Sumber Daya
Minera
Rauf Purnama



Wakil Menteri
Energi dan Sumber
Daya Mineral
Oki Muraza



Menteri Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Ridwan Kamil



Menteri
Perhubungan
Ignasius Jonan



Menteri Keuangan
dan Kepala
Bappenas
Sri Mulyani Indrawati



Wakil Menteri
Keuangan dan
Kepala Bappenas
Kartika Wirjoatmodjo



Menteri Investasi
Bahil Lahadalia



Menteri
Komunikasi,
Informatika dan
Digital
Budi Arie Setiadi



Wakil Menteri
Komunikasi,
Informatika dan
Digital
Kailani



Menteri
Perdagangan
Zulkifli Hasan



Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman



Menteri
Lingkungan Hidup
Budisatrio Djiwandono



Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
& Reformasi
Birokrasi
Bambang Eko S.



Wakil Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
Habiburokhman



Menteri Desa, Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi
Budiman Sudjatmiko



Wakil Menteri
Desa, Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi
Dedy Permadi



Menteri Tata
Ruang, BPN dan
Kehutanan
Agus Harimurdi Yudhoyono



Wakil Menteri Tata
Ruang, BPN dan
Kehutanan
Raja Juli Antoni



Menteri BUMN
Sakti Wahyu Trenggono



Wakil Menteri
BUMN
T. Helmi



Menteri Kelautan
dan Perikanan
TB Heru Rahayu



Wakil Menteri
Kelautan dan
Perikanan
M. Riza Damanik



Menteri Pemuda
dan Olahraga
Dito Ariotedjo



Wakil Menteri
Muda Pemuda
dan Olahraga
Arief Rosyid Hasan



Menteri Koperasi,
UMKM dan Pasar
Tradisional
Maruarar Sirait



Wakil Menteri
Koperasi, UMKM
dan Pasar
Tradisional
Sudaryono



Menteri Sekre-
taris Pengendalian
Pembangunan
Roberto Lumban Gaol



Kepala BIN
I Nyoman Cantiasa



Kepala Badan
Pangan Nasional
Arief Prasetyo Adi



Kepala Badan
Penerimaan
Negara
Bambang Brodjonegoro



Kepala Staf
Kepresidenan
Nusron Wahid

TIMBUL TENGGELAM TERUS MENYELAM

Nama-nama menteri pun menjadi wacana para elite politisi. Ternyata, susunan dan nomenklatur menteriannya yang harus disiapkan dulu.

Eko Patrio adalah pesohor yang akhirnya lebih menekuni karir politisi. Nah, namanya masuk sebagai calon menteri yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Selain menduduki jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN DKI Jakarta, Eko juga berkali-kali terpilih menjadi anggota DPR, dan terakhir duduk menjadi Wakil Ketua Fraksi PAN di parlemen.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) pun pernah mengungkapkan nama Eko Patrio bukan level Gubernur lagi, melainkan menteri. Zulhas mengemukakannya saat membahas sejumlah kandidat Gubernur Jakarta dari PAN untuk Pilkada 2024. Salah satunya adalah Eko Patrio yang berpeluang menjadi calon menteri.

"Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasha, ada Eko. Tapi, kan Eko calon menteri ya," kata Zulhas kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 5 Mei 2024.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai

posisi menteri yang akan dijabat oleh Eko, Zulhas belum menyebutnya. Menurut dia, segala kemungkinan masih bisa terjadi karena politik bersifat dinamis. "Oh ya nantilah kita lihat, politik kan dinamis," katanya.

Dukungan pun datang dari politisi PAN Saleh Partaonan Daulay yang menjadi Ketua Fraksi PAN di DPR. "Eko Patrio itu politisi senior. Sudah tiga periode menjabat di DPR. Sekarang terpilih lagi untuk periode keempat, dari sisi pengalaman, tentu Mas Eko pantas dan mumpuni jadi menteri," ungkap Daulay, Minggu, 5 Mei 2024.

Ia juga menilai, Eko Patrio memiliki rekam jejak memadai. "Pasti ada posisi di mana mas Eko sangat menguasai. Nah, apakah posisi itu ditawarkan ke PAN? Kita tunggu saja. Tidak usah terburu-buru," sambungnya.

Sebagai salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran, kata Daulay, PAN pasti akan menugaskan kader-kader terbaiknya di kabinet. PAN memiliki agenda



besar untuk menyukseskan Prabowo. Dengan begitu, posisi dan arah perjuangan politik PAN benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

"Mas Eko itu selama ini sangat kontributif. Tidak hanya di DPR, tetapi juga di partai. Banyak tugas di DPR dan di partai yang sukses dilaksanakan. Ya, pantas aja kalau Ketum Zulhas menyebut namanya sebagai salah satu calon menteri," ungkap Daulay.

Toh Daulay mengemukakan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran belum mengetahui posisi menteri apa yang ditawarkan. "Masih menunggu komposisi yang mungkin sedang difinalisasi," kata politisi yang terpilih dari Sumatera Utara itu.



Cuma baru kemarin ini saja Pilkada baru omong iya. Ini Pilkada mau begini, mau begini. Tapi kalau ke menteri belum ada omongan apa-apa.

Dengan demikian, kata Daulay, PAN belum tahu secara khusus apa posisi yang akan diamanahkan. Karena itu, PAN hanya menyiapkan nama kader-kader yang dinilai sanggup untuk masuk kabinet, salah satunya Eko Patrio.

Sedangkan Eko sendiri mengemukakan dirinya merupakan petugas partai. "Saya benar-benar petugas partai ya, kalau banyak yang bilang bukan petugas partai, saya adalah petugas partai. Jadi saya siap ditempatkan di mana saja," kata Eko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Eko mengatakan memang keputusan siapa sosok menteri adalah kewenangan dari Prabowo Subianto, dan usulan para ketua umum pengusungnya. Eko juga mengatakan belum ada komunikasi kepadanya terkait usulan menteri tersebut, termasuk dengan Prabowo.

"Jadi yang punya wewenang penuh itu kan yang punya hak prerogatif kan

Bapak Presiden. Pengusulnya, salah satunya adalah para ketua-ketua (parpol)," sebutnya.

Menurut dia, sejauh ini komunikasi politik baru di tingkat Pilkada, belum menyangkut kabinet. "Cuma baru kemarin ini saja Pilkada baru omong iya. Ini Pilkada mau begini, mau begini. Tapi kalau ke menteri belum ada omongan

media sosial, Raffi yang memiliki jutaan pengikut (follower) pun kerap menampilkan dukungannya untuk Prabowo.

Bagaimana peluang Raffi duduk di kabinet Prabowo-Gibran? "Ya kalau dilihat dari media sosial itu sudah banyak memang beredar ya. Kami anggap itu sebagai sebuah aspirasi, dinamika dan mungkin usulan-usulan dari luar," kata



apa-apa," tambahnya.

Karena itu Eko mengaku terkejut saat namanya disebut oleh Zulhas sebagai calon menteri. "Jadi saya juga kaget. Tapi, kalau ditempatkan di mana pun saya akan bekerja secara profesional," tandasnya.

Nah, di kalangan pesohor, selain Eko ada nama Raffi Ahmad yang disebut-sebut sebagai calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Rekam jejak Raffi antara lain kerap mengisi acara kampanye Prabowo-Gibran di sejumlah daerah. Sedangkan di

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kamis, 9 Mei 2024.

Dasco menegaskan, peluang artis atau pesohor masuk dalam jajaran kabinet memang terbuka. "Tetapi sampai saat ini di internal belum ada pembicaraan atau penggodokan kabinet yang fix," ujarnya menambahkan.

Lebih dari itu, Dasco mengaitkannya dengan kemungkinan perubahan struktur kabinet termasuk penambahan jumlah kementerian yang dikemukakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Saya pikir itu juga merupakan

masuk aspirasi karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu," ujarnya.

Soal penambahan jumlah kementerian, indikasinya memang kian kuat melalui upaya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pembahasan revisi itu sudah diagendakan oleh Badan Legislasi DPR hanya sehari setelah pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa, 14 Mei 2024.

Agenda resmi yang diedarkan Sekretariat DPR menyebutkan, pleno Baleg akan mempresentasikan hasil kajian Tenaga Ahli Baleg mengenai akibat pu-

Presiden untuk menunjuk wakil menteri.

Sedangkan salah satu butir draft revisi yang dikemukakan adalah ketentuan yang membatasi jumlah kementerian maksimal 34. "Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diubah sehingga berbunyi, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," demikian bunyi draf usulan revisi UU Kementerian yang dibacakan Tim Ahli Baleg DPR dalam presentasi.

Tenaga Ahli Baleg juga menyertakan

bernegara, bukan untuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik," kata Hasto di Galeri Nasional pada Senin, 13 Mei 2024.

Menurut dia, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam bidang ekonomi, seperti pelemahan rupiah, masalah tenaga kerja, bahkan kemudian deindustrialisasi. Sekjen PDIP ini mengemukakan pula, untuk menghadapi persoalan dan dampak geopolitik global diperlukan suatu desain yang efektif dan efisien, bukan memperbesar ruang akomodasi.

Di sisi lain, Anggota Baleg DPR RI Mardani Ali Sera, mengaku kaget mener-



usan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jadwalnya, Selasa, 14 Mei 2024 pukul 13.00

Dalam presentasi, Tim Ahli Badan Legislasi yang membacakan draf usulan revisi UU Kementerian menyebut latar belakang revisi secara umum merujuk pada Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011. Putusan itu menyebutkan, penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 10 mengatur soal kewenangan

Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 17 UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan, dalam pasal itu tidak ada pembatasan bagi presiden untuk menetapkan jumlah menteri. "... Tidak ada pembatasan secara limitatif Presiden dalam menetapkan jumlah menteri negara yang diangkat dan diberhentikan," kata tim Ahli Baleg.

Toh yang menentang upaya revisi itu juga ada. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengemukakan tak setuju dengan wacana revisi UU itu. "Seluruh desain dari kementerian negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan

ima undangan rapat pleno pembahasan revisi UU Kementerian Negara. Undang-undang itu ia terima pada Senin, 13 Mei 2024, sehari sebelum Rapat Paripurna DPR sekaligus pembukaan masa persidangan V 2023-2024.

Mengenai substansi revisi, menurut Mardani, idealnya susunan kementerian berpegang kepada prinsip miskin struktur tapi kaya fungsi. "Kalau semakin banyak kementerian, khawatir akan susah koordinasi, susah sinergi, susah kolaborasi. Kalau ikut jalan reformasi birokrasi, semestinya kementerian justru mengecil bukan membesar (jumlahnya)," kata dia.

Menurut Mardani yang juga anggota

Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, efektivitas kerja kabinet dengan jumlah kementerian besar memang akan sangat bergantung pada kemampuan presiden dalam mengelolanya. Toh ia mewanti-wanti, semakin besar jumlah kementerian akan berdampak pada biaya belanja pegawai yang semakin besar. Koordinasi dan sinergi antarlembaga juga akan kian sulit, sehingga pemerintahan akan kian jauh dari prinsip reformasi birokrasi, yakni pembangunan institusi yang sedikit tetapi efektif.

Toh Mardani menegaskan, pada akhirnya soal nomenklatur dan struktur

goptimalkan, memaksimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan,” kata dia.

Sedangkan Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily berpendapat jumlah kementerian harus sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pemerintah Prabowo-Gibran. “Karena itu fleksibilitas UU di dalam mengakomodasi apa yang menjadi visi-misi presiden terpilih tentu harus dibuka secara lebar,” kata Ace.

Ia mencontohkan, situasi pasca-COVID-19 yang membutuhkan pemulihan ekonomi. “Maka upaya kita untuk membuka kementerian yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, saya kira

Sedangkan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek) mengemukakan partainya menyerahkan keputusan soal menambah menteri atau tidak kepada Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif dalam menyusun kabinet di pemerintahan mendatang. “Di draft revisi Pasal 15, pada bagian akhir ada kunci efektivitas pemerintahan. Jadi kalau tidak diatur jumlahnya bisa jadi jumlah menteri hanya 10. Maka jangan diasumsikan selalu lebih dari 34, bisa jadi kurang dari 34. Bisa naik, bisa turun. Ya kan?” ujar Awiek.

Nah, selain nama-nama menteri yang beredar, rupanya susunan kementerian



kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Sebelum Prabowo dilantik, urusan struktur kementerian juga masih menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo. “Karena masa sekarang mestinya itu kolaborasi Presiden sekarang dan yang akan dilantik) mungkin ya,” ujarnya.

Bantahan datang dari Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan, rencana revisi UU tersebut bukan untuk mengakomodasi kepentingan politik dengan menetapkan komposisi menteri dalam jumlah tertentu. “Mungkin untuk mengakomodasi kepentingan kebutuhan nomenklatur dan juga bagaimana men-

itu penting untuk diakomodasi. Atau yang kedua misalnya soal krisis iklim yang sekarang ini dihadapi Indonesia dan juga seluruh dunia,” tuturnya.

Ace mengatakan ada sejumlah isu yang jadi perhatian seperti perubahan iklim, agar bisa diakomodasi oleh kementerian. Isu-isu semacam itu, kata dia, harus bisa diakomodasi dalam kementerian, bukan hanya aspek politik.

“Ini semua tentu harus diakomodasi di dalam UU tentang Kementerian supaya kementerian tersebut memang bisa mengakomodasi bukan hanya aspek politis, tapi juga aspek kebutuhan teknokratis,” sebutnya.

dan nomenklaturnya dulu yang perlu dipastikan. Setelah itu, baru memilih nama-nama sesuai dengan ruang-ruang yang tersedia berdasarkan aturannya, dalam hal ini UU Kementerian Negara.

Begitulah kabinet: susunan ruang-ruang yang bertingkat untuk menunjukkan portofolio atau bidang khusus yang menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan nama-nama calon menteri yang akan mengisinya bisa timbul-tenggelam.

Alhasil, ternyata nama-nama itu agaknya masih harus menyelam. Harap menunggu, jangan sampai terbentur struktur maupun nomenklatur. ●

TAK MEMBANTU YA JANGAN MENGGANGGU

Pernyataan tegas Presiden terpilih Prabowo Subianto agar “yang tak bisa bekerja sama jangan mengganggu” memantik berbagai tanggapan. Apakah terkait dengan penyusunan kabinet kementerian?

“**S**aya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya, jangan... Jangan mengganggu!”

Tepuk tangan terdengar segera setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan “jangan mengganggu!” di acara Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi Nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024 itu.

Prabowo menegaskan bahwa dia dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka serta partai-partai koalisi akan menjadikan pemerintahan ke depan membawa dampak positif yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia. “Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, anak-anak Sumatera Barat tidak akan ketinggalan, kita akan mengangkat

mereka kita akan membela mereka, kita akan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Namun, pernyataan itu disampaikan di forum PAN, salah satu pengusung Prabowo di tiga kali Pilpres: 2014, 2019, dan 2024. Meski begitu, tentu saja yang hadir di acara itu bukan hanya politisi dari partai berlogo matahari itu. Sejumlah bakal calon kepala daerah yang berasal dari partai lain dan berkoalisi dengan bakal calon dari PAN pun hadir di acara Bimtek itu.

Jadi, boleh dibilang Prabowo menyampaikan pesan jangan mengganggu itu kepada partai-partai yang dianggap akan memilih berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjadwal akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Sedangkan tuan rumah Bimtek, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengemukakan, pernyataan Prabowo mencirikan seorang pejuang sejati.

“Sudah terang benderang kok pernyataannya. Enggak perlu dijelaskan lagi



kan, dan Pak Prabowo itu pejuang sejati. Seorang Demokrat,” ucap Zulhas.

Lagi pula, ungkapan senada pernah dikemukakan oleh pendiri Partai Demokrat yang juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013, di masa akhir jabatannya. “Kalau nggak bisa bantu saya sebagai presiden jangan ganggu. Kalau diganggu makin nggak bisa dilaksanakan,” ucap SBY di acara berbuka puasa bersama di Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2013 yang dihadiri antara lain kalangan pengusaha nasional, pelaku industri, direksi Badan Usaha Milik Negara dan jajaran menteri kabinet saat itu.

Kembali ke Prabowo, tanggapan terhadap pernyataan jangan ganggu pun segera bersahutan. Ganjar Pranowo,



Iya yang bekerja sama saja bisa ganggu lho.

Calon Presiden pesaing Prabowo pada Pilpres 2024, misalnya, mengingatkan Prabowo untuk berhati-hati terhadap pihak yang berada di dalam kekuasaan. “Iya yang bekerja sama saja bisa ganggu lho. Saya ingetin lho itu.

Jangan sampai kemudian yang di dalam malah ganggu. Umpama, kita ingin ciptakan pemerintah bersih, tetapi korupsi di dalam, itu ganggu,” kata Ganjar, Jumat, 10 Mei 2024.

Ganjar menambahkan, justru pihak yang di luar pemerintahan bisa membantu pemerintah. Alasannya, yang tak bekerja sama dengan pemerintah bisa mengingatkan.

“Yang di luar jangan-jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik. Dan checks and balances akan berjalan,” ucap Ganjar.

Kalau kemudian Parpol mengatakan tidak ikut di pemerintahan, sambungnya, masyarakat sipil pun bisa mengkritisi pemerintahan. “Masyarakat sipil bisa lho memberikan catatan-catatan kritis,” ungkap Ganjar yang sudah menegaskan akan berada di luar pemerintahan.

Dengan demikian, kata Ganjar, ruang kontrol terhadap kinerja pemerintah perlu dibuka. “Tetapi betul kalau ganggu itu artinya destruktif, kita setuju. Jangan!” ujar Ganjar yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Politisi PDIP lainnya, Hendrawan Supratikno berpendapat, yang akan ganggu jalannya roda pemerintahan justru dari internal. “Bukankah yang bisa ganggu biasanya yang ada di dalam? Yang rajin bersiasat biasanya mereka yang sibuk berburu kursi dan rezeki lebih besar dari akses kekuasaan,” kata Hendrawan, Jumat, 10 Mei 2024.

tahan. “Sebaiknya kita semua elegan. Kalau di dalam mari kita kerja sama dengan jalan membangun bersama,” kata Nusron.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun menimpali agar seluruh pihak hendaknya jangan memanfaatkan kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 untuk melakukan hal-hal buruk. Muzani menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang punya niat jahat untuk tidak memanfaatkan kekuasaan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto sebagai bunker atau tempat berlindung.

Alasannya, pemerintahan Prabowo-



Hendrawan mengemukakan pihak di luar pemerintah biasanya hanya melakukan kritik dan kontrol. Menurut dia, kestabilan sebuah koalisi atau pemerintah tidak ditentukan oleh tekanan dari pihak eksternal.

“Dalam Game Theory, stabilitas kartel (koalisi) lebih ditentukan oleh tarik menarik kepentingan internal, bukan oleh tekanan eksternal,” ucapnya.

Politisi Golkar Nusron Wahid lantas menanggapi pernyataan Hendrawan. Menurut Nusron, pihak luar bisa ganggu pemerintahan terganggu. “Gangguan itu bisa datang dari internal dan eksternal. Tapi pasti lebih banyak gangguan dari pihak luar,” kata Nusron, Sabtu, 11 Mei 2024.

Nusron mengatakan pihak luar dapat ganggu dengan menggoda pihak yang sudah berada di dalam pemerin-

Gibran hanya digunakan seluruhnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. “Maka jangan pernah berharap kekuasaan ini akan dijadikan sebagai bunker pengaman bagi mereka yang ingin berbuat gelap, berbuat hitam. Adigang adigung sopo siro sopo ingun dan perbuatan buruk lainnya harus dihindari. Kita akan buat kekuasaan ini menjadi terang benderang dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia,” ujar Muzani, Senin, 13 Mei 2024.

Alhasil, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang wacana untuk saling mengingatkan. Terlebih saat Prabowo-Gibran sudah dilantik menjadi Presiden kedelapan dan Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia beserta kabinet yang terbentuk untuk menyelenggarakan negara di cabang eksekutif, bersama dengan lembaga legislatif maupun yudikatif. ●

TANTANGAN PENDIDIKAN INDONESIA

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas, sehingga manusia Indonesia mampu mendorong inovasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bangsa. Indonesia menghadapi tiga tantangan besar sekaligus peluang untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera.

Pertama adalah mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Kedua, memastikan Indonesia memperoleh bonus demografi karena berlimpahnya angkatan kerja dibandingkan penduduk yang belum bekerja atau sudah selesai masa tugasnya. Terakhir, komitmen kita untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Guna mengatasi ketiga tantangan itu, diperlukan SDM unggul, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME; berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kualitas SDM

Kualitas SDM digambarkan oleh Human Capital Index (HCI) yang dikembangkan Bank Dunia dan beberapa lembaga internasional lain.

Ada lima indikator yang dipakai dalam HCI. Pertama, keberlangsungan hidup dari setiap anak yang lahir sampai berusia lima tahun. Kedua, harapan rata-rata lama bersekolah. Ketiga, kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh hasil Programme for International Student Assessment (PISA). Keempat, keberlangsungan hidup kelompok masyarakat usia 14-60 tahun. Kelima, prevalensi tengkes (stunting).

Dengan mengukur lima indikator itu, kita dapat memperkirakan produktivitas dari anak yang baru lahir sekarang saat mereka mencapai usia 18 tahun. Dari data Indonesia, anak yang lahir pada 2020 diperkirakan hanya punya kemampuan produktivitas 54 persen atau separuh dari potensi produktivitas optimalnya.

Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 173 negara. Peringkat beberapa negara ASEAN adalah Singapura (1), Vietnam (38), Malaysia (62), Thailand (63), dan Filipina (103). Skor HCI Indonesia disebabkan rendahnya skor PISA dan masih tingginya prevalensi tengkes anak balita.

Selama lebih dari 20 tahun Indonesia selalu berpartisipasi dalam tes PISA yang diselenggarakan OECD. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan bermutu dan relevan pada semua anak negeri, seperti anggaran pendidikan yang dipastikan 20 persen dari APBN dan APBD sejak 2009.

Juga kesejahteraan guru yang lebih baik dengan disahkannya UU Guru dan Dosen, infrastruktur pendidikan yang kian baik, kurikulum dan pembelajaran yang lebih responsif pada kebutuhan anak, serta kian meningkatnya perhatian dan dukungan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan.

Oleh: Fasli Jalal
Mantan Wakil Menteri
Pendidikan Nasional dan Rektor
Universitas Yarsi

Namun, hasil skor PISA dari 2000-2018 cenderung tak membaik. Malahan, pada 2018 menurun dibandingkan 2015. Pada 2022, setelah proses belajar terdampak Covid-19, skor PISA anak Indonesia juga

makin menurun walau ranking PISA Indonesia sedikit meningkat karena dampak pandemi yang lebih besar dialami oleh siswa dari beberapa negara lain dibandingkan Indonesia.

Performa Siswa Indonesia

PISA adalah kajian tiga tahunan oleh OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan di negara-negara anggota dan bukan anggota OECD dengan mengukur performa siswa usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca.

PISA membantu para pembuat kebijakan dengan memberikan bukti nyata dalam mengambil keputusan-keputusan penting di sektor pendidikan. Tes PISA membantu pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang dapat memberikan pengajaran berkualitas tinggi, kesempatan belajar yang adil untuk semua, dan meningkatkan kesejahteraan siswa.

Tujuannya tidak hanya tahu atau paham di tiga bidang yang diujikan, tetapi juga untuk mengetahui apa yang siswa bisa lakukan dengan pemahamannya.

Pada 2022, OECD menyelenggarakan PISA dan Indonesia kembali menjadi salah satu peserta bersama 81 negara lain. Skor PISA 2022 Indonesia adalah 359 (membaca), 379 (matematika), dan 383 (sains). Singapura 575 (matematika), 543 (membaca), dan 561 (sains). Vietnam 469 (matematika), 462 (membaca), dan 472 (sains).

Untuk membantu memahami hubungan skor PISA siswa dengan kemampuan substantifnya, skala PISA terbagi dalam delapan tingkat kemahiran, mulai dari terendah 1c, 1b, 1a, 2, 3, 4, 5, dan tertinggi 6. Untuk mampu bertahan hidup dalam ekonomi modern, setidaknya siswa kita harus berada di level 2 atau lebih tinggi.

Untuk tes matematika, pada level 2 siswa mampu mengenali situasi di mana mereka perlu merancang strategi sederhana untuk memecahkan masalah, termasuk menjalankan simulasi langsung yang melibatkan satu variabel sebagai bagian dari strategi solusi mereka.

Mereka dapat mengekstrak informasi yang relevan dari satu atau lebih sumber yang menggunakan bentuk representasi sedikit lebih kompleks, seperti tabel dua arah, bagan, atau representasi dua dimensi dari objek tiga dimensi.

Sebanyak 18 persen siswa Indonesia mencapai tingkat kemahiran level 2 atau di atasnya. Ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD yang 69 persen. Sebagai perbandingan, lebih dari 85 persen siswa di Singapura, Makau, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan Estonia berada di level 2 atau lebih tinggi.

Di level 5 untuk tes matematika, siswa bisa mengembangkan dan bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks, mengidentifikasi atau menerapkan batasan, dan menentukan asumsi.

Mereka dapat menerapkan strategi pemecahan masalah yang sistematis dan terencana untuk menangani tugas-tugas yang lebih menantang, seperti memutuskan bagaimana mengembangkan eksperimen, merancang prosedur yang optimal, atau bekerja dengan visualisasi lebih kompleks yang tidak diberikan dalam tugas itu.

Siswa menunjukkan peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah yang solusinya sering kali memerlukan penggabungan pengetahuan matematika yang tak dinyatakan secara eksplisit dalam soal.

Siswa Indonesia hampir tak ada yang mencapai level tertinggi (5 dan 6), sementara rata-rata OECD 9 persen. Enam negara di Asia dengan jumlah siswa terbesar di level itu: Singapura (41 persen), Taiwan (32 persen), Makau (29 persen), Hong Kong (27 persen), Jepang (23 persen), Korea (23 persen).

Untuk tes membaca, sekitar 25 persen siswa Indonesia mencapai level 2 atau lebih tinggi dibandingkan rerata OECD 74 persen dan Singapura 89 persen. Di Indonesia, hampir tak ada siswa yang

Perbaikan ke depan

Bank Dunia mengusulkan perbaikan hasil belajar siswa Indonesia untuk meningkatkan skor PISA, antara lain melalui pembelajaran yang berfokus pada peserta didik (student center learning) serta penyediaan sumber belajar yang cukup beragam dan mudah diakses.

Juga guru yang mampu menjadi fasilitator pembelajaran yang secara reguler mendapatkan pelatihan dan dukungan untuk bisa belajar sepanjang hayat, penyediaan sekolah aman dan inklusif yang juga responsif terhadap dampak perubahan iklim, serta manajemen sekolah yang dapat memimpin dan mengarahkan guru untuk menghindari hilang atau berkurangnya hasil belajar siswa (learning loss).

Selain itu, bukti global menunjukkan, akses pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk semua dan investasi pada PAUD bisa menghasilkan anak berprestasi dan mampu menyelesaikan sekolah yang lebih tinggi. Selanjutnya, diperlukan penelaahan APBN dan APBD bidang pendidikan guna memastikan perencanaan



mendapat nilai level 5 atau lebih tinggi dalam membaca (rata-rata OECD 7 persen).

Pada tes sains, 34 persen siswa Indonesia mencapai level 2 atau lebih tinggi (rata-rata OECD 76 persen). Di Indonesia, hampir tak ada siswa mencapai level 5 dan 6, sementara rerata OECD 7 persen.

Menurut Rogers Pakpahan (2016), faktor-faktor yang memengaruhi prestasi siswa Indonesia pada studi PISA 2012 adalah latar belakang peserta dari faktor internal, yaitu jati diri siswa, dan faktor eksternal, seperti kondisi keluarga, kepemilikan sarana belajar, dan kondisi sosial budaya di rumah.

Penelitian menyimpulkan, jati diri, kondisi sosial ekonomi dan budaya, kepemilikan komputer dan buku-buku merupakan faktor utama yang memengaruhi capaian literasi matematika siswa Indonesia peserta PISA 2012.

Analisis data persepsi guru (OECD 2022) mengenai hambatan yang mereka temui selama pembelajaran berlangsung menunjukkan fakta berikut: pentingnya pemerataan jumlah guru, kurangnya infrastruktur fisik di sekolah perdesaan, perlunya perbaikan dan peremajaan infrastruktur fisik yang telah tersedia, dan pengadaan sumber daya digital di sekolah.

anggaran pendidikan yang terpadu, satu pintu, untuk memenuhi amanat UUD soal pendidikan yang harus dilaksanakan dalam satu sistem pendidikan nasional.

Lalu, perlu dipastikan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota. Tak kalah penting, memastikan anggaran pendidikan digunakan untuk program-program yang memperbaiki hasil belajar siswa dan anggaran pendidikan digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Lebih lanjut, pemerintah pusat dan pemda perlu meningkatkan anggaran yang diberikan langsung ke sekolah-sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan sekolah-sekolah yang hasil belajarnya belum baik agar tambahan anggaran ini bisa mendorong kualitas belajar siswa.

Karena sekitar 55 persen APBN untuk pendidikan diberikan langsung ke kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia, perlu ada insentif dan disinsentif yang jelas dan penetapan indikator kinerja utama pemda dalam pencapaian peningkatan mutu pendidikan untuk mempertanggungjawabkan dana APBN yang diberikan langsung ke daerah itu. ●



SIAP GELAR PILKADA SERENTAK DENGAN AMAN

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak akan berlangsung aman dan tanpa gejolak. Untuk mempertegas tekad tersebut Provinsi Sumatera Selatan melaunching pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2024-2029.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor KPU Sumsel Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (5/5/2024).

Agus Fatoni mengatakan pelaksanaan Pilkada di Indonesia merupakan implementasi dari proses demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah baik itu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun tahapan pelaksanaan pemili-

"Sukses penyelenggaraan pemilihan setidaknya ditentukan oleh empat unsur, yaitu adanya dukungan dan fasilitas dari pemerintah, penyelenggara pemilihan yang mandiri dan berkualitas, peserta pemilihan yang taat terhadap peraturan serta masyarakat yang cerdas dan santun berpolitik," ucap Fatoni.

Agus Fatoni menyebut untuk kelancaran pelaksanaan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah telah memberikan bantuan dana hibah pemilihan serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Selatan.

dilakukan dengan diawali pelaksanaan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Sumsel dengan dilakukan secara serentak tercepat dan pertama di Indonesia bersama pemerintah kabupaten/kota serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumsel pada tanggal 9 November 2023 lalu.

"Pemberian dana hibah juga diberikan kepada TNI dan POLRI selaku unsur pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024," ucapnya.

Sementara itu, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumatera Selatan juga telah menyelenggarakan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 secara serentak dan yang pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Desember 2023 diikuti 180.751 orang yang terdiri dari ASN Pemerintah Provinsi, ASN Pemerintah Kabupaten/Kota dan ASN Instansi Vertikal se-Sumatera Selatan.

"Selain itu, Pemprov Sumatera Selatan telah menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemula (pelajar SMA/SMK/MA) se-Sumatera Selatan pada tanggal 18 Januari 2024 di Palembang dengan total peserta berjumlah 17.000 orang siswa/siswi yang terdiri dari 1.050 mengikuti secara langsung dan 15.550 mengikuti secara daring yang di dalam acara tersebut sekaligus dilaksanakan Penandatanganan Deklarasi Pemilih Pemula (Pelajar SLTA dan Pramuka) se-Sumatera Selatan oleh perwakilan siswa/siswi," jelas Fatoni.

Terakhir, Fatoni mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk nantinya menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya secara cerdas untuk menghasil-



han serentak tahun 2024 telah mulai dilakukan sejak terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemungutan suara pemilihan akan dilakukan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 nanti.

"Dana hibah yang diberikan untuk KPU Sumsel sebesar Rp 234.454.246.740, dengan rincian pada tahun 2023 diberikan 40% dan tahun 2024 sebesar 60% serta untuk Bawaslu Sumsel sebesar Rp 72.956.696.000. Dengan rincian pada tahun 2023 diberikan sebesar 40% dan tahun 2024 sebesar 60%," paparnya.

Pemberian dana hibah tersebut sudah

kan pemimpin yang berkualitas yang memegang teguh amanah rakyat serta bersama memelihara dan menjaga Sumatera Selatan sebagai daerah zero konflik.

"Jika pada Pilpres lalu tingkat partisipasi masyarakat Sumsel berada pada angka 84,82 persen. Mudah-mudahan pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel tahun 2024-2029 partisipasi pemilih bisa lebih baik lagi dan meningkat," kata Fatoni.

Sementara Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan Pilkada serentak tahun 2024 merupakan pengalaman pertama kali di Indonesia. Di mana terdapat 38 provinsi yang melaksanakan pemilihan, kecuali provinsi DI Yogyakarta, kemudian terdapat 514 Kabupaten/Kota akan digelar Pilkada serentak pada 27 November 2024. Hasyim juga mengapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni yang telah memberikan dukungan suksesnya Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

"Apresiasi kepada Pj Gubernur Sumsel atas dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu baik pilpres lalu dan kini pelaksanaan pilkada. Saya juga mengajak agar masyarakat Sumsel turut berpartisipasi aktif pada pemilihan 27 November mendatang," ujarnya.

Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya menjelaskan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur secara langsung pada tahun ini merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya di Sumsel. Selain itu, momentum peluncuran harus dilakukan di kantor KPU sebagai pusat penyelenggaraan pemilu.

"Pada 2019 lalu target partisipasi pemilih 77% secara nasional. Di Sumsel pada tahun 2019 mencapai 83 persen. Kemudian di tahun 2024 partisipasi pemilih di Sumsel cukup tinggi, yaitu 84,8 persen Pilpres Februari lalu. Begitu juga pada Pileg ada di kisaran 84%," ungkapnya.

NPHD Pengamanan Untuk TNI dan Polri

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni juga menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada TNI/Polri.

Menurut Agus Fatoni, komitmen

bersama seperti ini sangatlah penting dalam menyukseskan jalannya Pilkada serentak mendatang di Provinsi Sumsel. Kesuksesan ini juga pernah dibuktikan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) pada bulan Februari 2024 lalu.

"Alhamdulillah semua agenda demokrasi Pilpres dan Pileg sudah berjaya-

Sebagaimana diketahui, besar anggaran pengamanan Pilkada Tahun 2024 di Sumsel untuk TNI sebesar Rp 20 miliar dan Polri sebesar Rp 51,345 miliar. Sementara itu, besar anggaran pihak penyelenggara untuk KPU Provinsi sebesar Rp 234,545 miliar dan Bawaslu Provinsi sebesar Rp 72,956 miliar.

"Kalau kita melihat total keseluruhan



lan dengan baik dan lancar di Sumsel, ini semua berkat kerjasama berkat kekompatan dan juga komitmen kita bersama-sama," ucap Fatoni.

Kemudian, terkait pembiayaan pelaksanaan Pilkada berasal dari APBD daerah masing-masing. Untuk itu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota perlu memberikan hibah kepada pihak penyelenggara, mulai dari KPU, Bawaslu serta TNI dan Polri sebagai pihak yang diberi tugas mengamankan jalannya pesta demokrasi.

TNI dan Polri di Sumsel termasuk Kabupaten/Kota sebesar Rp 54,439 miliar dan untuk Polri sebesar Rp 135,714 miliar. Ini anggaran untuk pelaksanaan Pilkada kita, baik Pilkada di provinsi maupun di kabupaten/kota," kata Fatoni.

Fatoni menyebut Pilkada serentak se-Indonesia baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024. Meskipun demikian, dia yakin dapat berjalan dengan sukses karena rakyat Indonesia sudah terbiasa dalam mengikuti jalannya Pemilu. ●

HUT KE-78 SUMSEL LEBIH BERMAKNA

Ada makna penting pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengungkapkan sejumlah makna yang diambil dari momentum peringatan ke-78 tahun ini adalah menuju Sumatera Selatan Maju, Mandiri dan Sejahtera. Di antaranya, ulang tahun harus dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur, melakukan evaluasi dan melihat kembali apakah diperlukan scanning ulang terhadap kondisi saat ini.

"Mungkin kita perlu melakukan penyesuaian dan menata kembali terhadap apa yang akan kita lakukan serta target yang kita tetapkan. Melakukan inovasi (terobosan) untuk menghadapi kondisi internal, regional, nasional dan internasional yang selalu bergerak dinamis mengiringi langkah kita," ucap Fatoni dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Si-

dang DPRD Sumsel, Palembang.

Agus Fatoni mengatakan evaluasi terhadap capaian target harus mampu melihat posisi saat ini. Selain itu, dia juga menyebut diperlukan kejujuran dengan kondisi realitas di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Fatoni juga memaparkan berbagai capaian yang telah diraih Provinsi Sumsel dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir

meliputi pertumbuhan ekonomi Sumsel bergerak stabil di kisaran 5 persen per tahun.

Kondisi ini, secara tidak langsung ikut memicu turunnya persentase kemiskinan, hingga dapat mencapai angka 11,78 persen di tahun 2023.

"Angka ini menunjukkan bahwa Sumsel mampu menurunkan kemiskinan sebesar 10 persen poin selama 20 tahun. Mengiringi hal itu Sumsel juga mampu mendegradasi angka kemiskinan ekstrem menjadi 1,29 persen



sekaligus memberikan tren yang selalu menurun dari tahun ke tahun,” ucap Fatoni.

Tak hanya itu, Fatoni juga menyebut berkembangnya subsektor ekonomi kreatif dan bergesernya sektor pertanian ke sektor industri juga berimbas pada keberhasilan Sumsel menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tercatat pada tahun 2023 berada di angka 4,11 persen dan angka tersebut lebih baik dibandingkan nasional.

“Pembangunan manusia tetap menjadi prioritas Provinsi Sumsel, indikasinya dengan semakin membaiknya skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2023 IPM sudah mencapai 73,18 dan merupakan tahun keenam status IPM kategori tinggi, meskipun angkanya masih berada di bawah nasional,” ujar Fatoni.

Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel R.A Anita Noeringhati yang menceritakan sejarah terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan.

Kali ini, HUT Provinsi Sumsel ke-78 Tahun 2024 mengusung tema ‘Dengan Semangat Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 Tahun 2024 Menuju Sumsel Maju, Mandiri dan Sejahtera.’

“Tema yang diangkat pada HUT Sumsel ke 78 ini, kita harapkan akan bisa membawa Sumsel menjadi Provinsi terdepan dan terbaik,” ucap Anita Noeringhati.

Selain itu, Anita juga mengapresiasi capaian yang telah diraih Provinsi Sumsel di usia ke-78 tahun. Khusus kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni yang tak hentinya membuat berbagai gebrakan brilian guna memajukan Sumsel.

“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada bapak Agus Fatoni selaku Pj Gubernur Sumatera Selatan yang membangun Sumsel melalui pemikiran-pemikiran yang inovatifnya,” ucap Anita.

Momentum Untuk Berbagi

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sumsel ke-78 ini merupakan saat yang tepat untuk berbagi.

Hal ini terlihat saat Fatoni didamp-

ingi Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A Anita Noeringhati secara simbolis menyerahkan bantuan pondok pesantren (Ponpes) yang berdomisili dalam Kota Palembang dan paket bantuan sosial (bansos) serta bantuan lainnya yang diperuntukan bagi para Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) di Sumsel di sela-sela sidang paripurna istimewa DPRD Sumsel.

Selain itu, Fatoni juga mengungkapkan sejumlah makna yang diambil dari

dap apa yang akan kita lakukan serta target yang kita tetapkan. Melakukan inovasi (terobosan) untuk menghadapi kondisi internal, regional, nasional dan internasional yang selalu bergerak dinamis mengiringi langkah kita,” ucap Fatoni.

Fatoni mengatakan evaluasi terhadap capaian target harus mampu melihat posisi saat ini. Selain itu, dia juga menyebut diperlukan kejujuran dengan kondisi realitas di tengah-tengah



momentum peringatan HUT Provinsi Sumsel ke-78 tahun menuju Sumsel Maju, Mandiri dan Sejahtera. Di antaranya, ulang tahun harus dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur, melakukan evaluasi dan melihat kembali apakah diperlukan scanning ulang terhadap kondisi saat ini.

“Mungkin kita perlu melakukan penyesuaian dan menata kembali terha-

masyarakat.

Selanjutnya di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Fatoni juga memaparkan berbagai capaian yang telah diraih Provinsi Sumsel dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir meliputi pertumbuhan ekonomi Sumsel bergerak stabil di kisaran 5 persen per tahun. ●

PERTAMA DI INDONESIA, BENTUK SEKRETARIAT BERSAMA SAMSAT

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan membentuk sekretariat bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi, program ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peresmian Gedung Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTD) Pengelolaan Pelayanan Daerah (PPD) Wilayah Palembang IV, UPTB PPD Wilayah OKI dan Kantor bersama Samsat OKI yang dipusatkan di Kantor UPTB PPD Wilayah Palembang IV Simpang BLK, Kecamatan Sako Palembang, Sumatera Selatan.

"Keberadaan Samsat Provinsi ini merupakan berupaya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak salah satunya melalui peningkatan mutu layanan kepada masyarakat, utamanya pada sektor pajak kendaraan bermotor," ucap Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni.

Selain itu, sejumlah upaya juga terus dilakukan Pemprov agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan. Di antaranya dengan meny-

iapkan fasilitas yang lengkap dan lebih nyaman serta waktu layanan yang singkat tidak berbelit-belit.

"Berbagai inovasi akan dilakukan, pada upaya jemput bola, pelayanan di hari Sabtu, Minggu dan hari libur, ada pelayanan malam hari kemudian pelayanan online. Ini terus dilakukan agar masyarakat dengan membayar pajak dengan mudah," ucap Fatoni.

Menurutnya, dengan kemudahan pembayaran pajak kendaraan maka administrasi kendaraan milik masyarakat juga semakin baik karena akan diupdate

setiap saat. Diharapkan kedepannya masyarakat akan lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak.

Imbasnya tentu pendapatan negara, daerah juga akan meningkat. Tak hanya itu, Pemprov Sumsel kedepannya juga akan memberikan insentif berupa pemotongan pajak, penghapusan pajak seperti BBN dan progresif serta pemutihan pajak.

Untuk itu dia berharap kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak juga akan meningkat. Jika pendapatan ini meningkat maka biaya pembangunan



untuk infrastruktur, gedung-gedung, biaya pendidikan, kesehatan, pelayanan yang lain akan selalu lebih baik.

"Apabila masyarakat tidak membayar juga akan ada sanksi. Selain sanksi denda kemungkinan juga yang lain bisa pemblokiran kendaraan bermotor. Sehingga mari bersama-sama kita membayar pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan pembangunan di Sumsel," katanya.

Fatoni menilai pajak kendaraan bermotor yang terkumpul memberikan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 60 persen. Provinsi Sumsel sendiri angkanya mencapai 52 persen lebih.

"Artinya sektor pajak kendaraan bermotor ini sangat penting untuk membi-



Jika pendapatan ini meningkat maka biaya pembangunan untuk infrastruktur, gedung-gedung, biaya pendidikan, kesehatan, pelayanan yang lain akan selalu lebih baik.

ayai pembangunan di Sumsel," imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan mengatakan pembangunan Gedung Kantor UPTB PPD Wilayah Palembang IV dan UPTB PPD Wilayah OKI I untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

"Dengan fasilitas yang lebih modern dan lokasi yang strategis, kami berharap dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para wajib pajak dan masyarakat," paparnya.

Optimalkan PAD Pajak Daerah

Diresmikannya kantor bersama Sam-

sat ini sebagai bentuk nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak salah satunya melalui peningkatan mutu layanan kepada masyarakat pada sektor pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, sejumlah upaya juga terus

baik karena akan diupdate setiap saat. Kedepannya masyarakat akan lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak.

Tak hanya itu, Pemprov Sumsel kedepannya juga akan memberikan insentif berupa pemotongan pajak, penghapusan pajak seperti BBN dan progresif serta pemutihan pajak. Diharapkan kesadaran



dilakukan Pemprov agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan. Di antaranya dengan menyiapkan fasilitas yang lengkap dan lebih nyaman serta waktu layanan yang singkat tidak berbelit-belit.

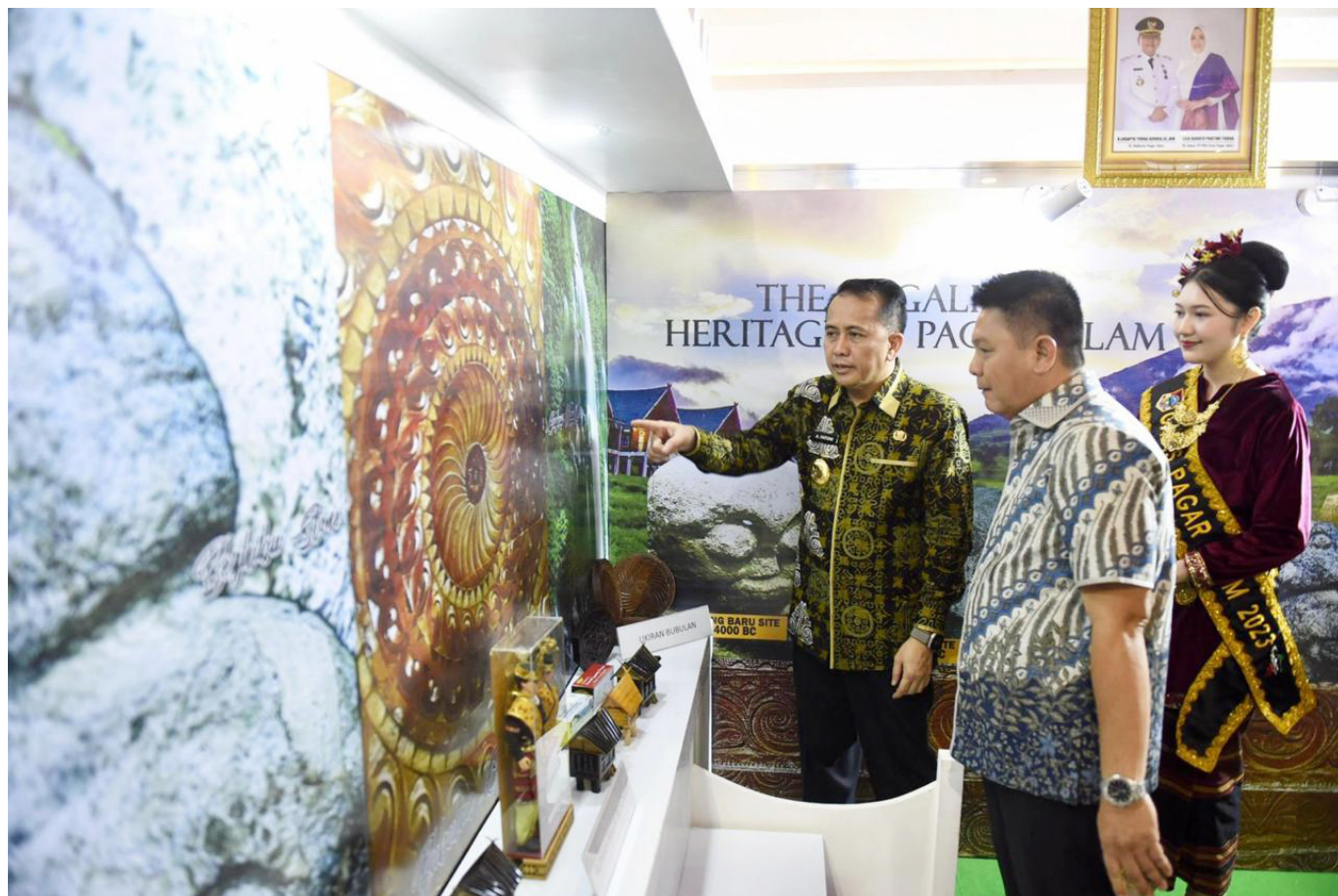
Dengan berbagai inovasi akan dilakukan, pada upaya jemput bola, pelayanan di hari Sabtu, Minggu dan hari libur, ada pelayanan malam hari kemudian pelayanan online. Hal ini agar masyarakat dengan membayar pajak dengan mudah.

Melalui kemudahan pembayaran pajak kendaraan maka administrasi kendaraan milik masyarakat juga semakin

masyarakat terhadap wajib pajak juga akan meningkat.

"Jika pendapatan ini meningkat maka biaya pembangunan untuk infrastruktur, gedung-gedung, biaya pendidikan, kesehatan, pelayanan yang lain akan selalu lebih baik," kata Fatoni.

Semua pajak kendaraan bermotor yang terkumpul memberikan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 60 persen. Provinsi Sumsel sendiri angkanya mencapai 52 persen lebih hal ini tentu menjadi pendapatan yang cukup besar bagi daerah. •



GIATKAN EKONOMI WISATA DAN KULINER

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menggeliatkan ekonomi dari sektor pariwisata dan kuliner. Ada banyak program ditawarkan untuk menggaet wisatawan agar datang ke Sumsel yang memiliki berbagai keunikan dan ciri khas.

Bahkan Penjabat (Pj) Sumsel Agus Fatoni mengajak wisatawan lokal dan mancanegara untuk mengunjungi destinasi wisata dan mencicipi kuliner khas Sumsel.

"Provinsi Sumsel merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia, memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar karena memang Sumsel ini induk dari provinsi-provinsi di Sumbagsel. Potensi alam di Sumsel cukup banyak, keindahannya juga bagus-bagus ada Danau Ranau, Gunung Dempo di Pagar Alam, ada bukit dan Sungai Musi," ujar Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni saat membuka Explore

South Sumatera Expo 2024 di Discovery Mall Bali, Badung, Bali.

Selain itu, Fatoni juga mengatakan bahwa Sumsel memiliki banyak sekali kerajinan kreatif, salah satunya adalah songket.

"Tidak hanya itu, banyak juga hasil kerajinan ekonomi kreatif di Sumsel dan itu berkembang cukup baik," kata Fatoni.

Agus Fatoni menyebut Explore South Sumatera Expo 2024 ini sengaja digelar di Bali agar para wisatawan domestik dan mancanegara akan lebih mengenal Sumsel. Mengingat Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia.

"Di Bali ini banyak sekali wisatawan

yang datang baik itu domestik maupun mancanegara. Jadi itu alasan kita menjadikan Bali sebagai lokasi expo," ucapnya.

Selain itu, Fatoni mengatakan kegiatan serupa juga akan terus digelar sehingga mendorong tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sumsel.

Melalui kesempatan ini, dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan Explore South Sumatera Expo 2024.

"Saya berterima kasih kepada seluruh komunitas yang mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan yang akan datang akan lebih semarak lagi, bisa

lebih besar lagi dan melibatkan banyak pihak sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal Sumsel dan berbagai macam budayanya,” ujar Fatoni.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel Aufa Syahrizal mengatakan Explore South Sumatera Expo 2024 merupakan yang kedua kalinya dan diselenggarakan pada 25 hingga 28 April 2024. Kegiatan ini turut melibatkan UMKM yang berasal dari 17 Kabupaten dan Kota se-Sumsel serta partisipasi dari daerah lainnya di luar Sumsel.

Bentuk Tim Pencarian Peninggalan Sejarah

Guna memaksimalkan ekonomi wisata dan sejarah, Agus Fatoni dalam waktu dekat akan membentuk tim pen-



Tidak hanya itu, banyak juga hasil kerajinan ekonomi kreatif di Sumsel dan itu berkembang cukup baik.

carian peninggalan sejarah.

“Kita akan bentuk tim mencari peninggalan-peninggalan sejarah baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang didalamnya ada ahli pakar, ahli sejarah, dan lain sebagainya,” ucap Fatoni saat meninjau Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa dan Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS), Palembang, Sumatera Selatan.

Menurutnya, keberadaan benda sejarah Sumsel harus dijaga, dirawat dan dilestarikan. Hal ini dikarenakan banyak sekali informasi yang dapat diketahui melalui koleksi museum di Sumsel. Sehingga museum akan semakin menarik dan menarik para pengunjung untuk melakukan wisata sejarah.

“Ini milik kita, mari kita rawat bersama-sama dan kita perlu jaga bersama-sama. Museum-museum ini cukup bagus, banyak sekali pelajaran yang bisa

kita ambil, banyak sekali informasi sejarah yang bisa kita ketahui, namun banyak juga masyarakat yang belum tahu kalau ada museum ini,” kata Fatoni.

Fatoni juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama merawat dan menjaga museum yang ada di Provinsi Sumsel. Sekaligus dia meminta masyarakat

Fatoni juga mengunjungi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) Palembang yang merupakan museum khusus karena hanya mengangkat satu tema, yaitu Kerajaan Sriwijaya.

Berbagai koleksi dipamerkan di museum ini, namun diklasifikasikan dalam



ikut mempromosikannya agar lebih dikenal oleh masyarakat luar Sumsel.

“Mari kita sampaikan kepada masyarakat betapa museum ini juga sangat penting, untuk bisa menambah ilmu pengetahuan kita, untuk kita mengetahui sejarah dan banyak pelajaran yang kita bisa petik dari museum yang kita cinta ini,” tandasnya.

Selain mengunjungi museum, Fatoni juga berkesempatan meninjau langsung rumah adat, yakni Rumah Limas dan Rumah Lamban Ulu Ogan yang berlokasi di bagian belakang Museum Balaputra Dewa.

dua tema, yaitu arkeologika dan keramologika yang disajikan secara kronologis mulai dari pra Sriwijaya, Sriwijaya dan pasca Sriwijaya.

“Jadi dengan melihat museum, kita melihat sejarah, bisa membaca sejarah dan melihat sejarah peninggalan-peninggalannya. Kemudian kita bisa melihat budayanya, adat istiadatnya dan lain sebagainya. Museum ini sangat kaya informasi dan kaya ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya, jadi masyarakat termasuk anak-anak muda, generasi muda, silahkan datang ke museum ini,” ajaknya. •



MENUJU SUMSEL MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA

Bulan Mei menjadi waktu istimewa bagi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) karena bertepatan dengan hari jadi provinsi ini. Dimana tanggal 15 Mei 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Sumatera Selatan berdasarkan pada Perda Sumsel No. 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumsel. Di tahun 2024 ini Provinsi Sumsel genap berusia 78 tahun.

Saat ini Provinsi Sumsel dinakhodai Penjabat (Pj) Gubernur Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si yang dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Senin (2/10/2023) lalu.

Pelantikan Pj Gubernur Sumsel tersebut mengacu pada Keputusan Presiden atau Keppres No. 87/P/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Di kesempatan yang sama juga dilakukan pelantikan Penjabat (Pj) Ketua Tim (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumsel Tyas Fatoni oleh Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian.

Sebagai Pj Gubernur Agus Fatoni komitmen melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari Mendagri. Khususnya menuntaskan agenda prioritas yakni penurunan stunting, mengendalikan inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan Pemilu 2024.

Penduduk Miskin Provinsi Sumsel Menurun

Berbagai keberhasilan telah dicapai oleh Provinsi Sumsel. Provinsi ini berhas-

il menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 11,78 persen, turun 0,12 persen poin terhadap Maret 2022, dan turun 0,17 persen poin terhadap September 2022.

Kondisi tersebut juga diikuti dengan turunnya persentase penduduk miskin di daerah perkotaan menjadi 11,07 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 12,31 persen pada Maret 2022 menjadi 12,30 persen pada September 2022 dan turun menjadi 12,21 persen pada Maret 2023.

Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mengapresiasi capaian kinerja Pj Gubernur Agus Fatoni sebagaimana terungkap dalam kegiatan

Evaluasi Kinerja Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri.

Staf khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengapresiasi langkah pejabat Gubernur Sumatera Selatan dalam upayanya menurunkan angka kemiskinan di persentase nol persen.

"Kami lihat bagus penurunannya paling cepat di Sumatera dan empat Kabupaten sudah bebas dari kemiskinan ekstrem. Karena kan targetnya tahun 2024 ini seharusnya semua daerah 0 persen. Sumsel ini boleh dikatakan delapan Kabupaten/Kota sudah nol koma sekian persen, kalau sudah angka segitu jika dipertahankan hingga 2024 itu sudah akan bebas dari kemiskinan ekstrim," ucap Kastorius.

Sukses Tekan Laju Inflasi

Upaya pengendalian inflasi juga terus lakukan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui kolaborasi antara Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumatera Selatan (GPISS) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan mengacu pada kerangka 4K meliputi ket-erjangkauan harga, men- j a g a ket-ersediaan pasokan, men- j a m i n kelancaran dis-tribusi, dan mening- katkan komunikasi yang efektif.

Inspektur 3 Itjen Kemendagri Elfin Elyas, selaku Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga men-



gapresiasi turunnya inflasi di dua kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim pada periode Januari-Maret 2024.

"Ke depan ada dorongan dari Pak Gubernur ke kabupaten/kota untuk membuat proposal neraca pangan kedepannya. Saya yakin ini bisa disajikan dan dianjurkan kemudian dilaksanakan ke kabupaten/kota," sarannya pada kegiatan Evaluasi Kinerja Penjabat (PJ) Kepala Daerah di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Jakarta.

IPM dan Ekonomi Meningkat

Tak hanya sampai disitu, Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah berhasil mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencapai 73,18 meningkat 0,70 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Sementara Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 (y-on-y) yang jika dibanding dengan triwulan sebelumnya Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,02 persen (q-to-q).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumsel. Hasilnya TPT pada bulan Februari 2024 tercatat 3,97 persen atau turun jika dibandingkan bulan Februari 2023 yang tercatat 4,53 persen.

"Persentase tingkat pengangguran terbuka kita ini pada Februari 2024 ini tercatat sebesar 3,97% atau turun dibandingkan dengan kondisi Februari 2023 yang tercatat sebesar 4,53%. Jadi kita dari Februari 2023 hingga Februari 2024 mampu turun sebesar 0,56%," ucap Kepala BPS Provinsi Sumsel Moh. Wahyu Yulianto.

Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2024 sebanyak 4,56 juta orang atau naik 62,6 ribu orang dibanding periode yang sama pada Februari 2023. Hal itu juga dibarengi dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumsel pada Februari 2024 sebesar 3,97 persen atau turun sebesar 0,56 persen dibanding bulan Februari 2023.

Penduduk yang bekerja sebanyak 4,38 juta orang juga naik sebanyak 85,2 ribu orang dari Februari 2023. Lapangan

usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 76 ribu orang.

Sedangkan 1,60 juta orang atau 36,59 persen lagi lanjut dia, bekerja pada kegiatan formal. Angka tersebut nilainya stabil meskipun mengalami sedikit

penurunan sebesar 0,02 persen poin dibanding Februari 2023.

"Persentase setengah pengangguran naik sebesar 2,43 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 3,16 persen poin dibanding Februari 2023," kata Wahyu. •





EKONOMI SUMSEL MENINGKAT PESAT

Dari segi Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Maret 2024 mengalami Surplus US\$308,87 juta dengan nilai ekspor Sumatera Selatan Maret 2024 mencapai US\$503,09 juta atau naik 12,94 persen dibanding ekspor Februari 2024.

Secara kumulatif, nilai ekspor terbesar Sumatera Selatan Januari-Maret 2024 ditujukan ke Tiongkok sebesar US\$512,26 juta, India sebesar US\$164,84 juta, dan Malaysia sebesar US\$128,28 juta, dengan kontribusi ketiganya mencapai 57,95 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa masing-masing sebesar 22,40 persen dan 3,47 persen.

Selain itu, BPS Sumsel juga mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Selatan pada bulan April 2024 naik 0,94 persen dibandingkan NTP bulan lalu, yaitu dari 115,20 menjadi 116,28.

Kenaikan NTP April 2024 dipen-

garuhi oleh subsektor perkebunan, yaitu sebesar 3,15 persen. Sedangkan NTP yang mengalami penurunan pada subsektor tanaman pangan sebesar 6,35 persen, hortikultura 5,60 persen, peternakan 0,35 persen, perikanan 0,66 persen, perikanan tangkap 0,53 persen dan perikanan budidaya 0,85 persen," jelas Wahyu.

Sementara itu, pada bulan April 2024, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen, yaitu dari 124,06 menjadi 124,86.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) provinsi Sumatera Selatan April 2024 sebesar 119,82 atau

naik 1,50 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Di sektor transportasi, jumlah kedatangan penumpang adalah sebanyak 108.485 orang atau naik 0,96 persen. Aktivitas bongkar muat barang angkutan laut di bulan Maret 2024 naik 10,28 persen menjadi 292.823 ton.

Selama periode Januari- Maret 2024 jumlah penumpang naik sebesar 15,40 persen dibanding periode yang sama di tahun 2023.

Jadi Provinsi Terinovatif

Sebelumnya dalam ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 lalu, Provinsi Sumatera Selatan berhasil

menguukuhkan diri sebagai Provinsi Terinovatif dengan 214 inovasi baru sepanjang tahun 2023. Ditandai dengan penyerahan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP



Salah inovasi yang menonjol adalah Sumsel Satu-satunya di Sumatera 100 persen digital pada sistem pemerintah daerah.

Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Di kesempatan itu Agus Fatoni menerima dua penghargaan sekaligus masing-masing dalam kategori Provinsi Terinovatif untuk ketiga kalinya sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Sedangkan penghargaan yang kedua dalam kategori Skor Tertinggi Regional I.

Salah inovasi yang menonjol adalah Sumsel Satu-satunya di Sumatera 100 persen digital pada sistem pemerintah daerah.

Provinsi Sumatera Selatan bersama 17 kabupaten/kota, pada semester kedua tahun 2023, menjadi satu-satunya wilayah di Sumatera yang 100% digital pada sistem pemerintahan daerah (Pemda).

Di bidang pencegahan, Provinsi Sumsel diapresiasi dunia internasional berkat

keberhasilan kerja Pemerintah Provinsi Sumsel bersama den-



gan stakeholder dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Atas prestasi itu Pj Gubernur Agus Fatoni mendapat kesempatan menjadi pembicara dalam sesi Talkshow "B5. Role of A C - CTHPC: towards FOLU Net Sink 2030 and

Haze Free ASEAN by 2030" sebagai bagian dari the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework

Convention on Climate Change di Uni Emirat Arab pada 10 Desember 2023 lalu.

ACCTHPC (Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) atau Pusat Koordinasi Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas, merupakan instrumen kerja sama antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.

Sedangkan Conference of the Parties atau COP merupakan pertemuan tahunan yang diinisiasi oleh PBB untuk menilai capaian negara-negara anggota dalam menekan emisi karbon.

Pada COP ke-28 ini, Paviliun Indonesia menggelar talk show untuk menjabarkan tentang langkah yang telah dan sedang dilakukan dalam menekan emisi karbon. Adapun Agus Fatoni berkesempatan berbagi pengalaman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dijalankan oleh Pemprov Sumsel di tahun 2023. ●

MAJU LEWAT 5 PROGRAM PRIORITAS DAN 7 GERAKAN SERENTAK

Sejumlah keberhasilan yang telah diraih Provinsi Sumsel tersebut tidak terlepas dari kerja sama, kolaborasi seluruh elemen dan stakeholders mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN, BUMD serta masyarakat.

Utamanya dalam upaya menyukseskan lima (5) program prioritas Pj Gubernur Agus Fatoni yakni penurunan stunting, mengendalikan inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan

Pemilu 2024.

Untuk meningkatkan program tersebut Pj Gubernur Sumsel juga melakukan tujuh Gerakan Serentak guna memaksimalkan berbagai hasil pembangunan di wilayah Sumatera Selatan utamanya dalam hal mengendalikan inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem serta menekan angka stunting.

Hal ini dilakukan guna mencapai terwujudnya Sumsel Maju, Terdepan dan Berkelanjutan.

Ketujuh Gerakan Serentak adalah Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel yang tersebar di 19 titik se-Sumsel, baik itu pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung tiga hari dalam sepekan, yaitu Senin, Selasa dan Kamis.

Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Inflasi Serentak se-Sumsel guna meningkatkan efektivitas koordinasi agar lebih maksimal. Kedua Gerakan Serentak tersebut diluncurkan langsung

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada awal tahun 2024.

Selanjutnya Pemprov Sumsel juga launching tiga Gerakan Serentak lainnya yakni Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS) yang akan direalisasikan pada 8.391 rumah tak layak huni.

Jumlah tersebut masih bisa bertambah seiring dengan program dari dana desa juga Baznas Provinsi dan kabupaten/kota serta CSR perusahaan swasta sehingga bisa mencapai 13 ribu rumah lebih yang akan dibedah.

Kemudian Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS) yang direncanakan akan membangun sanitasi sebanyak 6.984 rumah warga.

Selanjutnya ada Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPStSS). Saat ini tercatat 33,64 persen anak yang dibantu melalui program Bunda Ayah Asuh Stunting (BAAS) ten-



tunya juga tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sumsel.

“Untuk Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan, Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan dan Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan ini kami launching bersama Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian yang sangat peduli dengan persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelas Fatoni.

Pemprov Sumsel juga memiliki Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP). Melalui gerakan ini, pemerintah masyarakat untuk mau memulai menanam bahan pokok seperti bawang merah dan cabai di pekarangan rumah masing-masing.

“Gerakan ini juga sebagai upaya dalam merubah pola pikir masyarakat dari konsumen menjadi produsen melalui bantuan bibit hortikultura, ternak dan perikanan,” kata Fatoni.

Provinsi Sumsel juga telah melaksanakan perluasan program melalui GSMP Goes to School and Goes to Office. Program ini juga bekerjasama dengan TP PKK Provinsi Sumsel bekerjasama dengan sekolah-sekolah, TP PKK Kabupaten/Kota dan seluruh OPD yang ada di provinsi Sumatera Selatan untuk memasifkan GSMP dan mendukung GSMP Goes to School dan GSMP Goes to Office.

“Gerakan ini diharapkan dapat mendukung penurunan angka kemiskinan, angka stunting, menjaga kestabilan inflasi dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat sumsel sehingga hidup sehat, aktif dan produktif,” ucap Agus Fatoni.

Kemudian Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Energi Serentak se-Sumsel. Program ini merupakan kolaborasi antara BUMN dengan BUMD untuk kemandirian energi di Sumatera Selatan.

Meriahkan HUT Sumsel ke-78

Berbagai agenda kegiatan digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Sumsel ke-78. Diantaranya pengobatan gratis dan donor darah, kunjungan ke panti sosial, lomba kebersihan kantor, lomba gemar makan ikan, jalan santai dan senam massal dan lomba permainan tradisional dengan melibat-



kan ASN di lingkungan Pemprov Sumsel.

Selain itu juga PJ Gubernur Agus Fatoni berkesempatan melaunching Brand “Kopi Sumsel” di Pelataran Sungai Seakanak Lambidaro Palembang.

Puncak peringatan HUT Provinsi Sumsel ke 78 Tahun 2024 ditandai den-

gan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (15/5/2024). Dilanjutkan dengan agenda peresmian 8.391 unit rumah yang dibedah sebagai realisasi dari Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS) yang sebelumnya telah di launching oleh Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian. ●



DENMARK JADI PERCONTOHAN PEMBANGUNAN IKN DI KALTIM

Geliat pembangunan di Kalimantan Timur semakin terasa sejak ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Banyak investor yang masuk ke Benua Etam untuk berpartisipasi dalam pembangunan megaprojek bernilai ratusan triliun itu, salah satunya dari Denmark.

Baru-baru ini, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, HE Sten Frimodt Nielsen, mengunjungi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara didampingi Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik.

Menurut Akmal, Denmark sengaja masuk ke IKN melalui Pemprov Kaltim dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan kawasan penyangga. Denmark yang jauh berada di Eropa, bahkan berharap agar jangan sampai terjadi kesenjangan atau disparitas antara IKN dan kawasan penyangga.

"Luar biasa Denmark ini. Mereka bahkan memikirkan hingga sejauh itu. Jangan sampai terjadi kesenjangan atau disparitas antara new capital dengan kawasan penyangga," kata Akmal di sela menjamu makan siang HE Sten Frimodt Nielsen di Restaurant Apoeng Balikpapan, Senin (6/5/2024).

Sebelum kondisi buruk terjadi, misal terjadi ketimpangan antara IKN dan kawasan penyangga, Denmark akan membantu dengan berbagi masukan dan pemikiran tentang bagaimana seharusnya kawasan penyangga mengambil peran.

Dubes Denmark mengakui kalau negara tak memiliki pengalaman terkait new capital. Tetapi soal pemerataan pembangunan, Denmark tak perlu diragukan lagi. Selain itu, Pemerintah Denmark juga siap membantu Kaltim, terutama dalam urusan dan isu-isu lingkungan hidup.

"Jadi hari ini mereka akan melihat lebih dulu ke IKN. Makanya saya dampingi. Mudah-mudahan mereka bisa membantu kita untuk mengurangi kesenjangan itu," jelas Akmal.

Disparitas atau kesenjangan yang dikhawatirkan tentu tak jauh dari urusan sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan

kawasan penyangga IKN meliputi Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Paser. Dalam jangka panjang, semua kabupaten dan kota di Kaltim secara otomatis akan menjadi kawasan penyangga IKN.

Kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, Sten Frimodt Nielsen juga menanyakan kesiapan infrastruktur Kaltim dan IKN terkini. Mereka juga bertanya tentang penduduk asli dan kondisi Kaltim secara umum.

Akmal menyebut, di antara provinsi di Kalimantan yang direncanakan menjadi new capital (ibu kota baru), hanya Kaltim yang memiliki infrastruktur lebih lengkap. Yakni ada Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Dua pelabuhan internasional juga tersedia di Balikpapan dan Samarinda. Kaltim juga satu-satunya provinsi

di Kalimantan yang sudah memiliki tol, yakni Tol Balikpapan-Samarinda.

Adapun rombongan Dubes Denmark ke IKN meninjau tiga lokasi. Pertama, mereka mengunjungi Rumah Teknologi Nusantara yang merupakan destinasi wisata yang menjelaskan konsep dan perkembangan IKN. Kedua, mereka melihat dekat rencana lahan diplomatic compound (kompleks diplomatik). Ketiga, rombongan Dubes Denmark meninjau Miniatur Hutan Hujan Tropis yang letaknya satu lahan dengan lokasi glamping IKN.

Akmal menerangkan, dirinya mendampingi kunjungan Dubes Denmark sebagai bagian dari fasilitasi Pemprov Kaltim kepada perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia.

"Jadi konsepnya itu kita memang mengenalkan. Karena Kaltim wilayahnya berada di pinggir IKN. Jadi ke depan kita selalu memfasilitasi agar siapapun yang akan berkontribusi kepada IKN kita bantu," terang Akmal.

Akmal juga memamerkan konsep pembangunan IKN di Kabupaten PPU kepada Sten Frimodt Nielsen, yakni smart forest city atau kota pintar dan hijau. Dia berharap Dubes Denmark setelah mendapat penjelasan bisa mengabarkan kepada negara Eropa, bahkan dunia, seperti apa konsep pembangunan IKN dan perkembangannya.

"Kami juga sampaikan bahwa IKN ini dipindah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia," katanya.

Dia juga berharap dari hasil kunjungan Duta Besar Denmark tidak menutup peluang untuk membuka bagi Negara Eropa untuk menanamkan modal atau berinvestasi di Kota Nusantara.

"Ini mereka baru pertama ke IKN, kami berharap ini menjadi pintu untuk mereka melakukan investasi disini," ujar Akmal.

Kerja Sama Potensial

Akmal bersama Sten Frimodt Nielsen juga membahas membahas sejumlah program kerja sama potensial, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan.

"Kami sedang mencoba koordinasi untuk menentukan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh Kaltim. Seperti pendidikan dan pelatihan itu apa saja yang mesti diklasifikasikan segera," ungkap

Akmal.

Ia menjelaskan, target utama pendidikan dan pelatihan tersebut ialah untuk penguatan Kaltim sebagai daerah penyangga. Menurutnya, posisi Denmark sebagai negara maju dengan penduduk paling bahagia dan aman, menarik dipelajari dan diadaptasi untuk Kaltim ke depan.

"Mereka (Denmark) menggunakan teknologi tinggi seperti pantauan pengawasan secara digital untuk keamanan, yang serupa dengan konsep yang

lepas dari kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim," ucap Akmal.

Dalam suasana santai makan malam, kedua belah pihak berdiskusi tentang bagaimana program-program dari Denmark dapat diintegrasikan ke dalam pembangunan Kaltim. Akmal menekankan pentingnya membangun koneksi dengan daerah penyangga IKN dan mengadopsi pendekatan digital dalam pelayanan publik untuk mencapai



Kaltim bisa diadopsi seperti dibangun di IKN," ungkap Akmal.

Oleh karena itu, imbuhan Akmal, Kaltim harus mengarah ke sana, sehingga butuh pendampingan dari negara maju seperti Denmark. "Hal yang menjadi fokus pembahasan dengan mereka tak

efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi.

Akmal menambahkan, kerja sama dengan negara-negara maju seperti Denmark diharapkan dapat membawa Kaltim ke arah yang lebih maju, sejalan dengan perkembangan IKN yang pesat. ●



H SM Prana Putra Sohe SUKSES PIMPIN LUBUKLINGGAU, MENUJU SUMSEL 1

**Nama Calon Gubernur
(Cagub) Sumsel 2024
menjadi perhatian serius,
bahkan menjadi perbin-
cangan hangat.**

Salah satunya adalah Drs. H. SN Prana Putra Sohe, M.M, pria kelahiran 12 April 1967 ini merupakan birokrat dan politikus handal, tercatat dirinya dua periode menjadi Wali Kota Lubuklinggau 2013-2018 dan 2018-2023.

Tentu ini bukan hal yang mudah untuk membentuk dan berpegang teguh mengabdikan diri sebagai seorang Birokrat dan politikus saat menjabat sebagai Wali Kota Lubuklinggau Sumsel selama dua periode.

Pria yang akrab disapa Nanan ini digadang-gadang bakal maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumsel 2024.

Bahkan banyak kalangan masyarakat yang mendukung pencalonan dirinya sebagai Gubernur Sumsel. Bahkan, munculnya nama Nana akan menambah ramainya kontestasi Pilkada Sumsel.

Nanan merupakan putra daerah dan tokoh politik asal Lubuklinggau, Muratara. Dirinya merupakan salah satu tokoh yang cukup dikenal di Sumsel bahkan tingkat Nasional, ditambah dengan beberapa torehan prestasi tentu ini menjadi paket lengkap untuk menjadi orang nomor satu di Sumsel.

Setelah tamat SD ia melanjutkan sekolah di SMP 1 Lubuklinggau pada tahun 1983 kemudian melanjutkan studi di SMAN 2 Palembang hingga lulus pada tahun 1986. Namun, pada waktu itu ia tidak langsung melanjutkan studinya.

Barulah pada tahun 1992, ia melanjutkan S1 di FISIP Universitas Sriwijaya (Unsri). Tepat pada tahun 2002, ia sukses menyelesaikan pendidikan S2-nya di

STIE Widya Jayakarta sebagai seorang Magister Manajemen.

Karirnya dibidang politik bisa dikatakan tidak dimulai di Lubuklinggau. Pada tahun 1994, dua tahun setelah lulus sarjana, ia menjadi seorang CPNS di Kabupaten Pangkal Pinang. Ia juga sempat menjadi Staf Urusan Pemerintahan Kecamatan Taman Sari di Kabupaten tersebut pada tahun 1995.

Kariernya di Kota Lubuklinggau dimulai saat ia menjabat sebagai Kasubbid Data dan Informasi.

Sebelum menjadi seorang wali kota, ia juga sempat mendampingi Wali Kota Lubuklinggau sebelumnya, DRS. H. Riduan Effendi, SH, M.Si pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Pada tahun 2013, ia maju dan berhasil menjadi Wali Kota Lubuklinggau hingga tahun 2018.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg), Nanan berhasil mendapatkan suara yang membawa dirinya untuk duduk di DPR RI, dirinya berhasil mendapatkan suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel Satu (1) yang meliputi wilayah Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Muba, Lubuk Linggau, Musi Rawas dan Kabupaten Muratara.

Ini membuktikan bahwa Nanan memiliki basis suara yang besar terutama di wilayah Muratara dan elektabilitas yang cukup tinggi berkat kerja keras dan torehan prestasi selama menjabat sebagai Wali Kota Lubuk Linggau Dua Periode.

Sosok Nanan memang perlu menjadi pertimbangan dalam Pilgub Sumsel 2024, terlebih dirinya diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elektabilitas cukup tinggi dan tentunya bukan hal yang tidak mungkin membuat Peta-hana (Herman Deru) ketar-ketir.

Suami Yetti Oktarina yang juga telah memiliki tiga anak yakni Aufar Kasyfillah Putra Prana, Ammar Dhafin Putra Prana dan Indira Shafira Putri Prana, memiliki pesona tersendiri untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya terbukti dari besarnya animo masyarakat.

Nanan bahkan dikenal sebagai wali kota termiskin di Provinsi Sumsel, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dirinya



memiliki harta dengan nilai Rp18 Miliar lebih.

Namun di data LHKPN juga tertera SN Prana Putra Sohe memiliki hutang sebesar Rp12 Miliar, tentunya untuk seorang pejabat yang telah mengabdikan dirinya membangun negeri yang dijuluki Silampari Dua Periode tersebut terbilang kecil, apalagi dirinya lama berkarir sebagai ASN.

Namun hingga saat ini nama Nanan belum terlihat dan terpantau untuk mendeklarasikan diri mengikuti kontestasi Pilkada Sumsel dan dari berita yang beredar juga belum ada Cagub yang mengandung dirinya untuk menjadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumsel.

Nanan pun mengucapkan terimakasih bila namanya masuk dalam bursa Pilgub Sumsel 2024 mendatang.

"Terkait pencalonan Gubernur Sumsel mengucapkan terimakasih nama saya sudah menjadi salah satu kandidat Pilkada Sumsel," ujar Nanan.

Nanan mengatakan sudah sangat bersyukur Pemilu 14 Febuari kemarin masyarakat Sumsel sudah memilihnya dan mengantarkannya ke senayan.

Walau pun ia sadar diri perolehan suaranya Pada Pileg kemarin tidak ter-



lalu signifikan, bahkan jauh dibawah targetnya.

"Terkait hasil Pileg kemarin masih jauh, tapi apa pun itu kita bersyukur, karena PKB pecah telur, walaupun Pileg dan Pilkada itu hal berbeda ya," ungkapnya.

Termasuk bila PKB, partai tempatnya ber-naung saat ini menghendaki untuk mencalonkan diri, ia mengaku belum tertarik. Dan ingin fokus

mengamankan suara yang diraihnya saat ini.

"Saya bersyukur tapi sekarang saya masih konsen ngurus Pileg dulu pengamanan suara dan menunggu hasil nasional," ujarnya.

Bahkan Nanan berseloroh sesuai Pileg ini ke depan ia memilih untuk istirahat lebih dulu, dan belum mempunyai pemikiran untuk ikut kontestasi lagi.

"Saya mau istirahat dulu, belum terpikir masalah Pilkada intinya itu. Ketika disuruh mundur dari DPR RI saya tidak mau, kecuali kalau cuti ya itu mungkin saja," jelasnya. • IRY



BIODATA

Nama : H SN Prana Putra Sohe
Tanggal Lahir : 12 April 1967
Partai Politik : PKB
Istri : Yetti Oktarina
Anak : 3
Aufar Kasyfillah Putra Prana
Ammar Dhafin Putra Prana
Indira Shafira Putri Prana

RIWAYAT PENDIDIKAN

- * SD Xaverius Lubuklinggau (1980)
- * SMPN 1 Lubuklinggau (1983)
- * SMAN 2 Palembang (1986)
- * FISIP UNSRI Palembang (1992)
- * Magister Manajemen STIE Widya Jayakarta (2002)

RIWAYAT PEKERJAAN

- * CPNS Kecamatan Taman Sari Kabupaten Pangkal Pinang (1994)
- * Staf Urusan Pemerintahan Kecamatan Taman Sari Kabupaten Pangkal Pinang (1995)
- * Staf Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Musi Rawas
- * Kepala Seksi Ketertiban Kecamatan Muara Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- * Kasubbid Data dan Informasi Bappeda Kota Lubuklinggau
- * Kepala Seksi Pemuda Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau
- * Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau
- * Wakil Wali Kota Lubuklinggau (2008-2013).
- * Wali Kota Lubuklinggau (2013-2018)
- * Wali Kota Lubuklinggau (2018-2023).

Heri Amalindo

HIDUPKAN KEMBALI SEKOLAH DAN BEROBAT GRATIS DI SUMSEL

Dr Ir H Heri Amalindo benar-benar siap mendeklarasikan dirinya untuk kemajuan Sumatera Selatan (Sumsel), dengan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumsel 2024.

Heri Amalindo bahkan sudah memiliki nama yang bakal mendampinginya memimpin Sumsel 2024 - 2029 mendatang.

Keberhasilannya membawa kemajuan bagi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menjadi modal bahwa sosok yang dikenal dengan sapaan akrab Mang Heri ini layak diperhitungkan pada Pilgub Sumsel 2024. Politikus Senior PDI Perjuangan



gan itu sudah membulatkan tekadnya untuk maju sebagai Cagub Sumsel pada Pilkada serentak 2024.

"Jangan tanya kenapa saya akan mencalonkan diri jadi Gubernur Sumsel, namun tanyakanlah apa yang akan saya perbuat jika terpilih menjadi Gubernur Sumsel,"ujarnya.

Sebelum jadi Bupati PALI dua periode, Heri Amalindo adalah sosok yang berpengalaman di birokrasi dan pemerintahan, Heri Amalindo adalah salah satu birokrat terbaik di era kepemimpinan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin.

Bahkan, di zaman Alex Noerdin dia pernah dipercaya menjadi kepala Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PUBM) Provinsi Sumatera Selatan.

Berhasrat melanjutkan pengabdian yang lebih luas, Heri Amalindo berjanji akan kembali menghidupkan program sekolah dan berobat gratis yang merupakan program unggulan dari H Alex Noerdin.

Suami Hj Sri Kustina sudah membulatkan tekadnya untuk maju sebagai Cagub Sumsel 2024 bersama Popo Ali yang merupakan mantan Bupati OKU Selatan dan merupakan politisi partai Golkar.

Heri Amalindo mengusung tagline yang sama seperti program Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumsel, yakni Sekolah dan Berobat Gratis. Namun kali ini ia menambahkan kata, Hidupkan Kembali Sekolah dan Berobat Gratis!

Pria kelahiran 24 September 1963 menyebut sudah mengantongi sejumlah nama bakal calon wakil gubernur. Namun, hingga kini pihaknya akan terus membuka peluang koalisi.

"Kita belum terlalu terburu-buru untuk menentukan siapa yang bakal mendampingi nanti meskipun ini sudah masuk dalam ranah pilkada,"jelasnya.

Sebagai gambaran, ayah dua orang

anak ini menyebut bahwa untuk calon pendamping di Pilgub Sumsel harus memiliki tujuan yang sama dan mengerti dengan permasalahan yang dihadapi di Sumsel.

“Untuk gambaran nya, yang jelas memiliki tujuan sama dengan kita, dan yang bisa mengerti tentang permasalahan yang dihadapi Sumsel saat ini maupun kedepannya, sehingga dapat bekerjasama dalam membangun Sumsel,” ucapnya.

Selain itu, dalam memilih pasangan, ia juga tentu akan mempertimbangkan secara rasional. Baik secara popularitas, elektabilitas, kualitas dan itu semua tidak kalah penting.

Namun yang jelas keduanya diharapkan mampu melengkapi satu dengan yang lainnya.

“Terutama penguasaan terhadap wilayah atau basis masing-masing pasangan, sehingga nanti pasangan tersebut saling melengkapi. Targetnya kita harus menang,” jelasnya.

Untuk penguatan struktur pemenangan di seluruh Sumsel, pihaknya sudah menyiapkan infrastruktur tim pemenangan termasuk di Palembang yang memiliki jumlah pemilih terbesar.

“Kita sudah membentuk satgas di masing kecamatan, khusus kota Palembang sudah selesai di 18 kecamatan dan 5 ribu RT/RW,” jelasnya.

Saat ini yang ditunggu pelaksanaan deklarasi saja.

“Doakan saja secepatnya, kami akan mengumumkan bersama pasangan Cagub dan Cawagub. Tapi jangan keburu nafsu, nanti prematur lahirnya,” tandasnya.

Heri Amalindo mempunyai visi dan

misi yang mirip dengan pendahulunya, Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Ia bakal meneruskan program Sekolah dan Berobat Gratis yang disebut Heri Amalindo sukses dilaksanakan Alex Noerdin.

“Jika terpilih menjadi Gubernur Sumsel, saya akan melanjutkan Berobat dan Sekolah Gratis, tujuan penting untuk

masyarakat 17 kabupaten kota Sumsel,” jelasnya.

Menurut Heri Amalindo, Sekolah Gratis sebelumnya ketahui telah pernah dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sumsel, saat Gubernurnya dijabat oleh Alex Noerdin.

“Program Berobat Gratis dan Sekolah Gratis seperti saat Sumsel dipimpin Alex



BIODATA

Nama : Dr. Ir. H. Heri Amalindo, M.M
Tempat Tanggal Lahir : Lahat, 24 September 1963
Istri : Hj Sri Kustina
Anak : 2
Nurmalia Putri Amalin
Rahmad Sahid

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SMP Xaverius II Palembang (1976-1979)
- SMA Negeri 4 Yogyakarta (1979-1982)
- S1 Jurusan Teknik Sipil Universitas Sriwijaya (1982-1988)

RIWAYAT PEKERJAAN:

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Musi Banyuasin (1999)
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (2009)
- Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (2013-2015)
- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (2016-2020)
- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (2021-Petahana)

Noerdin, betapa masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Dan program ini akan saya lanjutkan nantinya,” kata dia.

Untuk diketahui, Heri Amalindo mengawali kariernya sebagai PNS, pernah menjabat Kadin PU di era Alex Nordin

saat menjadi Bupati MUBA.

Kemudian Heri Amalindo juga menjabat Kadin PU Bina Marga di era Gubernur Sumsel Alex Nordin. Sebelum akhirnya terpilih menjadi Bupati PALI dua periode.

Tanpa mengecilkan pembangunan lima tahun terakhir, dirinya ikut prihatin

dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, Heri Amalindo berpendapat bahwa Sumsel membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi untuk masa depan.

“Saya khawatir dengan kondisi Sumsel saat ini. Jadi, Sumsel memang membutuhkan seorang pemimpin yang membawa visi masa depan,” jelasnya.

Heri Amalindo yakin memiliki kapasitas untuk meneruskan kejayaan Sumsel seperti yang dicapai oleh Gubernur Alex Noerdin. Pada masa itu, Sumsel menjadi pusat olahraga, budaya, pariwisata, perdagangan, dan industri dan dikenal baik di Indonesia maupun internasional.

Dia memiliki tekad untuk mengoptimalkan kembali Kawasan Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) melalui tata kelola dan manajemen yang profesional. Tujuannya adalah agar GSJ dapat menjadi tuan rumah berbagai acara, termasuk pariwisata olahraga di wilayah tersebut.

“GSJ ke depannya tidak hanya sekadar bangunan yang terbengkalai, namun, dari sana haruslah muncul atlet-atlet berprestasi yang dapat mengangkat nama baik Sumatera Selatan di tingkat nasional, bahkan membawa citra Indonesia di mata dunia,” ungkapnya.

Heri Amalindo, selaku Ketua ICMI Orwil Sumsel, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga baik di Kabupaten Muba maupun di Pemprov Sumsel. Hal ini membuatnya sangat akrab dengan cara kerja Alex Noerdin pada masa pemerintahannya.

Salah satu fokus utamanya adalah mengembalikan program berobat dan sekolah gratis. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 69 persen masyarakat masih menginginkan program ini.

“Dari banyaknya survei yang kita lakukan, nyatanya untuk sekolah dan berobat gratis masih menjadi harapan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, ia berencana untuk mengatur ulang regulasi terkait program berobat dan sekolah gratis, sehingga masyarakat miskin dapat tercakup oleh program BPJS tanpa perlu membayar setiap bulan.

“Saya juga menyoroti perlunya mengatur regulasi untuk berobat dan sekolah gratis, seperti membayar BPJS kelas III untuk masyarakat miskin agar mereka tercakup oleh layanan kesehatan,” jelasnya.



Program ini diharapkan dapat direalisasikan melalui penganggaran yang terukur dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota serta pakar-pakar pendidikan dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan.

“Program sekolah gratis adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, sesuai dengan Amandemen Undang-Undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh,” tambahnya.

Sedangkan dalam program infrastruktur berkelanjutan, terutama dalam bidang jalan dan jembatan, Heri Amalindo memiliki pengetahuan mendalam tentang infrastruktur ini.

Oleh karena itu, program-program

yang berfokus pada sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat mengatasi masalah dengan pemberian pupuk gratis.

Sementara yang ikut menjadi sorotan adalah mangkraknya pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang diwacanakan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Dijelaskan Heri Amalindo, pembangunan Tanjung Carat itu tidak masuk dalam daftar program strategis nasional.

Sehingga, jika dirinya menjadi Gubernur Sumsel maka akan mengembalikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tersebut dalam program strategis nasional.

“Ya makanya jadi Gubernur dulu, baru

bisa tahu apa yang sedang terjadi dan akan mengembalikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat jadi program strategis nasional,” Beberanya.

Heri Amalindo telah menerima masukan dan saran dari berbagai tokoh Sumsel. Dia menyoroti fakta bahwa Sumsel, meskipun termasuk provinsi terkaya nomor 5, dikategorikan sebagai provinsi termiskin nomor 10. Hal ini perlu ditangani melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama di sektor pertanian.

Kemajuan Sumsel bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Program pariwisata Sumsel dan isu lain yang membutuhkan perhatian serius dari Pemprov Sumsel, termasuk mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC dengan memanfaatkan fasilitas olahraga yang sudah ada secara maksimal. ●IRY



Prima Salam JADI REBUTAN DI PILKADA PALEMBANG

Sosok Prima Salam sangat diperhitungkan dan digadang-gadang akan menjadi Wali Kota Palembang periode 2004-2029. Bahkan nahkoda Partai Gerindra Palembang ini diperebutkan kontestan lain dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Palembang.



Prima Salam lahir di Palembang 11 Agustus 1986, awalnya adalah pendatang baru di panggung politik. Saat mencalonkan diri Prima Salam belum menjadi kader secara struktural, latar belakang dulu hanya seorang wiraswasta.

Walaupun baru mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai Gerindra, Prima Salam lolos meraih kursi legislatif DPRD Perwakilan Dapil 1 Sumsel Periode 2019-2024. Lalu pada Pemilu 2024 suami dari Putri Azizah ini terpilih di Pileg DPRD Sumsel dengan 31.898 suara.

Nama Prima Salam yang tinggal di jalan Yayasan 1 IT II Palembang cukup disegani karena setiap kali mengikuti kompetisi di panggung politik selalu menang dan mengalahkan ribuan penantang lainnya.

Prima Salam SH alumni S1 STIH Sumpah Pemuda Palembang mendapatkan kepercayaan tinggi dari partai dengan dua jabatan penting. Prima Salam selain menjadi Ketua partai Gerindra Palembang juga menjabat sebagai Bendahara partai Gerindra Sumsel.

Disisi lain Prima Salam sangat mencintai dan sayang kepada semua ulama di Palembang dan Sumsel, bahkan di akun

sosial media (Sosmed) memposting video kedekatannya dengan penceramah kondang Ustaz Abdul Somad atau akrab disapa UAS dan Mama Dedeh dikenal dalam program TV Indosiar Curhat Mah.

Dia menuliskan di Instagram @primasalam bahwa UAS dan Mama Dedeh adalah gurunya dan dia murid yang akan selalu mendengarkan nasehat dan perkataan dari guru-gurunya tersebut.

Jadi Rebutan Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda

Pilkada 2024 di Palembang perlahan-lahan mulai panas karena dua calon kontestan wali kota sedang berebut



calon pasangannya untuk berlaga pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Palembang periode 2024-2029.

Bahkan kedua kontestan saling klaim dirinya akan berlaga dengan pasangannya yang sama. Keduanya adalah para petahana mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda dan Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang memperebutkan Prima Salam sebagai pasangannya.

"Alhamdulillah kalau seperti itu tentunya respon saya senang-senang saja,"kata Prima Salam yang juga Ketua Partai Gerindra Palembang dan Benda-

hara Partai Gerindra Sumsel ini.

Dia menyebutkan memiliki kedekatan dengan Ratu Dewa dan sekaligus mempunyai hubungan darah dengan Fitrianti Agustinda adik dari almarhum Romi Her-ton mantan Walikota Palembang itu.

"Saya tidak bisa juga membantah kalau dibuatkan spanduk karena Ratu Dewa saya kenal baik dan Ibu Fitri masih keluarga," jelasnya

Ditanya dari kedua kontestan yang akan bertarung di Pilkada Palembang sangat ingin melamarnya menjadi pendamping siapa yang akan dipilih Prima Salam. Dia menjawab tidak bisa menentukan karena dirinya teringat dengan in-struksi dari partai Gerindra.

"Saya serahkan keputusan kepada Ba-pak (Prabowo Subianto) kalau diminta untuk maju jadi Walikota untuk apa saya jadi nomor dua (Wakil Walikota), saya siap,"pungkasnya.

Siap Maju Pilwako Palembang, Tunggu Perintah Prabowo

Politisi partai Gerindra Prima Salam mengatakan, sudah siap lahir batin un-tuk bertarung di kompetisi Pilkada Pe-milihan Wali Kota (Pilwalkot) Palembang periode 2024-2029 pada 27 November 2024 nanti.

"Saya sudah siap maju tinggal tunggu perintah Bapak (Prabowo Subianto)," kata dia.

Menurut Ketua Partai Gerindra Palem-bang dan Bendahara Partai Gerindra Sumsel ini, instruksi awal Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto meminta semua Kepala Daerah sep-erti gubernur dan wali kota adalah kader Partai Gerindra. Dari sana dia tengah ber-siap menunggu instruksi selanjutnya.

"Tentunya optimis saya akan maju tinggal instruksi selanjutnya. Karena

kader partai Gerindra apabila maju se-muanya kebutuhan baik dana akan di-support oleh partai," jelasnya

Diakui Sumsel dan Palembang akan dijadikan teras Gerindra oleh Prabowo Subianto tentunya semua kepala dae-

muncul dan mengimbangi elektabilitas dari dua pertahanan yang akan ber-tarung di Pilkada 2024.

Dua petahana yang akan bertarung yakni Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dan mantan Wakil Walikota Palembang



rah harus diisi oleh kader Gerindra.

"Teras Gerindra itu adalah rumah Gerindra Sumsel dan Palembang akan dijadikan rumah Gerindra. Makanya Pak Prabowo meminta semua kepala daerah harus dari kader Gerindra," pungkasnya

Disisi lain nama Prima Salam tiba-tiba

Fitrianti Agustinda. Prima Salam bahkan diprediksi bisa menjadi kuda hitam di Pilkada 2024.

Bahkan tingginya elektabilitas Prima Salam membuat Ratu Dewa dan Fitri-anti Agustinda berebutan ingin mem-persunting Prima Salam untuk menjadi pasangan di Pilkada 2024 nantinya. ●

BIODATA

Nama : Prima Salam SH
Tempat Tanggal Lahir : Palembang 11-08-1986
Agama : Islam
Istri : Putri Azizah
Anak : Bae Jazzy

PENDIDIKAN

SMA Pusri Palembang 2001-2004

S1 STIH Sumpah Pemuda Palembang 2013-2017

Nama Organisasi : Partai Gerindra

PENGALAMAN ORGANISASI

Bendahara Partai Gerindra Sumsel

Ketua Partai Gerindra Palembang

RIWAYAT PEKERJAAN

Direktur Utama CGO Simapro Group

Anggota DPRD Sumsel

Slamet Sumosentono TINGGALKAN ASKOLANI, DEMI BANYUASIN MAJU

Mantan Wakil Bupati Banyuasin, Slamet Sumosentono resmi menyatakan berpisah dengan mantan Bupati Banyuasin, Askolani untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuasin 2024.

Pria yang akrab disapa PakDe Slamet ini bakal maju dalam Pemilihan Calon Bupati (Cabup) Banyuasin 2024 meninggalkan Askolani.

Majunya pria kelahiran 11 September 1950 ini sendiri tentu bukan tanpa alasan, selain panggilan dari hati nurani dan dukungan dari keluarga besar serta orang terdekat, pencalonan dirinya untuk menjadi orang nomor

satu di Kabupaten Banyuasin tentunya mendapatkan dukungan dari partai Gerindra.

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dibawah kepemimpinan dirinya sukses menghantarkan partai berlambang Burung Garuda tersebut menempati puncak teratas perolehan suara di Kabupaten Banyuasin.

Berkat keberhasilan pria yang dikenal bersahaja dan merakyat ini, yang mampu membawa Partai Gerindra mendapatkan suara tinggi di Kabupaten Banyuasin, membuat dirinya diusung dan dipercaya oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi Bupati Banyuasin pada periode 2024-2029 mendatang.

Dirinya juga bercerita pasca tidak lagi menjabat sebagai wakil Bupati Banyuasin pada 18 September 2023 lalu, kegiatan yang dijalannya adalah, berkebun dan menjadi MC (Momong Cucu).

Suami Hj. Neny Triharyani ini mengaku, selama ini kegiatan seperti itu hampir tidak pernah dilakukan karena waktu yang

terkurus dalam kegiatan untuk masyarakat.

"Nah pasca tidak menjabat ini, saya memanfaatkan waktu tersebut untuk berinteraksi dengan cucu-cucu saya, karena saat menjabat sebagai wakil Bupati kemarin banyak waktu yang tersita, namun perkiraan tersebut salah ternyata pasca tidak

menjabat sebagai wakil Bupati ternyata di bulan September-November saya dihadapkan dengan tugas yang luar biasa dari Ketua Umum (Ketum) yaitu diamatkan untuk memenangkan pemilihan Pilpres Prabowo-Gibran," jelasnya.

Dirinya mulai membuat strategi bagaimana untuk merealisasikan tugas tersebut, seperti turun ke lapangan dengan menjadi ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) dibantu dengan tim yang solid.

"Alhamdulillah atas Ridho yang Maha Kuasa dan berkat dukungan masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Banyuasin, akhirnya Prabowo-Gibran berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan kami juga bersyukur Kabupaten Banyuasin pada Pemilu Pilpres dan Pileg 2024 ini mendapat

kan Suara sebesar 71,18 persen, pada pemilu 2019 yang lalu Kabupaten Banyuasin mendapatkan suara sebesar 49 persen jauh mengalami peningkatan," terangnya.

Untuk memenangkan Prabowo-Gibran dirinya turun langsung ke 21 Kecamatan yang memiliki sebanyak 288 desa yang ada di Kabupaten Banyuasin untuk mensosialisasikan pencalonan Prabowo-Gibran.

Dari kerja keras tersebut partai Gerindra Kabupaten Banyuasin mendapatkan 8 kursi dari target awal sebelumnya 6 kursi, artinya tahun 2024 ini partai Gerindra menjadi pemimpin Legislatif di Kabupaten Banyuasin.

Serta berhasil menghantarkan perwakilan menuju Senayan satu (1) kursi dan ke DPRD Sumsel Satu (1) kursi, itu tugas kami setelah pensiun malah tambah sibuk.

"Dunia politik ini bagi kami sudah



mendarah daging karena dari tahun 1999 sudah berpolitik, karena Pilpres telah selesai dan juga mendapatkan izin dari yang Maha Kuasa, untuk wacana pada Pilkada 2024 ini kami akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin periode 2024-2029 mendatang, itu arahan langsung dari Ke-Tum Gerindra yang sekarang menjabat sebagai Presiden Indonesia,” ungkap Pak De Slamet.

Pak De Slamet saat ini masih melakukan penjajakan terkait siapa yang akan mendampingi dirinya dalam pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin mendatang dan ada beberapa nama namun masih dalam masa penjajakan.

“Ada 5 nama kandidat yang masuk dalam penjurangan, namun kami belum bisa memastikan siapa yang akan mendampingi nanti, harapannya saya menginginkan calon Wakil Bupati adalah putra daerah/Orang Sumsel,” tegasnya sambil tertawa.

Lima tahun mendampingi Bupati Askolani, Slamet mengaku terima, ikhlas dan sabar, namun pada Pilkada kali ini dirinya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati, alasannya karena rasa kecintaan dan keinginan yang tulus untuk memajukan Kabupaten Banyuasin.

Selama memimpin Banyuasin tentu

ada yang belum direalisasikan, seperti secara kelembagaan adalah SDM nya harus lebih ditingkatkan, seperti tenaga Staf Ahli dan Kepala-Kepala Dinas, karena harus di sesuaikan dengan perkembangan zaman, tentang transportasi dan jalan yang sampai saat ini belum tuntas, masih banyak daerah yang belum menikmati jalan cor beton.



“InsyaAllah jika kami diamanahkan untuk memimpin Kabupaten Banyuasin maka semua akan kami selesaikan dan infrastruktur di wilayah Banyuasin harus di benahi dalam waktu 1-2 tahun harus selesai,” tegasnya.

Banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang belum terselesaikan, makanya kami harus memiliki Pendamping yang memiliki rasa kecintaan untuk memajukan

Kabupaten Banyuasin.

Banyuasin harus sama dengan kota-kota lain seperti Prabumulih, Lahat, Lubuk Linggau yang cukup maju dalam beberapa tahun ini, Pangkalan Balai harus maju dan bagaimana membuat Pangkalan Balai menjadi Kota Transit bagi daerah yang melintasi jalur Lintas Sumatera.

“Untuk merealisasikan hal tersebut tentunya harus mempunyai rasa memiliki tadi, kami tentunya akan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produksi, memanfaatkan wilayah perairan menjadi tempat objek wisata, dan kami akan membuka peluang sebesar-besarnya kepada Investor/pihak Swasta dan akan mempermudah mereka dalam hal perizinan tentunya,” tegasnya. • IRY

BIODATA

Nama : H. Slamet Somosentono, S.H.
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, Jawa Timur/
11 September 1950
Agama : Islam
Istri : Hj. Maria Rohmina (Almh)
Hj. Neny Triharyani
Anak : 3
Joko Susilo, S.E.
Sigit Tri Harmoko, S.H.
Hartini, Amd.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Ponco, Soko, Suciharjo, Parengan, Tuban (1964)
- SMP Santo Thomas Ngawi (1967)
- SMA Negeri 1 Ngawi (1970)
- STIHSP Palembang (2015)

RIWAYAT ORGANISASI

- Ketua DPC PDI Perjuangan Musi Banyuasin (2000-2003)
- Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuasin (2003-2009)
- Ketua DPW PPRN Provinsi Sumatera Selatan (2010-2014)
- Wakil Ketua DPW Nasdem Provinsi Sumatera Selatan

(2014)

- Ikut dalam Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera (Pujasuma) di Banyuasin
- Ketua DPW Apkasindo Propinsi Sumatera Selatan (2016-2021)
- Ketua Persatuan Masyarakat Transmigrasi (Permata) Provinsi Sumatera Selatan
- Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Propinsi Sumatera Selatan
- Ketua DPC Partai Gerindra Banyuasin (2020-sampai saat ini)

RIWAYAT JABATAN

- Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (1999-2003)
- Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin (2003-2004)
- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin (2004-2009)
- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (2009-2014)
- Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Banyuasin Timur (2014)
- Wakil Bupati Banyuasin (2018-2023)

PARTAI POLITIK

- PDI-P (2000-2009)
- PPRN (2010-2014)
- Gerindra (2015-hingga saat ini).

H Harnojoyo SSos PERNAH JAJAL SEMUA PROFESI, KERNET ANGKOT HINGGA JUALAN AYAM

Setelah sempat 'menghilang', usai mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota Palembang, nama Harnojoyo kini terangkat lagi.

Ia dipinang Mawardi Yahya yang bakal maju sebagai Calon Gubernur Sumsel untuk menjadi Calon Wakil Gubernur Sumsel. Bahkan saat semua orang seperti 'mengenyampingkan' Harnojoyo lantaran ia tak lagi diusung Partai Demokrat, Mawardi Yahya tetap ingin berdampingan dengan pria yang suka berpeci hitam itu.

LALU, apa istimewanya H Harnojoyo SSos?

Pria kelahiran Desa Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumsel, tumbuh dan



besar di keluarga sederhana. Ia lahir 18 September 1967. Artinya pada tanggal 18 September mendatang, Harnojoyo berusia 57 tahun.

Kalau selama ia menjabat Walikota Palembang, gotong royong selalu ditekannya pada warga. Harno ia biasa akrab disapa, tak sungkan terjun langsung ke sungai atau kanal untuk membersihkan sampah.

Ayah tiga orang anak itu menganggap kebiasaan gotong royong telah ia rasakan sejak kecil. Makanya, saat menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Pempek, dirinya rutin mengagendakan program kerja gotong royong melibatkan Organisasi



Perangkat Daerah (OPD).

Sejak SD, Harnojoyo sering diajak gotong royong bersama neneknya dan cucu lainnya. Rutinitas Harnojoyo adalah merumput di kebun kopi milik neneknya, tanpa pernah ingin mengambil upah atau pemberian.

Menurut Harnojoyo, sikap tersebut bagian dari tanggung jawabnya untuk membantu orangtua.

Namun pasca lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanjung Sakti, ia memutuskan merantau ke Lampung, melanjutkan pendidikan di SMA YP Unila.

Setelah menjadi alumni SMA YP Unila, Harnojoyo melanjutkan pendidikan hingga tingkat universitas secara mandiri dengan segala keterbatasan ekonomi.

Harnojoyo mencari penghasilan tambahan, bekerja paruh waktu (part time) di PT Bank BALI Lampung, menjadi sopir taksi di Hotel Marcopolo, bahkan ia memanfaatkan waktu libur bekerja sebagai kernet angkot. Cari uang demi menuntaskan pendidikan dilakukannya sepenuh hati.

Harnojoyo berhasil menempuh pen-

didikan di Fakultas Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Negara di Universitas Bandar Lampung (UBL).

Kemudian saat genap berusia 27 tahun, Harnojoyo menikahi sang pujaan hati, Selviana. Pasca setahun menikah, anak pertama mereka lahir pada 1997, dia akhirnya hijrah ke Palembang, tempat kota asal Selviana.

Ketika di Palembang, Harnojoyo tetap melanjutkan pekerjaan di Bank Bali cabang Palembang. Namun ia memutuskan resign pada 1998.



Tak ingin hanya bekerja kantor, Harnojoyo memulai peruntungan baru dengan berjualan ayam. Ia mencoba berdagang di Pasar 16 Ilir Palembang. Harno memulai dari nol, yakni dari pedagang kaki lima hingga berhasil menjadi broker ayam.

Ternyata dari bisnis ayam ini membawa keberkahan bagi kehidupan Harnojoyo. Agaknya Palembang adalah kota tempat usaha dan karir politiknya menjadi berkembang.

Karir Politik

Makin sukses menjalani usaha di bisnis ayam, ia melibatkan saudara dan para sahabatnya, sampai akhirnya Harnojoyo memutuskan terjun ke dunia politik. Karier politiknya dimulai dari Partai Demokrat pada 2003, karena ia mengaku kagum dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sikap militan Harnojoyo membuatnya dipercaya untuk menjadi Ketua DPAC Partai Demokrat, Kecamatan Ilir Barat I, hingga ia pun maju sebagai calon legislatif dan akhirnya terpilih menjadi Anggota DPRD Palembang pada 2004.

Sejak 2005-2010 atau lima tahun



Harnojoyo memimpin Partai Demokrat dan ia pun menjadi anggota DPRD Palembang pada Pemilihan Legislatif 2009.

Harno menduduki kursi sebagai Ketua DPRD periode 2009-2014, lalu didapuk sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Palembang.

Pada 2013, Harnojoyo terpilih di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai Calon Wakil Wali kota dari Partai Demokrat, berpasangan

dengan almarhum Romi Herton sebagai Calon Wali kota dari Partai PDI Perjuangan. Mereka terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Periode 2013-2018.

Belum genap setahun menjadi Wakil Wali Kota Palembang, dirinya ditunjuk sebagai Plt Wali Kota Palembang. Yakni pada periode 9 Desember 2014 hingga 10 September 2015. Harno menggantikan Romi Herton yang berhalangan tetap secara konstitusi karena

terkait kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memenangkan pasangan Romi dan Harnojoyo sebagai Wali Kota Palembang 2013 lalu.

Setelah satu periode menjabat Wali Kota Palembang hingga 2018, Harnojoyo menjadi kepala daerah terpilih untuk periode selanjutnya sampai 2023, bersama pasangan Wakil Wako Palembang, Fitrianti Agustinda atau Finda.

Kemudian masa jabatan periode kedua Harnojoyo berakhir pada 20 Oktober 2023. Karirnya sebagai ketua DPC Partai Demokrat juga berakhir. Seolah tak mau berhenti dari dunia politik, Harnojoyo kala itu memilih untuk menjadi anggota DPR RI.

Bahkan di awal Mei 2023, ia sempat kedatangan wartawan sedang membuat SKCK di Polda Sumsel.

"Hari ini saya datang ke polda untuk buat SKCK sebagai syarat pencalonan caleg," kata Harno.

Setelah mengurus SKCK, Harno akan membuat surat keterangan bersih diri di Pengadilan Negeri Palembang.

Usai seluruh syarat itu dipenuhi, dirinya akan melapor ke partai tempatnya



bernaung untuk koordinasi terkait pendaftaran caleg. Harno berniat menjadi Caleg Partai Demokrat Dapil Sumsel 1 meliputi Palembang, Musi Banyuasin, Lubuklinggau, dan Musi Rawas.

Hanya saja, tanpa sebab yang jelas, namanya tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR RI. Begitupun saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) nama Harnojoyo tidak terlihat.

"Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, karena di Daftar Calon Sementara (DCS)

"Saya istirahat dulu berpolitik, saya akan kembali ke habitat untuk berkebun dan bersawah," katanya.

Namun, Minggu 10 Maret 2024, menjadi titik balik kehidupan Harnojoyo. Harnojoyo Come Back! Namanya kembali menjadi perhitungan usai ia dipilih Mawardi Yahya mendampingi sebagai calon Wakil Gubernur periode 2024-2029.

Harnojoyo mengatakan dirinya akan bersama-sama berjuang dengan Mawardi memajukan Sumsel. Ia juga meminta restu seluruh masyarakat Sumsel dalam pencalonannya bersama Mawardi.

"Saya juga ucapkan terima kasih karena Pak Syahril juga ikut berjuang bersama kami di Pilgub Sumsel nanti," tukasnya. •IRY



Saya juga ucapkan terima kasih karena Pak Syahril juga ikut berjuang bersama kami di Pilgub Sumsel nanti.

pun tidak ada," ujar Harnojoyo pada media Jumat 15 Agustus 2023. Tidak ada tuntutan ataupun kekesalan tersirat kala itu.

Entah sebab apa yang membuatnya memilih batal menjadi Caleg DPR RI. Tetapi saat itu mengaku kalau dirinya akan istirahat dari hiruk pikuk dunia politik. Dia akan kembali ke kampung halamannya di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, untuk menyalurkan kembali hobi berkebunnya.



BIODATA

Nama : H Harnojoyo S.Sos
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Sakti, 18 September 1967
Agama : Islam
Papol : Demokrat
Istri : Hj. Selviana Harnojoyo, S.Kom
Anak : 3
1. M Arnisto Boling PBM
2. Revano Magreza PB
3. Tri Ariska Mardalena

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pengusaha
- Politikus

RIWAYAT POLITIK

- Anggota DPRD Kota Palembang
- Wakil Wali Kota Palembang
- Wali Kota Palembang

ORGANISASI

1. Ketua IKA TASTI
2. Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Ilir Barat I
3. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang
4. Sekertaris Tim Kampanye SBY-JK Kota Palembang
5. Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palembang

Joncik Muhammad SI ANAK SAWAH BERHASIL MEMIMPIN TANAH KELAHIRANNYA EMPAT LAWANG

Mengetahui lebih jauh mengenai Kabupaten Empat Lawang, tidak lengkap rasanya bila kita tidak mengenali pemimpin yang berdedikasi penuh untuk kemajuan kawasan yang dikenal dengan hasil alamnya, berupa kopi yang juga didominasi oleh masyarakat suku Lintang.

Joncik Muhammad dikenal sebagai Bupati Empat Lawang yang memiliki segudang prestasi dan juga sangat identik dengan keramahannya kepada masyarakat di sana.

Lahir di Desa Sawah Kecamatan Tebing Tinggi Empat Lawang pada 4 November 1970 lalu, Joncik telah menjalani banyak perjalanan hidup sebelum akhirnya dia dipercaya untuk memimpin masyarakat di tanah kelahirannya itu.

Joncik kecil terlahir dari keluarga yang sederhana, dimana pekerjaan kedua orang tuanya yakni sebagai buruh tani.

Tidak dapat dipungkiri, masa kanak-kanak yang dia hadapi tentu penuh dengan persoalan dan keterbatasan ekonomi. Kendati demikian, Joncik dengan semangatnya yang tinggi dan berkeinginan menjadi anak sukses pada waktu itu, tidak mematahkan sedikitpun cita-cita yang dia bangun.

Bahkan Joncik yang menghabiskan waktu belajarnya di bangku Sekolah Dasar (SD) Negeri 16 Desa Sawah, juga beberapa kali menerima beasiswa karena prestasinya yang gemilang yakni pada kelas 5 dan 6.

Dimana dia saat itu begitu dikenal sebagai Joncik yang lincah, gesit dan pandai dalam berkomunikasi kepada teman-teman, guru dan orang-orang di sekitarnya.

Tidak hanya berhenti sampai di sana, dirinya bahkan bisa melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama.

tama (SMP) dengan beasiswa hingga menjadi alumni di SMP Negeri 1 Muara Pinang Empat Lawang.

Kemudian dia lanjut bersekolah di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi sebagai lulusan pertama.

Dari apa yang telah dilalui oleh orang nomor satu di Empat Lawang semasa kecil sampai remaja itu, sudah cukup membuktikan bahwa dia tidak pernah main-main dalam hal pendidikan.

Besar harapan Joncik pada saat itu untuk bisa membuat kedua orang tuanya merasa bangga dan bersyukur, meski dengan kekurangan ekonomi, akan tetapi dia tetap bisa berprestasi.

Meskipun Joncik bukan menjadi lulusan dari SMA unggulan dan ternama, namun hal itu tetap bisa kembali menghantarkannya ke perguruan tinggi. Tak tanggung-tanggung, dia berhasil lulus di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta yang menjadi kampus impian

banyak orang.

Aktivisme

Joncik Muhammad menjadi mahasiswa Geografi UGM yang turut aktif dalam keorganisasian di kampus tersebut. Dimana dia tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan rangkaian kegiatan positif yang lagi-lagi banyak mendorongnya pada gerbang prestasi lainnya.

Bahkan dia juga sering mengikuti kegiatan pengajian, kajian keislaman dan kajian keilmuan umum. Di fakultas dia diamanahkan sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas yang menjadi wadah kreatifitas internal bagi mahasiswa di kampus.

Hal ini tentu membuat dirinya banyak dikenali oleh dosen dan mahasiswa dari kampus-kampus lainnya. Saat di luar kampus dia juga didapuk sebagai Ketua Umum Cabang HMI Yogyakarta, saat itulah jiwa kepemimpinannya mulai terbentuk dan terus terasah hingga terarah dengan baik sampai hari ini.

Perjalanan Politik Joncik Si Anak Sawah

Joncik Muhammad mengawali karir politiknya pada pemilihan Legislatif di DPRD Kabupaten Lahat. Ia terpilih dua periode dan dipercaya sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lahat yaitu pada tahun 1999-2004 s/d 2004-2007.

Setelah terjadinya pemekaran wilayah, Empat Lawang berhasil memekarkan dari Kabupaten Lahat sehingga



saat pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Empat Lawang Joncik Muhammad kembali diamanahkan sebagai wakil rakyat, ia terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2007-2009 dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2009-2014.

Untuk menghilangkan rasa malu kalah dalam pemilihan bupati 2009-2014 dan 2014-2019 Joncik Muhammad dengan percaya diri maju ke DPRD Provinsi Sumsel.

Karir Politik Joncik Muhammad semakin melonjak dengan ia terpilih sebagai Ketua Komisi II di DPRD Provinsi Sumsel pada tahun 2014-2018. Menjelang Pilkada, Joncik Muhammad mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan terkait pencalonannya sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan serentak tahun 2018.

Joncik Muhammad yang pada saat itu berpasangan dengan Yulius Maulana mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang dengan berkoalisi bersama tujuh partai pendukungnya yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Lapangan Sepak Bola Talang Jawa, Kelurahan Jayaloka, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin

(8/1/2018).

Setelah deklarasi berlangsung Joncik Muhammad dan wakilnya langsung mendatangi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Kepercayaan masyarakat Empat La-



wang yang besar kepada Joncik, akhirnya berhasil menjadikan anak petani tersebut sebagai kepala daerah. Keberhasilannya itu menjadi bukti bahwa dia memiliki kedekatan dengan Jeme Empat Lawang sebagai Putra Daerah.

Joncik pun memenangi pemilihan Bupati Empat Lawang dengan memperoleh suara sebanyak 81.396 atau 60,28 %.

Ia dilantik sebagai Bupati Empat La-

wang bersama dengan keenam Kepala Daerah lainnya oleh Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin, SH pada tanggal 18 September.

Joncik Muhammad dan wakilnya sudah menyiapkan program 100 hari kerja yang berfokus pada bidang keamanan, pertanian dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Keseriusannya dalam memimpin juga telah menjadikan Kabupaten Empat Lawang yang terkenal sebagai kawasan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi menjadi daerah yang aman.

Joncik berhasil menekan angka kejahatan dengan berbagai upaya yang dia dan Yulius lakukan. Dia membuka kesempatan kerja bagi para pelaku kriminalitas, hal ini semata-mata karena dia menilai tingginya aktivitas pencurian dan tindak kekerasan lainnya karena keterbatasan ekonomi masyarakat yang kian mencekik.

Kehidupan Keluarga

Menjadi seorang pemimpin, tidak membuat dia lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah, Joncik Muhammad sendiri memiliki seorang istri bernama Hj. Hepy Safriani yang merupakan istri pernikahan kedua yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mereka dikarunia empat orang anak perempuan yang bernama Nabila Azzahra Putri, Nadila Azzahra Putri, Alisa Fidelia Putri, Alike Fidelia Putri. •IRY

BIODATA

Nama : H. Joncik Muhammad, SS, SH, MM, MH
Tempat Tanggal Lahir : Sawah, Tebing Tinggi
4 November 1970
Agama : Islam
Parpol : PAN
Istri : Hj. Hepy Safriani
Anak : 4
1. Nabila Azzahra Putri
2. Nadila Azzahra Putri
3. Alisa Fidelia Putri
4. Alike Fidelia Putri

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 16 Desa Sawah (1978-1984)
- SMP Negeri 1 Muara Pinang (1984-1987)
- SMA Negeri 1 Tebing Tinggi (1987-1990)
- S1 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1990-2000)

- S1 Universitas Palembang (UNPAL) (2006-2011)
- S2 STIE ABI Surabaya (2000-2003)
- Universitas Muhammadiyah Palembang (2014-2017)

RIWAYAT PEKERJAAN

- Asisten Dosen Fakultas Geografi UGM (1994-1996)
- Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lahat (1999-2004 s/d 2004-2007)
- Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang (2007-2009)
- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang (2009-2014)
- Ketua BAPPILU DPP Partai Amanat Nasional Periode (2010-2015)
- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumsel (2014-2018)
- Ketua Umum KAHMI Sumsel (2016-2020)
- Bupati Empat Lawang terhitung Tanggal 18 September (2018-2023)

Asmar Wijaya BEKERJA DENGAN VISI DAN MISI JELAS

Di tengah hiruk pikuk politik dan roda pemerintahan yang berputar, sosok Asmar Wijaya hadir sebagai nakhoda baru Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Dilantik pada 15 Januari 2024 sebagai Penjabat Bupati (Pj) OKI, Asmar Wijaya membawa misi mulia untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten OKI.

Lahir di Belitang, OKU Timur, 17 Juli 1967, Asmar Wijaya menapaki karir di dunia birokrasi di usia 32 tahun. Kecintaannya pada masyarakat dan rasa ingin mengabdikan mengantarkannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ilir.

Perjalanan karirnya terbentang luas, mengantarkannya pada berbagai posisi strategis di berbagai instansi pemerintahan. Jiwa kepemimpinannya mulai terasah sejak tahun 1999 ketika dirinya dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Subseksi Tata Penyuluhan di Dinas Pertanian Kabupaten OKI.

Dedikasi dan kegigihannya dalam bekerja mengantarkannya pada berbagai posisi penting di pemerintahan, seperti Kepala Seksi Produksi Benih Padi dan Palawija (2001), Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan (2008), Kepala Dinas Peternakan (2010), dan Kepala Dinas Pertanian (2011).

Kemampuannya dalam mengelola birokrasi semakin terasah ketika ia ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perkebunan (2014) dan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (2016). Puncaknya, pada tahun 2019, Ir. Asmar Wijaya dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kegigihan dan dedikasinya mengantarkannya pada puncak karirnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten OKI sebelum ditugaskan sebagai Pj Bupati OKI.

Memimpin dengan Visi dan Misi Jelas

Menjadi pemimpin baru di tengah masyarakat yang heterogen bukanlah perkara mudah. Namun, Asmar Wijaya tidak gentar. Ia datang dengan visi dan misi yang jelas untuk membawa OKI ke arah yang lebih baik.

Setelah dilantik, Asmar mengatakan akan melakukan langkah-langkah yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat diantaranya, penyelenggaraan pemilu, menjaga pengendalian inflasi, menjaga ketahanan pangan, menurunkan angka kemiskinan dan gizi buruk, serta keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

"Segera melakukan langkah-langkah yang menjadi program prioritas dari pusat, seperti halnya pengentasan masalah kemiskinan, stunting, pengangguran dan kesuksesan pemilu 2024," kata As-



mar usai dilantik pada 15 Januari 2024 lalu.

Ayah dari Muhammad Rafli ini juga bertekad akan semaksimal mungkin menuntaskan target dan sasaran serta Prioritas Bupati dan Wakil Bupati OKI 2019-2024.

Visi dan misi yang cemerlang tidak cukup tanpa aksi nyata. Asmar Wijaya bergerak cepat, menerjemahkan visi

OKI di tengah gejolak ekonomi global.

Adapun upaya untuk mengoptimalkan distribusi bahan pokok yang dilaksanakan oleh suami dari Sukmawati Asmar SE ini adalah dengan melakukan operasi pasar murah, program Perjaka (Perusahaan Jaga Keterjangkauan Harga), dan program Bismillah (Baznas Isi Sembako Melalui Amal Ibadah) untuk menjaga keterjangkauan harga ba-

Perjaka, tanam cabe serentak (Balap Becak), Bismillah oleh Baznas, Operasi Pasar, Kerjasama Daerah, serta toko TIPD yang menyediakan pangan murah terjangkau," terang Asmar dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Sumatera Selatan.

Sementara di bidang ketahanan



dan misinya ke dalam program kerja yang terarah dan terukur.

Beberapa program prioritas Pj Bupati Asmar Wijaya tergambar jelas dalam tiga pilar utama: Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan, dan Penanggulangan Kemiskinan dan Malnutrisi.

Dalam hal pengendalian inflasi, Asmar bertekad menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat

han pokok.

Guna memaksimalkan produksi lokal Asmar mendukung program Gerakan BALAP BECAK (Bantuan Langsung Percepatan BerTanam Cabe Serentak) dan Gerakan CAMAT PKK (Cabe Tomat PKK) untuk meningkatkan produksi lokal.

"Kita memiliki beberapa inovasi seperti pasar murah melalui program

pangan dirinya menekankan untuk meningkatkan produksi pertanian dan memastikan kecukupan pangan bagi seluruh penduduk OKI.

Sementara di bidang infrastruktur, Asmar Wijaya bersama PT Utama Karya dan perusahaan perkebunan di Kabupaten OKI memaksimalkan pemanfaatan limbah jalan berupa bongkaran beton, dan juga aspal ex scrap atau

BIODATA

Nama Ir Asmar Wijaya MSI
Lahir Belitang, OKU Timur, 17 Juli 1967
Istri Sukmawati Asmar SE
Putra Muhammad Rafli

PENDIDIKAN

- SD Negeri 118 Palembang
- SMP Negeri 15 Palembang
- SMA Negeri 4 Palembang
- Meraih gelar Sarjana (S1) di Universitas Tridianti Palembang dan meraih gelas Magister Pasca Sarjana (S2) di Universitas Sriwijaya

KARIR

- Kepala Subseksi Tata Penyuluhan di Dinas Pertanian OKI tahun 1999

- Kepala Seksi Produksi Benih Padi dan Palawija tahun 2001
- Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan tahun 2008
- Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2010
- Kepala Dinas Pertanian tahun 2011
- Kepala Dinas Perkebunan tahun 2014
- Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) OKI tahun 2016
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman OKI tahun 2019
- Sekretaris Daerah OKI tahun 2023
- Penjabat Bupati OKI 15 Januari 2024.

• INFO PROFIL

hasil pemeliharaan jalan aspal, untuk dimanfaatkan kembali dalam rangka perbaikan jalan rusak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemda dan Perusahaan di OKI untuk menjalankan Environment, Social & Governance (ESG) demi terwujudnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” ujar Asmar Wijaya.

Bongkaran aspal atau ex scrap berasal dari limbah hasil pemeliharaan jalan tol Terbangi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung pada KM 269 B dan 253 B yang dihasilkan dari proses pengerukan aspal menggunakan alat cold milling.

Di era kepemimpinan Asmar Wijaya pula Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapat raihan penghargaan Predikat Zona Hijau. Penghargaan ini merupakan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Dan dalam hal Penanggulangan Kemiskinan dan Malnutrisi dirinya menerapkan program terarah dan tepat sasaran untuk memerangi kemiskinan dan malnutrisi di OKI. Salah satu hal yang terus berupaya dilakukan oleh Pemkab OKI adalah mengatasi persoalan stunting dengan mengusung program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

gan berbagai potensi dan tantangan bukanlah hal yang mudah. Asmar Wijaya sadar betul bahwa ia dihadapkan pada berbagai rintangan, mulai dari infrastruktur yang belum memadai, hingga kesenjangan ekonomi yang masih lebar.

Namun, ia tak gentar. Dengan optimisme dan kegigihan, ia yakin bahwa semua rintangan dapat diatasi dengan kerja sama dan sinergi dari semua pihak.

Salah satu yang menjadi kebanggaan, di era Asmar Wijaya, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) meraih penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 Atas Capa-



Dorong Penggunaan Produk Lokal, Pemkab OKI Diganjar Penghargaan P3DN

Asmar Wijaya juga meminta percepatan program prioritas pemda kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten OKI. Salah satu program prioritas tersebut perbaikan infrastruktur untuk daya dukung ekonomi.

“Agar diakselerasi program-program prioritas seperti perbaikan jalan karena efeknya dominan untuk mendorong perekonomian masyarakat,” Jelas Asmar pada Rakor OPD, akhir Januari lalu.

Salah satu perbaikan jalan yang jadi prioritas Pemkab OKI yaitu ruas jalan Cengal-Sungai Jeruju Kecamatan Cengal.

Program ini merupakan tindak lanjut program BAAS yang telah di launching tahun 2023 lalu dengan menyasar sebanyak 293 bayi di bawah usia dua tahun (Baduta).

Asmar Wijaya menyatakan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting ini fokus pada komitmen berkelanjutan dari para pemangku kepentingan dan stakeholder dalam memberikan dan menyalurkan bantuan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap gizi anak asuhnya.

Menjembatani Tantangan dan Harapan

Menjadi pemimpin di daerah den-

gian Belanja Produk Dalam Negeri di Tahun Anggaran 2023.

Penghargaan ini diberikan karena Pemkab OKI dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja pemerintah daerah.

Hebatnya lagi, untuk kategori Pemerintah Daerah, penghargaan hanya diberikan kepada 6 entitas Pemda antara lain, kategori provinsi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung sementara kabupaten/kota diraih Kabupaten OKI, Takalar dan

Lambata.

"Berkat dukungan dari seluruh OPD untuk menyukseskan program P3DN. Kami terus berkomitmen meningkatkan serapan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah sehingga dapat menopang ketahanan ekonomi daerah dan nasional," Ucap Penjabat Bupati OKI, Ir. Asmar Wijaya, M. Si usai Acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024, di The Meru Sanur Hotel, Bali, Maret lalu.

Harapan untuk OKI

Sejak dilantik sebagai Penjabat Bupati (Pj) Ogan Komering Ilir (OKI) pada 15 Januari 2024, Asmar Wijaya telah menunjukkan komitmennya untuk membawa kabupaten ini menuju masa depan yang lebih sejahtera. Dengan pengalamannya yang panjang di birokrasi dan dedikasi yang tinggi, Asmar Wijaya membawa harapan baru bagi masyarakat OKI.

Salah satu fokus utama Asmar Wijaya adalah meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat OKI. Ia bertekad untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan produksi lokal, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas utama Asmar Wijaya. Ia ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat OKI memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Selain itu, ia juga ingin memberantas kemiskinan melalui program-program yang terarah dan tepat sasaran.

Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan sinergi dari semua pihak, visi ini dapat diwujudkan. Kepemimpinan Asmar Wijaya yang kuat dan fokusnya pada program-program prioritas diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi OKI dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Asmar Wijaya tidak hanya pemimpin, tetapi juga motivator dan inspirator bagi masyarakat OKI. Ia selalu menginspirasi masyarakat agar bersatu padu dan bekerja sama untuk membangun

OKI yang lebih baik.

Asmar Wijaya menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun OKI. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas dan keamanan di wilayah OKI agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, ia juga mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi

memiliki potensi yang besar untuk membangun OKI dan bangsa Indonesia menjadi lebih baik," ujarnya.

Pesan semangat dan harapan Asmar Wijaya untuk masyarakat dan generasi muda OKI mencerminkan komitmennya untuk membawa kabupaten ini menuju masa depan yang lebih cerah. Kepemimpinan yang kuat dan fokus-



Pj. Bupati OKI Jadi Bapak Asuh Anak Stunting



Pj. Bupati OKI Jadi Bapak Asuh Anak Stunting

dalam program-program pemerintah dan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan OKI.

Di hadapan para generasi muda OKI, Asmar Wijaya menyampaikan harapannya agar mereka dapat menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Ia juga menekankan pentingnya moral dan karakter bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. "Saya yakin bahwa generasi muda OKI me-

ya pada kemajuan OKI diharapkan dapat menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam membangun OKI yang maju dan sejahtera.

Di balik kesibukannya sebagai pemimpin, Asmar Wijaya tetaplah sosok yang humanis dan sederhana. Ia selalu menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan solusi. • IRY

Apriyadi Mahmud

FOKUS ABDIKAN DIRI UNTUK TANAH KELAHIRAN MUBA

Birokrat Sumatera Selatan (Sumsel) Apriyadi Mahmud memiliki rasa cinta yang besar kepada Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Pasalnya sebagian besar umurnya dihabiskan mengabdikan kepada tanah kelahirannya demi masyarakat Muba.

Selama karirnya pria kelahiran Musi Banyuasin 6 November 1967 ini, banyak menghabiskan waktunya untuk tempat kelahirannya Muba. Karena dari rentetan karirnya yang meningkat pesat Muba menjadi tempat terbanyak jabatan yang diterimanya.

Apriyadi mengawali karir menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Palas, Banyuasin I pada tahun 1992. Namun pada tahun 2000, beliau diangkat sebagai Kepala Bagian Kesra dan Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin,

menjalankan kinerja birokrat.

Kemudian pada tahun 2015, Apriyadi diangkat sebagai Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sampai tahun 2016.

Pada tahun 2017 beliau kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, seiring waktu pula di tahun 2022, Apriyadi kembali dipercaya menjabat sebagai Penjabat Bupati Musi Banyuasin sampai dengan saat ini.

Saat itu Gubernur Sumsel H Herman Deru secara resmi melakukan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan kepada Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Muba, Rabu (29/3/2023) di Griya Agung.

Pelantikan ini merujuk kepada Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 1765/KPTS/BKD.

11/2023

Tanggal 28
Maret

2023 Tentang Perpanjangan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Setelah itu Pj Gubernur Sumsel Dr Agus Fatoni melantik Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel

Sandi Fahlevi menjabat sebagai Pj Bupati Muba menggantikan Apriyadi Mahmud, Senin

(22/4/2024)
di Ruang Joglo
Griya Agung
Palem-



Saat menjadi Pj Bupati masih terikat aturan, etikanya harus mundur jika ingin mencalonkan diri.

hingga tahun 2009.

Apriyadi juga sempat menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2010.

Lalu kemudian diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, namun pada tahun 2012 karir Apriyadi meningkat pesat seiring berjalannya waktu.

Dirinya dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Karena kinerja yang sangat baik dalam



bang. Hal ini merujuk pada Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor: 100.2.1.3-969/2024.

Kepercayaan kepadanya Pj Bupati Muba Sandi Fahlevi kembali menarik Apriyadi Mahmud kembali menjadi Sekda Muba yang di mana sebelumnya menjabat Pj Bupati Muba 2022-2024.

Rasa cinta kepada kampung halamannya di-kabarkan Apriyadi akan maju sebagai calon Bupati Muba di Pilkada 2024 nanti. Dia memastikan diri maju di Pilkada Muba. Komunikasi dengan sejumlah partai politik (Parpol) sudah dilakukan. Apriyadi juga akan ikut mekanisme partai dengan mendaftar di Parpol.

"Bismillah InsyaAllah karena ada beberapa partai buka pendaftaran, mulai besok (Selasa) akan komunikasi dengan Parpol dan mengambil formulir pendaftaran di partai menjadi bakal calon Bupati Muba," ujar Apriyadi usai pelantikan Pj Bupati Muba yang baru di Griya Agung, Senin (22/4/2024).

Ia menyebut, setidaknya sudah 4 partai yang mengajaknya untuk maju di Pilkada Muba. Namun, ia menyebut belum bisa memastikan karena pada saat ditawari masih menjadi Pj Bupati Muba.

"Saat menjadi Pj Bupati masih teri-

kat aturan, etikanya harus mundur jika ingin mencalonkan diri. Nah, setelah tidak menjabat Pj, sehingga saya terpanggil melanjutkan pengabdian sebagai salah satu bakal calon Bupati Muba," jelasnya.

Perihal dirinya akan maju sebagai bakal calon tersebut, statusnya sebagai PNS akan selesai ketika KPU sudah menetapkan para calon

bupati. Hal itu sesuai PKPU 9/2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU 3/2017 di mana dalam aturan tercantum di Pasal 4 ayat 1 mengenai PNS wajib menyatakan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon.

"Ketika KPU sudah menetapkan saya sesuai tahapan Pilkada di September nanti, artinya saya akan mundur pada bulan itu. Untuk wakil, saya akan salat Istikharah dulu. Bak pengantin, kita harus mencari yang cocok dan bisa memajukan Muba,"pungkasnya.●IRY



BIODATA

Nama : Apriyadi Mahmud
TTL : Lawang Wetan Banyuasin, 6 November 1967
Istri : Asna Aini
Anak : 4 Anak

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Madrasah Ibtidaiyah Palembang (1974-1980)
- Madrasah Tsanawiyah Palembang (1980-1986)
- SMA Negeri 3 Palembang (1986-1989)
- S1 STISIPOL Candradimuka (1989-1992)
- S2 Universitas Satyagama

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kepala Desa Pematang Palas, Kecamatan Banyuasin I
- Kasi Pemerintahan Kecamatan Banyuasin I
- Kepala Sub Bagian Produksi Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

- Kepala Bagian Ekonomi dan Kesra Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
- Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- Penjabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin
- Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin



KANDIDAT CALON GUBERNUR NTT CURI PERHATIAN PUBLIK

Sejumlah nama Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024 mulai menjadi perbincangan hangat publik.

Dari sekian nama yang mencuat, beberapa di antaranya dinilai memiliki elektabilitas tinggi atau dianggap paling kuat.

Bahkan, beberapa daerah sudah melakukan deklarasi dukungan kepada bakal calon Gubernur NTT 2024 yang akan berlaga dalam Pilkada mendatang.

Salah satunya adalah Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si yang merupakan anggota DPR RI dari partai PDI Perjuangan yang duduk di Komisi IV.

Pria kelahiran 27 Maret 1976 dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap isu lingkungan hidup.

Ia me-

mandang kejahatan lingkungan sebagai bentuk terorisme (eco-terrorism).

Lema, yang akrab disapa Ansy Lema, dianggap sebagai salah satu calon gubernur paling kuat dalam Pilkada NTT 2024. Ia telah mendapat dukungan dari kalangan milenial, termasuk deklarasi dukungan dari Kabupaten Ngada yang disampaikan oleh Ketua Relawan Ansy Lema, Yohanes Gore.

Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Relawan Ansy Lema Kabupaten Ngada Yohanes Gore yang berlangsung di Cafe Lekosoro, Kelurahan Lebijaga, Kabupaten Ngada pada 21 April 2024 yang juga diunggah di laman Facebook Asni Lema.

Sebagai milenial dan Gen Z yang sering mengakses informasi dari platform media, mereka memiliki bank data informasi tentang rekan jejak setiap figur yang akan maju dalam ajang Pilkada NTT 2024. Ansy Lema adalah satu yang terbaik dari banyak nama yang beredar.

Dukungan terhadap Ansy Lema dari akar rumput terus menguat seiring krisis kepemimpinan di Provinsi NTT dalam lima tahun terakhir.

Jaringan Milenial dari 4 kota telah mendeklarasikan dukungan kepada Ansy Lema untuk maju Cagub NTT 2024-2029.

Antara lain dari Kota Kupang, Maumere, Belu dan Ende. Milenial, sebagai pemilih terbanyak di Pilgub NTT 2024 (32%), meyakini bahwa Ansy Lema adalah sosok yang tepat untuk melakukan transformasi pembangunan pasca kepemimpinan Viktor Laiskodat.

Selain mendapat banyak dukungan dari rakyat NTT untuk maju sebagai calon Gubernur NTT 2024, Ansy Lema memiliki jumlah kekayaan senilai Rp.6.694.811.030, berdasarkan



data laporan LHKPN 2023.

Sosok lain yang digadang-gadang kuat sebagai kandidat Cagub NTT 2024 adalah Irjen. Pol. (Purn.) Johanis Asadoma, S.I.K., M.Hum. Mantan Kapolda NTT ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon Gubernur NTT 2024 dari Partai Gerindra.

Asadoma berharap mendapat dukungan penuh dari Partai Gerindra dan memilih partai tersebut karena sejalan dengan prinsipnya sebagai mantan perwira tinggi Polri. Selain itu, ia juga akan menjajaki dukungan dari beberapa partai lain.

Selain Partai Gerindra, dia juga akan menjajaki beberapa partai lain yang akan digunakan sebagai kendaraan politik untuk mengusungnya sebagai calon gubernur NTT. Namun dia enggan menyebutkan partai lain yang sedang dijajaki untuk dimintai dukungan. Mantan Kapolda NTT ini juga dinilai memiliki elektabilitas kuat untuk maju sebagai salah satu calon Gubernur NTT 2024.



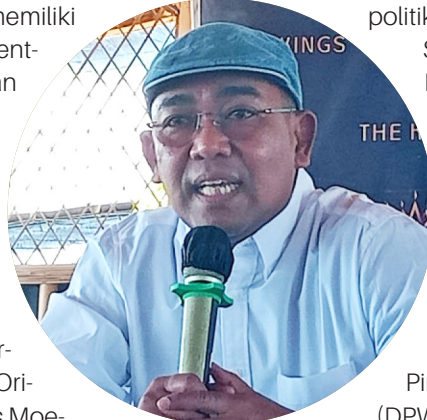
Selanjutnya ada sosok Orias Petrus Moedak yang merupakan bendahara TPN Ganjar Mahfud, sedang gencar mempromosikan dirinya sebagai calon Gubernur NTT 2024.

Sebelumnya, Moedak pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT In-

alum dan memiliki sejumlah posisi penting lainnya. Dengan visi "NTT Sukses" dan misi "NTT Sejahtera", Moedak menjadi salah satu calon Gubernur yang diperhitungkan di NTT.

Baliho bergambar Orias Petrus Moedak bahkan sudah terpasang di beberapa daerah di NTT. Visi dan Misi Orias Petrus Moedak bakal calon Gubernur NTT 2024 ini terbilang sederhana. Visi "NTT Sukses", Misi "NTT Sejahtera".

Orias juga merupakan mantan wakil presiden Direktur Freeport Indonesia. Orias



Moedak berhasil mengambil saham Emas Freeport 50 % dari AS untuk Indonesia.

Nama lain adalah Fransiskus Roberto Diogo. Mantan Bupati Sikka ini, yang akrab disapa Robi Idong, akan maju dalam Pilkada sebagai calon Gubernur NTT 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia hadir dengan tagline @jangan mencuri untuk NTT sejahtera. Diogo juga dianggap sebagai calon yang cukup kuat dalam kontestasi politik tersebut.

Sedangkan, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengusung Julie Sutrisno Laiskodat di Pilgub NTT 2024. Pengumuman ini disampaikan di momen pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem di NTT, Minggu (5/5/2024).

"Di momentum ini, kami menugaskan kakak Julie Sutrisno Laiskodat maju sebagai Bakal Calon Gubernur NTT 2024-2029," ujar Ketua DPW Partai NasDem NTT Edistasius Endi.

Julie Sutrisno Laiskodat dengan tegas mengatakan bahwa dia siap menjalankan perintah itu, apabila partai menugaskan dirinya untuk maju sebagai bakal calon Gubernur NTT 2024.

"Saya dengan ini mendaftar untuk maju calon Gubernur NTT periode 2024-2029. Mohon doa dan dukungannya," kata Julie Sutrisno Laiskodat disambut tepuk tangan seluruh kader dan simpatisan.

Bahkan Julie Laiskodat bersama Sekjen DPP Partai Nasden, Hermawi D Taslim akan kembali ke Jakarta untuk melaporkan kepada Ketua Umum, bahwa telah mendaftarkan diri di Partai Nasdem.

"Saya melaporkan juga kepada suami saya Pak Viktor Bungtilu Laiskodat, bahwa telah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur NTT," tutup Julie Sutrisno Laiskodat. •IRY



MENGEJAR KETERTINGGALAN, PEMBANGUNAN KALTENG HARUS MERATA

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan tengah (Kalteng) 2024 mencuatkan nama-nama kandidat kuat dengan elektabilitas yang tidak diragukan.

Nadalsyah telah memastikan pencalonannya sebagai Gubernur Kalteng pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.

Selaku Ketua Umum Partai Demokrat Kalteng, H. Nadalsyah menegaskan, surat penugasan resmi DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepadanya sebagai Pengurus Daerah (DPD Partai Demokrat Kalteng) secara tegas menyikapi keresahan masyarakat, keraguan mengenai pencalonan gubernurnya.

Ia mengklarifikasi, ada spekulasi mengenai pencalonannya tahun lalu, namun tidak menjadi kenyataan.

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dengan surat penugasan resmi dari DPP Partai Demokrat, saya (H. Nadalsyah) mengukuhkan pencalonan saya sebagai Gubernur Kalteng," ujar Nadalsyah, beberapa waktu lalu.

Mantan Bupati Barito Utara yang menjabat Ketua DPD Demokrat Kalteng itu bahkan sudah bergelut dengan mendaftarkan diri ke beberapa partai.

Nadalsyah merupakan kandidat kuat yang akan diusung Demokrat. Namun, syarat pencalonan yang mengharuskan partainya berkoalisi, membuatnya berkeliling mengikuti penjangkaran yang dilakukan secara terbuka oleh partai politik.

"Mendaftar ke partai lain sebagai jawaban konkret pencalonan dalam pemilihan gubernur Kalteng. Saya mendaftar di PDIP, Nasdem, dan PKB. Nanti juga akan mendaftar ke partai lain," ujarnya.

Lebih lanjut Nadalsyah menegaskan,

kan, pembahasan mengenai calon Wakil Gubernur Kalteng belum terjadi, dan belum ada informasi siapa yang akan dicalonkan untuk mendampingi.

Ia menyampaikan niatnya untuk mengevaluasi situasi politik di Kalteng pascapemilu Presiden dan Legislatif.

Terkait pemilihan calon wakil gubernur, Nadalsyah mengutarakan keinginan adanya kemitraan yang kolaboratif dan sinergis yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah yang dikenal dengan Bumi Tambun Bungai, sebutan lain Kalteng.

"Kami mencari sosok yang bisa bekerjasama dan berkolaborasi antara calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak saling bersaing dan sebagainya. Kami mencari wakil yang bisa memotivasi, memberi masukan atas kekurangan-kekurangan Gubernur," jelasnya.

Niat Nadalsyah untuk maju Cagub Kalteng bukan untuk Cawagub.

"Saya tidak memiliki niatan untuk menjadi bakal calon wakil gubernur, melainkan bakal calon gubernur. Jika tidak mampu menjadi bakal calon gubernur, saya lebih memilih untuk mengelola perusahaan. Jangan memberikan dukungan kepada saya sebagai bakal calon wakil gubernur," ucap Nadalsyah.

Bupati Barito Utara ini mengakui bahwa dirinya terus melakukan sosialisasi, termasuk di Kotawaringin Timur.

Selain karena kabupaten ini memiliki jumlah pemilih terbesar di Kalteng, Nadalsyah merasa Kotawaringin Timur sebagai rumah kedua baginya, terutama karena diterima dengan baik oleh masyarakat.

Pada tahun 2019, ia pernah melakukan sosialisasi, namun pada saat itu, niatnya untuk ikut dalam Pilkada dibatalkan.

Beberapa alasan yang dia kemukakan termasuk baru satu tahun menjabat sebagai bupati, belum adanya persetujuan dari tokoh-tokoh



masyarakat, dan keluarganya yang meminta untuk menyelesaikan tugas di daerah.

"Tidak ada alasan untuk membatalkan pada pemilu 2024. Mohon doa semoga saya diberikan umur panjang dan kesehatan. Inshaallah, saya siap maju dan berkontribusi untuk menciptakan sejarah kemajuan di Kalteng," ujar Nadalsyah.

Nadalsyah menyatakan bahwa ia telah menyiapkan langkah-langkah politik untuk bersaing dalam Pemilihan Gubernur 2024. Salah satu langkah tersebut adalah maju sebagai calon anggota DPR RI dari Kalteng sebelumnya.

Dia menambahkan bahwa setiap bakal calon gubernur pasti memiliki visi dan misi. Menurutnya, Kalimantan Ten-

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalteng, Junaidi menyatakan kesiapan dan optimisme mereka menghadapi pesta demokrasi pada 14 Februari 2024, serta pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang.

Dalam rangka menjalankan mandat DPP untuk persiapan majunya Ketua Partai Demokrat Kalteng, Nadalsyah sebagai bakal calon gubernur Kalteng

masyarakat, partai politik, dan pihak terkait untuk bersatu dan bekerja keras," ujarnya.

Junaidi juga menekankan perlunya doa restu dari DPD Partai Demokrat Kalteng serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang agar Nadalsyah dapat terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Kalteng, serta dirinya sendiri sebagai Calon Anggota DPRD



Tidak boleh ada ketidaksetaraan pembangunan di Kalteng. Jika saya terpilih sebagai gubernur.

gah harus mengejar ketertinggalan dari daerah lain dengan menetapkan target dan sistem pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, olahraga, dan lainnya.

Nadalsyah menekankan bahwa pembangunan di Kalteng harus merata, dan pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan semua pemerintah kabupaten dan kota, mengingat bupati dan wali kota lebih memahami kondisi di daerah masing-masing.

"Tidak boleh ada ketidaksetaraan pembangunan di Kalteng. Jika saya terpilih sebagai gubernur, saya tidak akan hanya fokus membangun daerah asal saya di Barito. Semua daerah akan mendapatkan pembangunan yang merata," tambah Nadalsyah.

pada tahun 2024, Junaidi mengajak seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat Kalteng untuk bersiap-siap bersama dalam perjuangan memajukan daerah tersebut.

"Kami siap menjaga dan mendukung Nadalsyah untuk maju sebagai bakal calon gubernur Kalteng. Tentu, kami berharap kerjasama seluruh lapisan

Provinsi Kalteng dari daerah pemilihan Kalteng I.

"Kami juga mengajak semua calon legislatif Partai Demokrat di daerah pemilihan Kalimantan Tengah II, Kalimantan Tengah III, Kalimantan Tengah IV, dan V, baik yang sedang menjabat maupun calon baru, bersatu dalam perjuangan ini," tegasnya. •IRY

MAWARDI YAHYA LEBIH COCOK BERSAMA ANITA NOERINGHATI

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 kini masih menyita perhatian, Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) terus mencari jati diri. Muncul tiga nama yang diprediksi bakal maju, yaki Herman Deru, Mawardi Yahya dan Heri Amalindo.

Pengamat politik Sumsel, Haekal Al Haffafah menjelaskan dinamika politik di Sumsel masih menunggu kesempatan, apapun potret konstelasi di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) akan kembali kepada keputusan DPP setiap partai politik.

"Semua keputusan ada pada DPP masing-masing Parpol, karena ada faktor lain diluar elektabilitas, popularitas, dinamika hingga simulasi pasangan. Kini setiap kandidat masih ikhtiar komunikasi dan mencari kecocokan, diluar itu masih membutuhkan hasil dari negosiasi elit," jelasnya.

Dijelaskan Haekal, hingga saat ini hasil Pilpres 2024 belum ada kejelasan termasuk partai yang akan masuk dalam kabinet, termasuk susunan kementerian.

"Komposisi akan berdampak pada elektoral di Pilgub Sumsel, perlu di catat dinamika lokal hanya satu faktor, lebih berkepentingan terhadap sumsel adalah DPP, partai pemenang, untuk menjaga basis di Pemilu selanjutnya," jelas dia.

Mengingat Sumsel adalah tiga provinsi terbesar dengan populasi pemilih terbesar, sehingga untuk memenangkan kepala daerah dalam Pilkada diperlukan strategi yang kuat.

Meski dilihat bahwa sudah adanya deklarasi Mawardi Yahya-Harnojoyo sebagai pasangan Cagub dan Cawagub Sumsel, tidak menutup kemungkinan nama Anita Noeringhati yang merupakan Kader Partai Golkar akan masuk sebagai kontestasi.

"Pasalnya, hingga saat ini Harnojoyo belum juga mendapat dukungan dari Partai Demokrat, bahkan muncul nama Cik Ujang yang juga kader Demokrat menjadi pasangan Herman Deru sebagai Cawagub," tegasnya.

Sehingga sangat rasional jika, muncul nama ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati menggantikan Harnojoyo sebagai Cawagub Sumsel bersandingan dengan Mawardi Yahya.

Sekadar mengingatkan bahwa Partai Golkar dalam perjalanan sejarah

dua pasangan Cagub dan Cawagub Sumsel. Peluang untuk basis elektoral pemilih lebih memungkinkan, karena Mawardi Yahya sebagai tim pemenang Prabowo-Gibran, residu Pilpres 2024 masih tajam.

Diketahui, Anita Noeringhati adalah sosok perempuan yang bisa memainkan isu gender dengan latar belakang Jawa, basis Jawa bisa di penetrasi dengan hadirnya Anita.

Bisa dikatakan, hingga saat ini lawan kuat Herman Deru sebagai petahana Cagub Sumsel adalah Mawardi Yahya dengan banyak basis suara.

Sedangkan kandidat Cagub lain yakni Heri Amalindo juga sudah memantapkan diri untuk maju dalam Pilgub Sumsel, hanya saja Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ini masih



pernah dua kali memimpin Sumsel, meski Dodi Reza Alex Noerdin kalah dengan Herman Deru.

"Hanya satu periode absen, maka lebih mudah bagi Golkar menerima Mawardi Yahya, terlebih dipusat Golkar menjadi salah satu partai politik pengusung Prabowo-Gibran, komunikasi dan negosiasi lobi nasional lebih mudah antara Golkar dan Gerindra," ungkapnya.

Keberadaan Mawardi-Anita atau Matahati ini akan berhadapan dengan



belum menunjukkan gerakan yang signifikan.

"Heri Amalindo juga memiliki banyak basis suara, terlebih dirinya akan melanjutkan program Alex Noerdin yang sukses saat menjadi Gubernur Sumsel," sambungnya.

Mawardi Yahya benar-benar resmi melepas Harnojoyo setelah foto dirinya tersebar meminta restu Airlangga Hartarto untuk mempersunting Anita Noeringhati sebagai Calon Wakil Gubernur Sumsel di Pilgub Sumsel 2024.

Foto itu diunggah oleh mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya di insta story instagram miliknya akun @mawardiyahya1958_offc dilihat infoindonesia pada Selasa (14/5/2024).

Di foto itu Mawardi Yahya bersama Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada ditengah yang mengapit



Pasalnya, hingga saat ini Harnojoyo belum juga mendapat dukungan dari Partai Demokrat, bahkan muncul nama Cik Ujang yang juga kader Demokrat menjadi pasangan Herman Deru sebagai Cawagub.

dirinya dan Anita Noeringhati Ketua Harian Golkar Sumsel juga menjabat Ketua DPRD Sumsel.

Selanjutnya Anita Noeringhati tidak mau kalah ikut memposting foto serupa di insta story instagram miliknya akun @ra_anita63 dengan diberikan tulisan olehnya alhamdulillah.

“Melihat postingan insta story instagram keduanya jelas sudah mendapatkan restu dari Ketua Golkar Airlangga Hartarto. Mawardi Yahya resmi maju mengganti pasangannya Harnojoyo awalnya sudah di deklarasikannya,”kata Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar. Bagindo Togar menyebutkan sosok

lain. Kalau Harnojoyo tidak cukup suara dan levelnya kalah dari Anita yang berada di level Provinsi sebagai Ketua DPRD Sumsel. Belum lagi faktor gender juga bisa menarik simpati masyarakat Sumsel. Jadi wajar kalau Mawardi Yahya pindah ke lain hati dibandingkan bertahan dengan Harnojoyo levelnya hanya Kota se-



Harnojoyo tidak sesuai harapan dari Mawardi Yahya terlebih dari partai tidak mencukupi suara. Sedangkan Anita Noeringhati memiliki partai yang suaranya sudah pas untuk melenggangkan dirinya menjadi kontestan di Pilgub Sumsel 2024.

“Gerindra punya suara 11 dan Golkar punya suara 12 dua partai ini saja sudah cukup untuk mencalonkan diri Mawardi Yahya tidak sudah lagi mencari dukungan

bagai mantan Walikota Palembang saja,”paparnya.

Disisi lain Bagindo Togar tegas menyebutkan selama dua periode tidak ada pembangunan Kota Palembang sudah dibuat olehnya.

Semua kemajuan Kota Palembang disebutkan dibuat oleh mantan Gubernur Sumsel terdahulu Alex Noerdin dan pembangunan jalan Tol program pemerintah pusat dari Presiden Joko Widodo. •IRY



FENOMENA SAKIT JIWA DI PILWAKO PALEMBANG 2024

Jika dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) penuh dengan euforia, berbeda dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Palembang 2024 yang disebut dengan fenomena sakit jiwa.

Munculnya fenomena sakit jiwa di Pilwako Palembang tahun 2024 efek dari euforia berlebihan dari para calon kontestan yang terus bermunculan memasang baliho Calon Wali Kota Palembang.

Bahkan ajang klaim telah diusung oleh partai tertentu tidak gentar dilakukan kontestan-kontestan bahkan tidak dikenal oleh masyarakat tersebut.

Aksi itu juga dilakukan tidak hanya di spanduk dan baliho, mereka turut mempublikasikannya di media sosial (medsos) baik Instagram, Twitter hingga TikTok.

Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel) Bagindo Togar Butar Butar mengungkapkan, Pilwako Palembang tahun ini benar-benar fenomena sakit jiwa, bahkan akan banyak nama baru bermunculan.

"Pilwako Palembang di tahun 2024 benar-benar fenomena sakit jiwa. Saya yakin nanti kedepannya akan terus banyak lagi nama-nama yang bermunculan pasang baliho dan spanduk mengklaim diusung oleh partai," kata Bagindo Togar.

Bagindo menyebutkan fenomena sakit jiwa yang disebutkan olehnya itu efek dari para calon kontestan Pilwako tidak memiliki tingkat kesadaran manusia normal.

Dilanjutkannya calon wali kota itu sendiri memiliki nilai tinggi menjadi Wali Kota Palembang bukan sekedar main-main jadi pemimpin untuk sebuah permainan kesenangan belaka.

"Kenapa saya sebut fenomena sakit jiwa karena mereka seakan-akan berpikir menjadi Wali Kota Palembang itu main-main. Mereka pikir jadi calon wali

kota hanya cukup pasang 20 baliho klaim didukung partai promosi di medsos. Kalian semua harus membangun citra diri terlebih dahulu dalam waktu lama dengan rakyat Palembang dan setidaknya sudah ada investasi sosial dulu bukan tiba-tiba muncul jadi calon Walikota Palembang," paparnya kesal dengan fenomena yang terjadi di Pilpres 2024 di Palembang.

Dia memberikan pemahaman menjadi calon sosok pemimpin itu tidak sederhana harus bisa menghadirkan rasa kepada rakyatnya. Lalu apabila mau menang alias dipilih rasa itu harus pas dirasakan oleh rakyatnya. Namun di Pilwako Palembang seakan-akan tidak memahami itu muncul-muncul saja dan bermain-main di Pilkada.

"Jadi pejabat politik (pemimpin) seperti saat makan soto ada rasa asem dari jeruknya, rasa guri dari bawang pastinya di dalamnya ada daging dan toge. Begitu juga sosok yang menjadi calon pemimpin sudah ada investasi sosial, pintar, berani, lucu, dan belagak (tampar dan cantik). Kalau tidak ada rasa seperti itu janganlah mencalonkan diri ini bukan ajang main-main," terangnya.

Disisi lain Bagindo Togar Butar Butar cukup senang karena antusias di Pilwako Palembang 2024 bermunculan nama-nama calon berpotensi. Dia menyebutkan yang layak sebagai kontestan di Pilwako 2024 ada lima pasang dan sisanya hanya menjadi pengganggu saja.

"Kata saya deal kontestan di Pilwako Palembang 2024 hanya lima pasang



saja. Sisanya seperti Andi Asmara, Firmansyah Hadi, Nandriani Octarina dan Fitriana hanya pengganggu saja," jelasnya

Lima kontestan yang disebut Togar Butar Butar layak tersebut, pertama pasangan Ratu Dewa (Pj Walikota Palembang) berpasangan dengan M Hidayat (Ketua Badan Kehormatan DPRD Palembang).

Kedua Fitrianti Agustida (mantan Wawako Palembang) dan Muhammad Akbar Alfaro (Mantan Ketua DPC Gerindra Palembang).

Ketiga Prima Salam (Ketua DPC Gerindra Palembang) dan Rasyid Rajasa (Ketua Harian DPD PAN Bandung).

Keempat Yudha Pratomo Mahyuddin (Ketua DPC Demokrat Palembang) dan Baharudin (Ketua DPD PKS Palembang). Kelima kontestan terakhir dari jalur independen Charma Afrianto dan Novembriono.

"Saya yakin bisa saja akan ada muncul-muncul nama lain yang kembali memasang baliho sebagai Calon Walikota Palembang. Hanya dengan modal mendaftarkan diri ke partai sudah baper dan menilai partai mengusung mereka padahal semua partai membuka untuk siapa saja yang ingin mendaftarkan diri. Benar-benar tahun Pilkada di Palembang banyak sekali kena gangguan jiwa," pungkasnya

Sementara itu Pengamat Politik dan Akademisi dari Stisipol Candradimuka, Ade Indra Chaniago sepakat dengan fenomena sakit jiwa di Pilwakot Palembang disebutkan tersebut.

"Kalau saya sepakat dengan dikatakan Bagindo Togar memang semuanya sakit jiwa. Tidak gampang maju untuk menyatakan mencalonkan diri sebagai calon Walikota Palembang. Karena ajang Pilkada ini seakan-akan jadi ajang coba-coba," ucapnya.

Namun dari sudut pandangnya bahkan Ade Indra Chaniago adanya indikasi KPU juga tidak serius menjalankan titah rakyat mencari pemimpin yang amanah.

Pernyataan itu karena dampak dari Ketua KPU, Hasyim Asy'ari menunjukkan langkah KPU ke depan dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Hal tersebut tergambar dari pernyataan yang bersangkutan pada tanggal 8 Mei 2024

bahwa caleg terpilih yang menjadi peserta Pilkada tidak wajib mundur dari jabatannya.

Lalu turut menyatakan juga akan dilakukan pelantikan susulan bagi caleg terpilih yang ga-

gal dalam Pilkada.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedepan, caleg terpilih yang menjadi peserta pilkada tidak akan dilantik bersamaan dengan caleg terpilih lainnya berdasarkan jadwal tahapan pelantikan pada Pemilu 2024 sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022.

"Pilkada 2024 jadi ajang coba-coba dan tidak tulus untuk kepentingan rakyat. Itu jelas dalih MK akan digunakan oleh KPU di Pilkada nantinya," kata Ade

Ade Indra Chaniago menyebutkan rakyat Indonesia hanya akan menjadi kelinci percobaan oleh elite-elite politik khususnya yang sudah terpilih saat menjadi Caleg.

Melihat adanya peluang dari KPU itu mereka ikut maju karena tidak ada resiko jabatannya sebagai anggota dewan hilang apabila tidak terpilih di Pilkada.

"Jadinya rakyat hanya kelinci percobaan mereka saja. Mereka yang mencalonkan diri itu terkesan tidak tulus karena tidak ada pengorbanan kalau kalah bisa tetap menjadi anggota dewan. Kalau benar-benar tulus menjadi wakil rakyat harus ada yang dikorbankan itu logikanya. Namun sekarang kenapa marak caleg-caleg ikut Pilkada karena tidak ada resiko," paparnya.

Sebagai pengamat politik dia menilai KPU telah ditanggapi oleh kepentingan kaum elite politik untuk mengejar kekuasaan saja. KPU menjalankan kinerjanya bukan demi kepentingan mencari pemimpin yang ideal untuk rakyat melainkan demi kepentingan elite politik tersebut.

"Kenapa Pilkada jadi ramai spanduk banyak karena semua orang menjadikannya ajang coba-coba. Kalau saya menyebutkan KPU ini mewujudkan kepentingan elite politik dan mempunyai ide yang gila. Kalau seperti ini bagaimana Indonesia bisa dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar layak untuk rakyat," pungkasnya. •IRY





MENDAGRI WANTI-WANTI KEAMANAN DATA PEMILIH PILKADA

Kementerian Dalam Negeri menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024. Penyerahan DP4 dilakukan secara simbolis oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang Utama Kantor KPU Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024.

Mendagri mengatakan, dalam konteks melaksanakan pelaksanaan Pilkada, peran pemerintah yang utama atau yang pertama kali adalah menyediakan DP4. Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang terekam dan diperbarui setiap hari.

Berdasarkan data yang dikantonginya, DP4 Pilkada Serentak per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

“(Pemilih) tentunya warga negara yang sudah memiliki umur 17 tahun sampai tanggal 27 November. Jadi datanya tentu agak berbeda dengan DP4 untuk pemilu 14 Februari. Kalau 14 Februari yang potensial pemilih usia di atas 17 tahun sampai 14 Februari. Yang (Pilkada) ini sudah kita hitung sampai dengan tanggal 27 November 2024 nanti yang berusia 17 tahun siapa saja, by name by address, dan dibagi setiap

provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, lengkap,” katanya.

Mendagri menegaskan, setelah diserahkannya DP4, pihaknya berharap kerja sama teknis dapat terus berlanjut antara Kemendagri dengan KPU lantaran dinamika data kependudukan yang sangat tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya dinamika data kependudukan, yakni adanya kelahiran/kematian, peristiwa pindah datang per bulan, serta adanya perubahan pekerjaan menjadi anggota TNI/Polri. Dia menekankan pula soal keamanan data siber yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

“Oleh karena itu, sistem pengamanan untuk cyber security terutama, tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga dan kemudian tentu akan mendapat dukungan mohon dukungan dari BSSN. Kemudian dari Polri, laboratorium forensik Polri, itu juga ada badan cyber jajaran cyber dibentuk, membantu sistem pengamanan yang ada, termasuk sistem pengamanan internal dari KPU sendiri,” ungkapnya.



Mendagri menambahkan, untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, berbagai stakeholder terkait perlu betul-betul bekerja sama dengan baik. Pasalnya, keberhasilan Pilkada nanti merupakan orkestrasi banyak unsur, dari pihak penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, partai politik, peserta pasangan calon, media pers, hingga masyarakat.

"Kita harapkan dalam (Pilkada) berlangsung aman, damai dan lancar, dan demokratis. Dan untuk Pilkada ini adalah ini juga adalah pengalaman sejarah baru bagi kita, bagi bangsa Indonesia, first time ever in our history, kita melaksanakan Pilkada serentak seluruh Indonesia kecuali yang karena undang-undang itu tidak ada Pilkada, yaitu di Jogja, DIY, karena UU Keistimewaan," ujarnya.

Mendagri juga memberikan atensi terhadap keamanan data pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Ada beberapa fitur yang harus mendapatkan perlindungan, salah satunya keamanan data pribadi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Mendagri mewanti-wanti jangan sampai terjadi kebocoran data yang berisiko hukum. Oleh karena itu, sistem pengamanan, terutama untuk cyber security, betul-betul dijaga oleh berbagai pihak terkait, dengan mendapat dukungan dari KPU, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Polri.

Tito juga mengungkapkan, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 mencapai Rp27 triliun. Total anggaran tersebut merupakan kebutuhan bagi KPU Daerah dan Badan Pengawas Pemilu daerah. Biaya tersebut seluruhnya akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Total usulan semua, lebih kurang Rp20 triliun lebih untuk jajaran KPUD. Untuk jajaran Bawaslu kurang lebih Rp6,3 triliun. Jadi totalnya lebih kurang hampir Rp27 triliun dari seluruh daerah. Untuk KPUD dan Bawaslu daerah," terang Tito.

Selain keperluan biaya bagi penyelenggara, Tito menyebutkan adanya keperluan anggaran untuk aparat keamanan (TNI dan Polri). Namun, untuk berapa kepastian kebutuhan anggaran keamanan, Kemendagri belum melaku-

kan penghitungan.

Tito mengatakan, Kemendagri mencatat, semua daerah sudah membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada KPUD. Akan tetapi, untuk Bawaslu daerah, pelaksanaan NPHD baru 95 persen.

Oleh karena itu, Tito menyatakan

tidak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih Pilkada masuk dalam DPT. "Kami berharap teman-teman sekalian dari provinsi, kabupaten/kota, untuk bekerja dengan cermat," ujarnya.

Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, memastikan pihaknya akan menjaga



pihaknya sedang mengusahakan seluruh NPHD terealisasi 100 persen untuk Bawaslu daerah. "Saya tentunya menarget secepat mungkin. Bila perlu dalam bulan Mei, Juni sudah harus selesai karena teman-teman KPUD mereka memerlukan biaya untuk mengeksekusi program-programnya. Bawaslu juga demikian dan TNI Polri juga perlu melakukan persiapan-persiapan," kata Tito.

"Bisa di-deliver sebulan, dua bulan sebelumnya. Tidak cukup waktunya untuk pengadaan, segala macam, lelang dan sebagainya (jika waktunya mendesak)," ucap dia.

Sementara itu, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengimbau jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota agar terus memas-

data pemilih Pilkada 2024. "Yang pasti itu (peringatan dari Mendagri), jadi catatan kita bersama. Yang kemarin kan belum keluar hasilnya, kita masih menunggu juga," kata Betty.

Dia menuturkan KPU memang sudah bekerja sama dengan BSSN hingga Polri untuk membentuk satuan tugas (satgas) keamanan siber.

Mengenai apakah KPU bisa menjamin tidak akan terjadi kebocoran data pemilih karena sudah ada sistem keamanan, Betty mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin menjaga data pemilih.

"Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak, kami bisa menjaga data pemilih sebaik mungkin. Kami usahakan, Insya Allah," ujarnya. •

PELUNCURAN
PENDIDIKAN
DOKTER
SPESIALIS
6 MEI 2024

BERBASIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN



Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit CETAK 30 RIBU DOKTER SPESIALIS SETAHUN

Kementerian Kesehatan berupaya memecahkan persoalan akut terkait pemenuhan rasio kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Kemenkes men-canangkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dan kolegium sebagai salah satu kebijakan guna memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, saat ini, produksi dokter spesialis Indonesia mencapai 2.700 per tahunnya.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, saat ini, produksi dokter spesialis Indonesia mencapai 2.700 per tahunnya.

"Kebutuhan kita 29.000-30.000. Jadi butuh waktu 10 tahun lebih. Dan itu terjadi terus setiap tahun. Sebagai komparasi, Inggris yang penduduknya 50 juta, seperenam dari Indonesia, produksi dokter spesialisnya 12.000 per tahun. Hampir 5 kali lipat dari produksi di Indonesia," ungkap Budi dalam peluncuran program pendidikan dokter spesialis dengan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.

Budi menuturkan, selama 79 tahun, distribusi dokter yang tidak merata di Tanah Air masih menjadi masalah yang tak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Pemerintah berkolaborasi dengan Institute of Health Metric Evaluation (IHME) dalam pembuatan kebijakan bidang

kesehatan untuk 15 tahun ke depan.

IHME membantu menghitung kebutuhan dokter spesialis di level kabupaten dan kota, berdasarkan pola demografis dan epidemiologis, dan mendapatkan angka 29 ribu tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia pun mengadopsi sistem pendidikan berbasis RS tersebut, yang sudah menjadi standar global, guna memenuhi kebutuhan dokter spesialis.

"420 rumah sakit pendidikan sekarang akan mendampingi 24 fakultas kedokteran yang sudah melakukan pendidikan spesialis. Sehingga bukan hanya 24 yang bisa produksi, tapi ditambah lagi 420," katanya.

Dia menjelaskan, pendidikan spesialis dokter memakan biaya yang mahal. Akan tetapi, pada program ini, para residen tidak perlu membayar uang kuliah ataupun uang pangkal dan mendapatkan keuntungan yang sama dengan tenaga kerja lainnya.

"Mereka akan mendapat perlindungan

gan kesehatan, perlindungan hukum, jam kerja yang wajar, dan statusnya bukan status di bawah. Bukan status pesuruh, bukan status pembantu,” katanya.

Adapun untuk kualitas program, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium Indonesia untuk pembuatan kurikulum, serta berkolaborasi dengan para ahli dari luar negeri untuk memperkaya kurikulum tersebut.

Budi menambahkan, salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis, di mana hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis sesuai rasio yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebanyak 0,28 berbanding 1.000 penduduk di Indonesia, Budi memperkirakan butuh 15 tahun bagi Indonesia untuk memenuhinya melalui keberadaan 117 fakultas kedokteran.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyebut jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini berkisar 48.785 orang yang mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sejumlah wilayah dengan jumlah dokter spesialis kurang dari 100 orang adalah Papua Barat nol dokter spesialis, Maluku Utara 98 dokter spesialis, dan Sulawesi Barat 85 dokter spesialis.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis akan mendukung bonus demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi 10-15 tahun ke depan. Jokowi menyebut ketika bonus demografi terwujud, maka Indonesia akan memiliki 68 persen penduduk usia produktif.

“Tetapi 68 persen penduduk usia produktif itu akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu, betul-betul kita harus mempersiapkan dan merencanakan (bonus demografi) ini,” kata Jokowi.

Dalam menangani kurangnya dokter dan dokter spesialis di Indonesia, Presiden menegaskan perlu dilakukan terobosan, termasuk dengan menggerakkan 24 fakultas kedokteran di Indonesia dan 420 rumah sakit pemerintah untuk memproduksi lebih banyak dokter. Pasalnya, Indonesia hanya mampu menghasilkan 2.700 dokter spesialis per tahun sementara kebu-

tuhan saat ini mencapai 29.000 dokter spesialis.

“Artinya memang (jumlah dokter spesialis) sangat kurang sekali. Ditambah distribusinya yang tidak merata. Rata-rata dokter spesialis ada di Jawa dan di kota-kota, 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, harus ada terobosan. Kita harus berani memulai,” kata Jokowi.

Kepala Negara memaparkan rasio dokter di Indonesia masih berkisar 0,47 per 1.000 penduduk. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

didikan utama, yakni spesialis mata, jantung, anak, saraf, ortopedi, dan onkologi.

Adapun enam rumah sakit pendidikan yang dimaksud yakni RS Mata Cicendo, RS Ortopedi Soeharso, RS Pusat Otak Nasional (PON), RS Kanker Dharmas, RSAB Harapan Kita, dan RSJPD Harapan Kita.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia berharap Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis Rumah Sakit Pendidikan (RSP) mampu menjawab masalah maldistribusi dokter spesialis di Indonesia.



menyebutkan setiap negara memiliki rasio dokter 1 per 1.000 agar seorang dokter di suatu negara melayani 1.000 penduduk. Capaian rasio dokter saat ini menempatkan Indonesia berada di ranking 147 dunia.

“(Peringkat ini) sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat ke-9, berarti masuk tiga besar tetapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya,” ujarnya.

Kemenkes melalui program Transformasi Kesehatan memfasilitasi 420 rumah sakit, dari total 3.000 rumah sakit di Indonesia, untuk mendidik lebih banyak dokter dan dokter spesialis di luar jalur universitas. Program itu akan memprioritaskan dokter-dokter putra daerah sebagai peserta pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan.

Pada tahap awal ini, terdapat enam program studi kedokteran spesialis di enam rumah sakit penyelenggara pen-

“Yang paling penting juga untuk diperkuat bukan hanya produksi, tapi kita juga harus bicara bagaimana nanti ada sebuah regulasi yang mempertegas bahwa produksi ini akan ada yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, sehingga juga akan bisa menjawab masalah maldistribusi,” kata Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi.

Penyebaran dokter, kata Adib, tidak lepas dari adanya peran serta supervisi kolegium, sehingga diharapkan kerja sama seluruh pihak dapat berjalan dengan baik.

Ia juga menekankan kepada seluruh pihak terkait untuk tidak membedakan antara dokter spesialis lulusan PPDS berbasis universitas, maupun PPDS berbasis RSP.

Menurut Adib, tidak boleh ada perbedaan antara satu dokter dengan dokter lainnya dalam aspek profesionalisme, kolegialitas, dan etika. •

SETOP BUDAYA KEKERASAN SEKOLAH KEDINASAN

Kementerian Perhubungan menyatakan akan fokus mempercepat pembenahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) untuk memutus mata rantai kekerasan antar-siswa taruna/taruni. Hal itu buntut siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jakarta, Putu Satria Ananta Rustika (19), yang meninggal dunia pada 3 Mei 2024 akibat kekerasan oleh seniornya.

"Kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa kekerasan di STIP Jakarta. Ini menjadi duka yang mendalam dan menjadi sebuah titik bahwa kami harus melakukan perubahan. Kami akan melakukan pembaruan

pada pendidikan vokasi di bawah naungan Kementerian Perhubungan," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, seusai mengunjungi keluarga Alm Putu Satria Ananta Rustika di Klungkung, Bali, Kamis, 9 Mei 2024.

Menhub menyampaikan rasa duka cita mendalam sekaligus penyesalan dan permohonan maaf kepada keluarga Alm Putu atas peristiwa kekerasan di STIP Jakarta yang menyebabkan meninggalnya taruna STIP tersebut.

Dalam jangka pendek, Kemenhub akan menerapkan moratorium penerimaan taruna di STIP dan mengoptimalkan penerimaan taruna di sekolah pelayaran lainnya di bawah Kementerian Perhubungan.

"Selain itu, juga melarang berbagi aktivitas yang dapat mendorong celah terjadinya perundungan, termasuk salah satunya menghilangkan kepangkatan dan sebutan senior dan junior di dalam sekolah," ujar Menhub.

Lalu, dalam jangka menengah, laporan-laporan berbasis digital yang mengurangi interaksi fisik akan dioptimalkan, dengan meningkatkan kualitas pengasuh taruna, serta pemisahan interaksi

taruna antar angkatan dan menghilangkan atribut seragam.

Menhub mengatakan, pembenahan juga akan dilakukan di sekolah-sekolah lain yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. "Dalam jangka panjang, pembenahan serupa akan diterapkan di sekolah-sekolah lain di bawah BPSDM Kementerian Perhubungan," imbuhnya.

Budi mengaku pihaknya berkomitmen untuk menjadikan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan sebagai sekolah yang menghasilkan insan transportasi yang berkualitas, baik dari aspek keahlian dan keterampilan maupun insan yang berbudi dan berakhlak.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Kemenhub akan menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk para pakar pendidikan dan pakar transportasi.

Secara internal, kata Budi, Kemenhub akan melakukan pembenahan mendasar yakni dengan mengubah kurikulum yang berfokus pada pembelajaran di kelas dan mengutamakan soft skills yang nantinya dapat mendukung lulusan siap kerja di dunia kelautan dan pelayaran.



"Terkait dengan kasus saat ini, sudah ditangani secara hukum oleh Kepolisian Resor Jakarta Utara," ujar Budi.

Budi juga telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk mempercepat investigasi internal atas unsur-unsur Kampus STIP Jakarta yang mengabaikan atau tidak menjalankan SOP yang telah ditetapkan, sehingga kasus ini dapat terjadi.

"Untuk selanjutnya, akan dikenakan sanksi institusi sesuai ketentuan yang berlaku," sambungnya.

Budi juga memastikan atribut pangkat pada seragam siswa kedinasan STIP akan dihilangkan. Pasalnya, atribut ini membuat adanya jarak antara senior dan junior.

"Bahkan, kami akan membuat suatu yang lebih humanis, tidak lagi setiap hari menggunakan seragam itu, ada satu hari yang pakai pakaian putih, satu hari pakaian batik, di hari libur mereka pakai pakaian bebas," ujarnya.

Menurut Budi, menghilangkan atribut pangkat dengan mengatur seragam peserta didik bertujuan untuk menghapus perbedaan antara senior dan junior, sehingga kasus yang dialami Putu Satria tidak terulang kembali.

Ia merancang agar taruna tingkat II menyewa kamar kos di sekitar kampus STIP, sehingga mereka berbaur dengan masyarakat dan mendewasakan diri.

"Seperti di Poltrada, itu mendidik mereka menjadi dewasa terbiasa bergaul dengan masyarakat, apa yang dilakukan itu sangat baik, bahkan antara siswa dan masyarakat bergabung dalam satu kegiatan, entah kegiatan budaya atau ekonomi," ujar menteri kelurahan Palembang itu.

Budi juga menyatakan akan menyiapkan bantuan pendidikan untuk Kadek Ananta Pradnyaswari, adik kandung dari Putu Satria

Ananta Rustika.

"Kami tadi sudah berembung dengan orang tua dan Pak Pj Bupati Klungkung bahwa bisa dipastikan ananda akan mendapatkan beasiswa dari Kementerian Perhubungan, sehingga dia bisa selesai dari kegiatan sekolah di tingkat vokasi, bisa di Jakarta bisa di Bali," kata dia.

Dalam kunjungannya ke rumah duka di Desa Gunaksa, Budi berbincang dengan keluarga Putu Satria dan keluarga menyampaikan harapannya agar adik dari korban mendapat perhatian.

Dia menjelaskan sudah tanggung jawab negara memberi perhatian ke keluarga korban, apalagi korban merupakan anak pertama yang masih memiliki

Wihana Kirana Jaya, menambahkan, pihaknya juga merancang perombakan kurikulum pendidikan di 33 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Kurikulum baru nantinya akan membuat siswa sibuk melakukan kegiatan kemanusiaan.

"Kami tahu kebutuhan millennial dan kelompok Z sekarang sudah tidak boleh seperti pendidikan masa lalu, adik-adik nanti berubah lebih tolong menolong, nilai-nilai itu akan ada di dalam kurikulum, dan sifatnya soft skill kebutuhan tentang penyelesaian masalah, komunikasi, dan digitalisasi," kata dia.

Wihana mengatakan reformasi pendidikan vokasional ini berangkat dari arahan Menhub yang menilai persaingan



dua adik yang menganggapnya sebagai figur panutan.

"Rabu akan kami kirimkan surat kepada keluarga korban diketahui Pj Bupati Klungkung, dan ini merupakan suatu kewajiban saya atas nama menteri, tentu ini adalah tanggung jawab negara," ujarnya.

Staf Khusus
Menteri
Per-
hubun-
gan,
Prof

pada dunia pekerjaan tidak lagi hanya mengandalkan fisik, namun kompetensi dan pengetahuan.

Untuk itu, mereka akan mengkaji visi dan misi tiap sekolah kedinasan, seperti di STIP, agar selanjutnya Kemenhub dapat mengubah program mereka yang memiliki nilai kekerasan menjadi program yang lebih baik.

"Digitalisasi itu salah satu infrastruktur untuk pendidikan, tapi tidak lupa tentang keberlanjutan sekolah ilmu pelayaran, tentang navigasi, pelabuhan, manajemen, tidak ada lagi ilmu ganda harus spesialisasi, tapi diharapkan punya keahlian soft skill yang lebih," ujarnya.

Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik, kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian, sehingga mahasiswa berubah. ●



TOLAK RUU PENYIARAN PERS JADI TAK MERDEKA

Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang menjadi inisiatif DPR mendapatkan kritikan tajam dari berbagai kalangan. Pasalnya, dalam Pasal 50 B Ayat 2 huruf c draf RUU yang sedang digodok di Badan Legislasi DPR terdapat larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengklaim larangan media menayangkan

konten atau siaran eksklusif jurnalistik investigasi untuk meminimalkan dampak dari produk jurnalistik itu.

Politikus Partai Gerindra itu menuding ada produk jurnalistik investigatif yang 'separuh benar'. Namun, Dasco tak menjelaskan produk jurnalistik investigatif yang dimaksud.

"Seharusnya nggak dilarang, tapi impact-nya gimana caranya kita pikirin. Kadang-kadang nggak semua, kan, ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar, tapi ada juga yang kemarin kita lihat juga investigasinya separuh benar.

Jadi, kita akan bikin aturannya, supaya sama-sama jalan dengan baik," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Dasco mengaku pihaknya akan berkonsultasi dengan sejumlah elemen masyarakat untuk menyempurnakan RUU Penyiaran. Terutama, dengan media massa agar jurnalisme investigatif tetap berjalan dan dampaknya bisa diantisipasi.

"Menegenai investigasi-investigasi, ya, namanya juga hal yang dijamin Undang-Undang, ya mungkin kita akan konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan baik, haknya tetap jalan, tetapi impact-nya juga kemudian bisa diminimalisir," ujar Dasco.

Adapun pelarangan konten eksklusif jurnalistik investigasi dibatasi karena di-

anggap mengganggu penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum

Pers (LBH Pers), Ade Wahyudin, memandang, alasan DPR itu sebagai hal yang lucu. Pasalnya, keduanya memiliki mandat dan fungsi masing-masing dan tidak saling berbenturan.

"Secara mandat berbeda. Polisi (diatur) berdasarkan UU Kepolisian dan pers berdasarkan UU Pers. Keduanya memiliki level setara, dan tidak seharusnya menegasikan," kata Ade.

Dia juga menyatakan, RUU Penyiaran bila melarang jurnalistik investigasi, maka sama saja membatasi kebebasan pers yang dijamin UU Pers. Ade mendesak DPR melakukan evaluasi terhadap draf RUU Penyiaran dengan mencabut pasal yang bertentangan dengan UU Pers. Selain itu, harus membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan-masukan terhadap penyusunan RUU Penyiaran.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga menolak RUU Penyiaran karena kehadiran Pasal 50 B ayat (2) butir c melarang media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalistik investigasi. Menurut AJI, beleid yang sedang digodok DPR ini akan membungkam pers.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nani Afrida, mengatakan, jurnalistik investigasi merupakan produk jurnalistik dengan kasta tertinggi. Pembuatan produk jurnalistik ini juga tidak mudah karena membutuhkan waktu lama.

"Pembungkaman pers. Itu sudah pasti agak aneh, ya, masa jurnalistik paling tinggi (yaitu) investigasi dilarang," kata Nani.

Jurnalis perempuan asal Aceh itu menegaskan, pembuatan karya jurnalistik investigasi tidak sembarangan. Banyak masyarakat yang menunggu produk investigasi jurnalistik tersebut.

Wakil Ketua DPR,
Sufmi Dasco Ahmad

Sejak awal, kata dia, AJI menolak dan mempermasalahkan pasal itu. AJI memandang pasal itu harus dihapus, sebab tidak ada dasar bagi DPR untuk membungkam kebebasan pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

"Kami anggap enggak ada dasarnya, kemarin ada pernyataan anggota dewan mengganggu penyelidikan aparat keamanan, enggak ada hubungannya," tegas Nani.

Menurut Nani, aparat penegak hukum bekerja dengan cara sendiri, pun dengan wartawan yang bekerja dengan memegang teguh dan patuh pada UU Pers. Selama ini, AJI menilai kerja-kerja wartawan justru membantu kerja penyelidikan aparat penegak hukum.

"AJI melihat pasal ini jangan ada, itu mengganggu banget," sebut Nani.

Sementara itu, Dewan Pers dan seluruh komunitas pers dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

"Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran tetapi mempertanyakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran," kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Menurut Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, bila RUU itu nanti diberlakukan, maka tidak akan ada independensi pers. Pers pun menjadi tidak profesional. Dia juga mengkritik penyusunan RUU tersebut yang tidak sejak awal melibatkan Dewan Pers dalam proses pembuatannya.

Ninik menambahkan, dalam ketentuan proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran.

Larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran, ujarnya, juga bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Dampak lainnya, larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers. Padahal jelas tertera dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers

dari campur tangan pihak lain.

Hal lain yang disoroti Ninik adalah penyelesaian sengketa pers di platform penyiaran. "Sesuai UU Pers, itu menjadi kewenangan Dewan Pers. KPI tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa pers," kilahnya.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengutarakan upaya menggem-bosi kemerdekaan pers sudah lima kali

kan, jika DPR atau pemerintah tetap ngotot untuk memberlakukan RUU itu, maka akan berhadapan dengan masyarakat pers.

"Kalau DPR tidak mengindahkan aspirasi ini, maka Senayan akan berhadapan dengan komunitas pers," kata Wahyu, biasa dipanggil Komang.

Suara penolakan juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang



Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu



Ketua Umum AJI Indonesia, Nani Afrida

dilakukan oleh pemerintah maupun legislatif. Hal itu antara lain tercermin melalui isi UU Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum, pasal dalam UU Cipta Kerja, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan terakhir RUU Penyiaran.

Yadi menilai, RUU Penyiaran ini jelas-jelas secara frontal mengekang kemerdekaan pers.

Suara senada dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika. Ia menegaskan

disampaikan oleh Kamsul Hasan. Menurut dia, RUU Penyiaran itu jelas-jelas bertentangan dengan UU Pers. PWI minta agar draf RUU Penyiaran yang bertolak belakang dengan UU Pers.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, minta agar draf RUU itu dicabut karena akan merugikan publik secara luas dan kembali disusun sejak awal dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. ●



REALISASIKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT HINGGA KE DESA

Satu demi satu permasalahan yang menyangkut fasilitas umum masyarakat maupun infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin berhasil diselesaikan Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud. Mulai dari jalan, penerangan hingga fasilitas kesehatan telah dibenahi dan ditingkatkan pelayanannya.

Untuk fasilitas kesehatan, puluhan tahun menantikan keberadaan tempat pelayanan kesehatan atau Puskesmas, akhirnya warga di empat Desa eks transmigrasi Kecamatan Babat Supat kini memiliki Puskesmas yang berhasil direalisasikan oleh Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Kini empat desa di Kecamatan Babat Supat yang dimaksud yakni Desa Bandar Tenggulang, Desa Tenggulang Raya, Desa Tenggulang Baru, dan Desa Sumber Jaya telah terlayani kesehatan.

Hal ini direalisasikan Pj Bupati Apriyadi, karena keprihatinannya selama ini yang membuat warga harus menempuh pu-

luhan kilometer untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengatakan, sejak satu tahun yang lalu dirinya mendapatkan laporan dari masyarakat Desa Tenggulang Raya Kecamatan Babat Supat terkait kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena keberadaan Puskesmas yang sangat jauh.

"Alhamdulillah hari ini kita resmikan bangunan Puskesmas Tenggulang Raya, kini warga di empat Desa eks Transmigrasi Kecamatan Babat Supat bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan keberadaan Puskesmas Tenggulang Jaya," ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud di sela Pe-

resmian Puskesmas Tenggulang Raya Kecamatan Babat Supat.

Ia menceritakan, sudah selayaknya keberadaan Puskesmas untuk diperoleh masyarakat empat Desa Eks Transmigrasi Kecamatan Babat Supat.

"Semoga Puskesmas ini bermanfaat dengan baik untuk masyarakat," ujar pria kelahiran Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Muba tersebut.

Lanjutnya, tidak hanya sekadar Puskesmas tetapi keberadaan Puskesmas Tenggulang Raya ini juga memiliki layanan Unit Gawat Darurat (UGD).

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Desa Tenggulang Raya, Junaidi mengungkapkan Pj Bupati Apri-

yadi telah mengabdikan mimpi warga empat Desa yang selama puluhan tahun sangat berharap memiliki tempat pelayanan kesehatan.

"Kami ingat betul pada 14 Maret 2023 pak Apriyadi berjanji akan membangun Puskesmas, dan hari ini secara bangunan puskesmas megah ini telah berdiri dengan kokoh," pungkasnya.

Tunaikan Semua Janji

Apresiasi juga pantas diberikan Apriyadi Mahmud yang melakukan perjuangan berat untuk pengalihan listrik PT MEP ke PLN di Muba.

Hasilnya, secara resmi Pj Bupati Apriyadi Mahmud bersama Pj Gubernur Sumsel Dr Agus Fatoni MSi melakukan penyalan perdana listrik PLN pasca beralih dari listrik PT MEP di Desa Tenggulang Jaya Kecamatan Babat Supat.

"Pak Bupati Apriyadi ini tidak hanya omdo (omong doang, baca) saja, awal menjabat Pj Bupati sudah berjanji akan mengalihkan listrik MEP ke PLN, dan hari ini secara resmi kami menikmati listrik PLN," ungkap tokoh pemuda Desa Tenggulang Jaya Kecamatan Babat Supat, Madyuri.

Ia menuturkan, warga sangat bersyukur memiliki pemimpin seperti Pj Bupati Apriyadi yang amanah dan menepati janji.

"Semoga kami terus dipimpin oleh sosok yang amanah dan peduli. Terima kasih pak Bupati Apriyadi dan jajaran Pemkab Muba," ucapnya.

Halsenada juga diungkapkan tokoh masyarakat Desa Tenggulang Jaya, I Made Entar. Ia mengaku awalnya warga setempat sempat pesimis dengan janji yang diberikan Pj Bupati Apriyadi Mahmud untuk mengalihkan listrik MEP ke PLN, pasalnya sudah puluhan tahun tidak terealisasi.

"Hari ini menjawab keraguan kami selama ini, Pak Apriyadi membuat kami sangat sangat bahagia dengan menunaikan janjinya mengalihkan pengelolaan listrik MEP ke PLN, sekarang kami

tidak khawatir lagi dengan terjadinya byarpet," ungkap dia.

Tokoh agama Desa Tenggulang Jaya, H Mustajab mengaku sangat bahagia dengan secara resmi masuknya listrik PLN di Kecamatan Babat Supat.

"Kami sangat berterima kasih dengan pak Bupati Muba Apriyadi, kami sangat

terkait di Pemkab Muba serta support warga Muba," ujar Putra Daerah Asli Muba dari Desa Bumi Kecamatan Lawang Wetan itu.

Ia mengaku, memang banyak lika liku dalam perjuangan menuntaskan peralihan listrik tersebut, namun berkat dukungan dan doa semua pihak di Muba se-



bersyukur punya pemimpin yang amanah dan menunaikan janjinya kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengaku sangat senang bisa menuntaskan persoalan peralihan listrik PT MEP ke PLN.

"Alhamdulillah akhirnya tuntas peralihan listrik MEP ke PLN, ini tentunya berkat kerja keras OPD serta stakeholder

muanya berjalan dengan baik.

"Realisasi ini juga berkat support dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 bapak Herman Deru dan Mawardi Yahya, hingga saat ini mendapatkan dukungan yang masif dari bapak Pj Gubernur Dr Agus Fatoni," jelas Apriyadi.

Kemudian, dukungan realisasi peralihan listrik MEP ke PLN ini juga didukung total oleh Anggota DPR RI Kahar Muzakir dan Maman Abdurahman.

"Insya Allah ini semua demi warga masyarakat di Muba, dan khususnya 54 ribu pelanggan MEP," tuturnya. •



16 PSN WARISAN JOKOWI KE PRABOWO

Butuh Investasi Rp1.264 Triliun

Presiden Joko Widodo akan mewariskan 16 Proyek Strategis Nasional atau PSN yang baru diresmikan tahun ini ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Seluruh PSN tersebut setidaknya membutuhkan investasi senilai Rp 1.264 triliun.

Pelaksana Tugas Deputy Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian, Susi Wijono Moegiarso, mengatakan, 16 PSN baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024. Dengan demikian, total PSN saat ini mencapai 218 proyek infrastruktur dan 15 program kerja.

"Saat ini Permenko tersebut sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. 16 PSN baru tersebut terdiri dari 14 proyek infrastruktur dan dua program kerja," kata Susi Wijono di Jakarta Pusat, Selasa, 14

Mei 2024.

Berikut daftar 16 PSN yang akan diwariskan Jokowi ke Prabowo:

1. Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland

Susi Wijono mengatakan, nilai investasi yang dibutuhkan untuk PSN ini mencapai Rp65 triliun. Namun, dia menekankan pengembangan tidak dilakukan di seluruh kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK. Dia menjelaskan, lahan PIK yang masuk dalam proyek pengembangan tersebut hanya sekitar 1.700 hektare dengan proyeksi serapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung sejumlah 19.785 orang.

Untuk diketahui, total luas kawasan

PIK mencapai 2.650 hektare. Menurut dia, pengembangan PIK 2 menjadi PSN adalah hasil rekomendasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Ini karena pengembangan PIK 2 dicanangkan menjadi kawasan wisata hijau di DKI Jakarta.

2. Kawasan Industri Wlrajaya Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park

PSN ini memiliki nilai investasi terbesar hingga Rp226 triliun. Menurutnya, PSN tersebut merupakan bentuk dukungan komitmen pemerintah mencapai emisi nol bersih pada 2060.

Kawasan industri tersebut akan memproduksi energi terbarukan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 4,1 gigawatt panel. Di samping itu, PLTS tersebut akan dilengkapi dengan baterai berkapasitas 11 gigawatt-hour.

3. North Hub Development Project Selat Makassar

PSN tersebut adalah fasilitas pembooran sumur gas alam lepas laut. Potensi produksi dari sumur tersebut adalah gas alam sebesar 1.000 MMSCFD dan 50.000 BPD kondensat.

Investasi PSN ini mencapai USD11,83 miliar dengan potensi penyerapan tenaga kerja lokal sejumlah 4.500 orang. Oleh karena itu, potensi penerimaan negara dari proyek tersebut senilai USD 18 miliar.

4. Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate

PSN tersebut akan menyerap investasi senilai Rp225 triliun. Sementara itu, proyeksi tenaga kerja yang diserap adalah sekitar 30.000 orang.

Kawasan industri tersebut juga dirancang untuk memproduksi 120.000 ton nikel per tahun dengan energi hijau melalui tenaga surya. Nikel tersebut nantinya akan menjadi bahan baku produksi baterai solid state dan pabrik lithium.

5. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate

Total investasi PSN ini mencapai Rp169,5 triliun dengan potensi serapan tenaga kerja sebanyak 59.000 orang. Beberapa produk yang akan keluar dari kawasan industri ini adalah semikonduktor, petrokimia, produk elektronik, dan riset teknologi berbasis

digital.

6. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park

PSN ini diproyeksikan menyerap investasi senilai Rp109 triliun dan akan dibangun di Sulawesi Tenggara. Kawasan ini telah memiliki tenant utama, yakni Huayou Group.

Menurut Susi Wijono, kawasan industri ini dirancang untuk memproduksi 92.667 ton nikel kobalt sulfat per tahun

memproduksi 340.000 ton nikel per tahun dan 1.500 katoda per tahun. Secara rinci, kawasan industri ini akan memproduksi nikel dari proses High Pressure Acid Leaching sejumlah 240.000 ton dan dari proses Rotary Kiln Electric Furnace sejumlah 100.000 ton.

8. Kawasan Industri ASPIRE Stargate
PSN ini akan menambah kawasan industri produsen nikel di Sulawesi Teng-



untuk mendukung kebutuhan nikel dunia. Proyek tersebut ditaksir dapat menyerap tenaga kerja hingga 30.000 orang.

7. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park

Kawasan industri ini diproyeksi membuka lapangan kerja untuk 72.822 orang dan menyerap investasi hingga Rp150 triliun. Senada dengan Indonesia Giga Park, tenant utama Kolaka Resources Industrial Park adalah Huayou Group.

Kawasan industri tersebut akan

gara sebanyak tiga unit. Konstruksi ASPIRE Stargate baru akan menyerap senilai USD187,81 juta atau Rp2,89 triliun.

Kawasan tersebut didesain untuk memproduksi Nickel Pig Iron dan Besi sejumlah 130.740 ton per tahun. Adapun produksi kedua produk tersebut akan menggunakan green smelter lantaran menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 450 megawatt.

9. Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land

Investasi awal PSN ini diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Pengembangan kawasan ini akan memadukan kawasan pariwisata darat dan laut, pendidikan maritim, pusat ekonomi kerakyatan, villa estate, resort, pusat olahraga laut, wisata mangrove, marina, dan dermaga.

10. Kawasan Industri Neo Energy Morowali Industrial Estate

PSN ini akan memproduksi nickel matte, MHP, battery packs, dan battery cell. Seluruh produksi tersebut akan menggunakan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan menyerap tenaga kerja hingga 25.000 orang. Secara sederhana, kawasan industri tersebut akan memproduksi 144.000

salah satu tenant kawasan ini adalah Monash University. Oleh karena itu, ruang lingkup PSN ini adalah pendidikan, riset, ekonomi digital, pengembangan teknologi, industri kreatif, dan bio-medical.

12. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya

Susiwijono memaparkan, PSN ini terletak di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Menurutnya, kawasan industri tersebut merupakan bentuk perluasan Kawasan Ekonomi Khusus Galang-Batang lantaran okupasi lahan di kawasan tersebut kini mencapai 85,7 persen.

Total investasi pada kawasan tersebut diperkirakan mencapai Rp120,5

Bandung Intra Toll Road atau tol yang melewati dalam kota dan North South Link atau rute Pasir Koja-Supratman dengan total investasi Rp7,83 triliun.

15. Program Multi Lane Free Flow

Susiwijono menjelaskan, penetapan PSN diperlukan karena implementasi MLFF memerlukan koordinasi dengan beberapa otoritas dan lembaga keuangan. penyelesaian proyek MLFF perlu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak perbankan.

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dapat menjadi lembaga yang mengkoordinasikan kebutuhan proyek MLFF.

"Alasan kedua MLFF menjadi PSN



ton nikel murni.

Susiwijono memaparkan, produsen yang akan bersarang di sana adalah Gotion High Tech yang bermitra dengan Volkswagen Group. Adapun investasi kawasan tersebut ditaksir mencapai Rp150 triliun.

11. Kawasan Pengembangan Terpadu Bumi Serpong Damai

Susiwijono menjelaskan total lahan BSD yang akan digunakan dalam PSN ini hanya 59,68 hektare. Untuk diketahui, total lahan yang ada di BSD mencapai 4.670 hektare.

la menyampaikan PSN ini direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sementara itu

triliun. Dengan demikian, jenis industri yang akan bersarang cukup beragam, seperti industri gaustic soda, oil refinery, petrokimia, galangan kapal, pelaburan baja, daur ulang, aneka industri, dan pembangunan pelabuhan untuk kegiatan logistik.

13. Pengembangan Jalan Tol Section Harbour Road II

PSN ini berada di Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan estimasi investasi Rp15,8 triliun. Sejauh ini, tol tersebut telah masuk tahap konstruksi dengan pengembangan 11,74 persen.

14. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung

Jalan tol yang dimaksud adalah

adalah dukungan pemerintah dalam proyek KPBU. Tugasnya sama seperti teman-teman di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memberikan penjaminan pemerintah ke sebuah proyek," katanya.

16. Program Peningkatan Konektivitas Udara

Susiwijono menjelaskan, PSN ini akan mendukung integrasi bandara yang dikelola oleh PT Aviastri Pariwisata Indonesia atau InJourney. Menurutnya, status PSN tersebut diperlukan agar dapat mempercepat waktu penerbitan perizinan terkait pelaksanaan transformasi udara dan inklusi integrasi maskapai penerbangan.

Tak Pakai APBN

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan 16 PSN baru tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PSN tersebut terbagi atas 14 proyek dan dua program yang akan dilaksanakan di era pemerintahan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Yang kemarin yang terakhir disetujui itu ada 16 (PSN baru)," kata Airlangga saat konferensi pers di sela Rapat Kerja Nasional Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi Proyek Strategi Nasional di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Ia mengatakan, pelaksanaan 16 PSN tidak menggunakan APBN, tetapi oleh pihak swasta. Salah satu PSN itu adalah proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) bidang kesehatan di kawasan BSD City.

Airlangga mengatakan, Indonesia nanti akan memiliki tiga KEK di bidang kesehatan yaitu di Sanur Bali, BSD, dan Batam. Menurut dia, KEK tersebut cukup prospektif karena masyarakat selalu membutuhkan fasilitas kesehatan.

Karena tidak menggunakan APBN, menurut dia, 16 PSN tersebut membutuhkan percepatan perizinan, fasilitas terkait dengan lahan, dan fasilitas pembiayaan. "Kalau insentif itu kebanyakan untuk memperoleh tanah dan perizinan," katanya.

Di sisi lain, kata Airlangga, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, pemerintah berfokus mengembangkan penyediaan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah melalui pembangunan PSN. Proyek strategis tersebut terdiri dari berbagai sektor, seperti penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan hilirisasi industri.

Secara kumulatif sejak 2016 hingga 2023, tercatat 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program telah beroperasi sebagian, serta 44 proyek dan tiga program dalam tahap konstruksi.

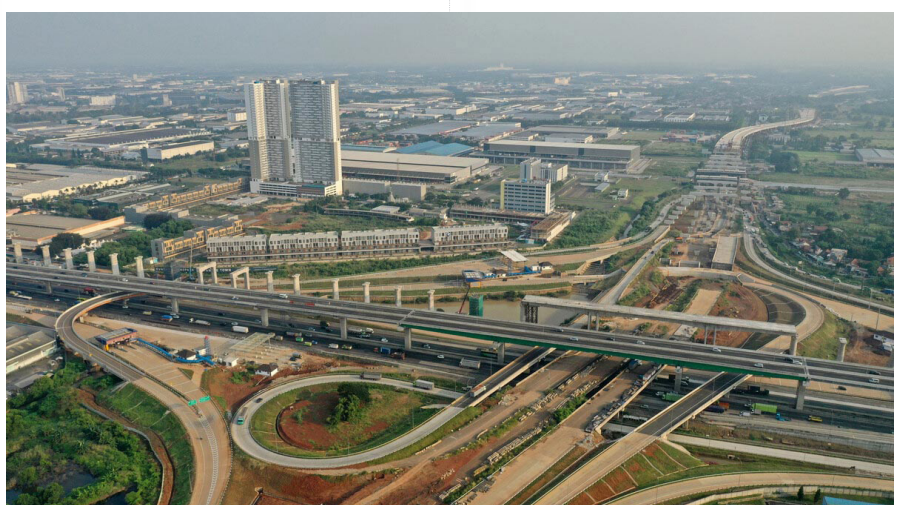
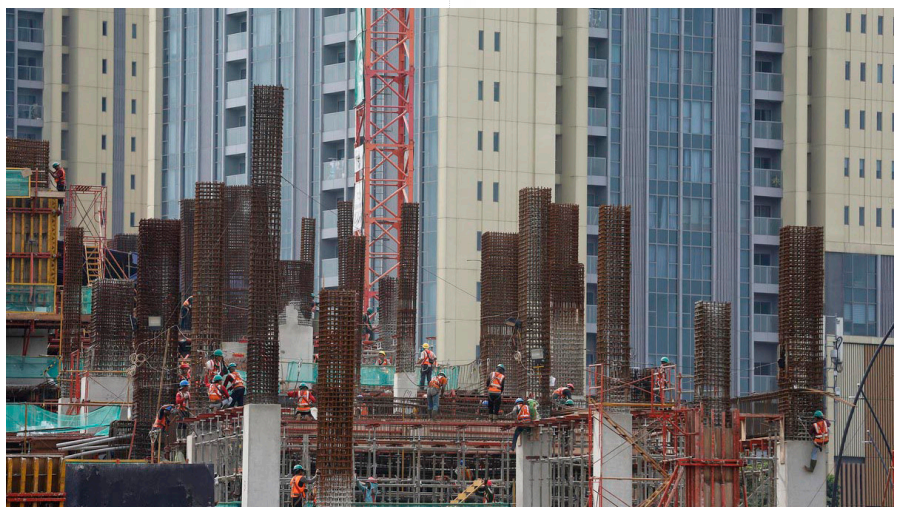
Seluruh PSN tersebut diestimasikan memberikan dampak output perekonomian mencapai Rp3.344 triliun secara nasional dan dengan penyerapan tenaga kerja langsung 2,71 juta orang.

Dia mengatakan, pemerintah juga memahami peran vital komoditas mineral kritis dalam mendukung transisi dan ketahanan energi, antara lain sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai.

Untuk itu, secara khusus pada sektor pengolahan mineral, pemerintah telah

melakukan program pengembangan sembilan smelter nikel dengan estimasi output mencapai 2,5 juta ton per tahun dan empat smelter fasilitas pengolahan bauksit dengan estimasi output mencapai tiga juta ton per tahun.

Pada tahun ini, pemerintah menges-timasikan untuk dapat menyelesaikan 41 PSN senilai Rp554 triliun. ●





MENANTI PANSEL CAPIM KPK PILIHAN JOKOWI

Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan selesai akhir tahun ini. Sesuai ketentuan, Presiden Joko Widodo akan segera menentukan pilihan nama-nama panitia seleksi dalam menyaring calon pimpinan KPK terpilih untuk periode selanjutnya.

Saat ini, pimpinan KPK periode 2019-2024 tinggal menyisakan Nawawi Pomolango sebagai ketua dan dibantu Johanis Tanak, Alexander Marwata, Nurul Ghufon yang masing-masing menjabat wakil ketua. Posisi pimpinan KPK lowong satu usai Firlu Bahuri dicopot per November 2023 setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan kepada Syahrul Yasin Limpo.

Sejatinya, panel pimpinan KPK akan dibentuk Presiden Jokowi pada pertengahan 2023. Namun, saat itu gugatan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufon, di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dikabulkan. Masa jabatan Pimpinan KPK yang seharusnya berakhir pada akhir 2023 diperpanjang hingga akhir 2024.

Istana mengatakan panel capim KPK masih dalam proses pembentukan. Panel capim KPK akan diumumkan bulan ini.

"Pembentukan Pansel Capim KPK masih dalam proses yang rencananya akan diumumkan pada bulan ini," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwiipayana, Rabu, 8 April 2024.

Dia belum menjelaskan berapa orang akan masuk dalam panel capim KPK. Dia mengatakan panel capim KPK yang dibentuk Presiden Jokowi akan bertugas melakukan seleksi terhadap para calon Pimpinan KPK sebelum menyerahkannya ke DPR untuk tes uji kepatutan.

Ari menuturkan, komposisi Pansel Capim KPK bakal lebih banyak nama dari unsur pemerintah. Keanggotaan panel tersebut akan berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat yang akan ditetapkan melalui keputusan presiden.

Belum ada pengumuman mengenai siapa saja sembilan nama tersebut. Namun, Ari menjamin nama-nama itu

pasti sesuai harapan masyarakat.

"Nama-nama calon anggota Pansel Capim dan Dewas KPK masih terus digodok dengan memperhatikan harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan anggota Pansel yang kredibel dan berintegritas," kata Ari.

Sosok Berintegritas

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai pansel tersebut akan menjadi harapan terkait nasib pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pansel pimpinan KPK kali ini akan jadi sorotan karena di sana harapan pemberantasan korupsi ada. Kita tahu pansel yang lalu yang memilih Firlu dkk ternyata pilihan mereka dari 10 dan 5 dipilih DPR ternyata malah membuat permasalahan di KPK," kata Yudi.

Yudi mengatakan kualitas pimpinan KPK periode 2024-2029 akan tergantung dari kerja pansel. Jika pansel diisi orang-orang berintegritas, publik bisa berharap memiliki pimpinan KPK berkualitas.

"Pansel sekarang harus dilihat nama-namanya, kalau namanya tidak berintegritas, rekam jeaknya buruk, bahkan anti-pemberantasan korupsi, maka akan selesai. Karena dari pansel yang buruk tidak akan menghasilkan pimpinan KPK yang baik," katanya.

Dia juga mendesak para anggota pansel terpilih nantinya harus memiliki ketegasan dalam menyaring nama-nama calon pimpinan KPK. Pansel diharapkan tidak segan mencoret sosok yang terbukti memiliki rekam jejak yang buruk.

"Pansel ini harus benar-benar berkaca dari yang lalu. Ada sedikit permasalahan dari calon pimpinan KPK mau itu etik, bahkan mungkin juga ada hal yang kontroversi, udah, coret saja," ucap Yudi.

Yudi juga meyakini pansel yang diisi oleh orang-orang berintegritas juga akan membangun semangat masyarakat untuk berkontribusi ikut maju dalam kontestasi pimpinan KPK.

"Pansel nanti 9 orang baik yang untuk memilih Dewas maupun pimpinan KPK itu harus mempunyai rekam jejak yang baik, sehingga ada kepercayaan masyarakat bahwa mereka akan memilih calon pimpinan KPK yang baik.

Kalau panselnya baik, orang-orang baik akan berbondong-bondong untuk mendaftar," tutur Yudi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meminta Presiden Jokowi tidak salah memilih para anggota Pansel. ICW menyoroti kerja pansel pimpinan KPK pada 2019. Hasil kerja pansel kala

karena disinyalir melakukan praktik korupsi. Ini tentu menjadi bukti konkret betapa buruknya proses seleksi pimpinan KPK periode sebelumnya," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

ICW kemudian melontarkan tiga kriteria untuk menjadi pertimbangan Jokowi dalam menyusun anggota



Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana

itu justru menghasilkan pimpinan KPK yang bermasalah.

ICW mengatakan kerja pansel periode 2019 tidak mendengarkan kritik dan masukan masyarakat. Anggota pansel pun dinilai memiliki kepentingan tertentu dalam pemilihan calon pimpinan KPK.

"Dua orang yang sebelumnya diklaim terbaik oleh Pansel (Firlu Bahuri dan Lili Pintauli Siregar) ternyata melanggar etik, bahkan diproses hukum

Pansel Capim KPK periode 2024-2029. Pertama, anggota Pansel harus memiliki kompetensi.

"Presiden harus menunjuk figur yang memahami kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia secara utuh dan mengetahui permasalahan-permasalahan di KPK belakangan waktu terakhir. Sehingga, orientasi kerja pansel berbasis realitas permasalahan sebenarnya," ujar Kurnia.

Anggota Pansel juga diwajibkan me-

miliki integritas. Kurnia mengatakan rekam jejak para anggota panel harus dipelototi oleh publik.

"Dalam hal ini, rekam jejak kandidat calon Panel harus benar-benar diperhatikan, baik hukum maupun etika. Sebab, bagaimana mungkin Panel bisa menemukan kandidat calon komisioner maupun Dewan Pengawas yang klir jika mereka saja memiliki rekam jejak buruk?" katanya.

"Jangan sampai Panel yang terpilih justru memiliki afiliasi khusus dan memanfaatkan proses seleksi sebagai sarana meloloskan kandidat tertentu," ujar Kurnia.

Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Presiden Jokowi mempertimbangkan rekam jejak saat melakukan seleksi panel capim KPK. Koalisi Masyarakat Sipil meminta Jokowi memilih panel capim KPK yang teruji

serta integritas yang teruji," kata Peneliti Transparency International Indonesia (TPI), Izza Akbarani.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Transparency International Indonesia, IM57+ Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), serta Indonesia Corruption Watch (ICW). Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta proses seleksi dan pemilihan panel dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Proses seleksi dan pemilihan Panel dilakukan secara terbuka dan melibat-



Mantan Komisioner KPK, Busyro Muqoddas



Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap

ICW juga berharap anggota Panel Capim KPK terbebas dari konflik kepentingan. Kurnia mengatakan Jokowi harus teliti dalam melihat latar belakang para anggota Panel untuk mencegah adanya kepentingan yang disusupi di dalam Panel.

integritasnya dalam pemberantasan korupsi.

"Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Presiden untuk menyelenggarakan seleksi dan pemilihan panel dengan mempertimbangkan kriteria rekam jejak dalam pemberantasan korupsi



Nah, ini kan contoh teladan, boleh berbeda dan bahkan pada waktu itu perdebatannya ada pada masalah ideologi. Ya pada masalah ideologi, sekalipun perbedaan, tetapi dalam pertemanan dan kemanusiaan tetap jalan.

kan partisipasi bermakna masyarakat yang seluas-luasnya," kata Izza.

Izza juga menekankan panel harus memiliki sensitivitas pada tiga isu utama. Tiga isu utama itu adalah independensi KPK, penguatan kembali fungsi trigger mechanism KPK, dan memprioritaskan pencegahan korupsi di sektor politik.

Panel sekurangnya harus memiliki sensitivitas pada tiga isu utama, yaitu jatuhnya independensi KPK pasca-revisi UU KPK 2019 dan kebutuhan menghadirkan sosok-sosok yang mampu melawan arus pelemahan independensi tersebut.

"Penguatan kembali fungsi trigger mechanism KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan memprioritaskan pencegahan korupsi di sek-

tor politik," imbuhnya.

Izza mengatakan KPK harus dikembalikan sebagai lembaga negara yang independen. Koalisi Masyarakat Sipil, kata Izza, juga mendesak nantinya pegawai KPK dikembalikan statusnya dari ASN menjadi pegawai lembaga KPK.

"KPK harus dikembalikan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dengan cara kembali mengubah undang-undang KPK, di mana KPK harus dikeluarkan dari rumpun eksekutif, pegawai KPK harus dikembalikan statusnya dari ASN menjadi pegawai lembaga KPK, SDM KPK harus sepenuhnya dikelola dan diisi oleh KPK secara mandiri dan independen," paparnya.

Lebih lanjut, Izza menegaskan KPK juga perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh seperti penegakan kode etik dengan sanksi yang tegas. Izza lalu menyinggung mantan Ketua K P K Firlir

Bahuri yang kini tersandung kasus tindak pidana.

"KPK juga perlu meninjau ulang desain integritas internal untuk memetakan kelemahan sistem yang menyebabkan begitu banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan insan kpk dalam kurun empat tahun terakhir, termasuk yang berujung pada tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan KPK, khususnya Ketua KPK Firlir Bahuri," katanya.

Mantan Komisioner KPK, Busyro Muqoddas, menyebut kualitas bakal anggota panel calon pimpinan KPK tahun ini diragukan jika sepenuhnya ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Dia mendesak adanya proses demokrasi dalam penunjukan anggota Pansel KPK.

"Kami desak panel itu tidak langsung

sepihak dipilih Presiden Jokowi," katanya dalam diskusi bertajuk Kawal Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024 di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024.

Desakan Busyro tak lepas dari kenyataan sebagian pimpinan KPK 2019-2024 tersandung masalah, yaitu Firlir Bahuri dan Lili Pintauli Siregar.

Firlir Bahuri saat ini berstatus sebagai tersangka dugaan pemerasan sementara Lili Pintauli mengundurkan diri karena diduga melanggar kode etik.

Firlir Bahuri dan Lili Pintauli Siregar beserta delapan orang lain diloloskan oleh panitia seleksi yang dipimpin Yenti Garnasih untuk kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Dewan akhirnya memilih Firlir dan Lili bersama Alexander Marwata, Nurul Ghufro, dan Nawawi Pomolango sebagai petinggi lembaga antirasuah.

"Kami sulit percaya jika panselnya seperti yang kemarin itu, dengan hasil KPK yang dimutilasi seperti sekarang ini," kata Busyro.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan, seleksi pansel bisa dilakukan secara terbuka dengan melibatkan koalisi masyarakat sipil yang berfokus pada gerakan antikorupsi. "Kalau panselnya tujuh, bisa dibuat tiga kali (proses) berarti 21 orang yang diusulkan," kata Busyro.

Nama-nama yang diusulkan untuk menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK itu juga mesti diumumkan ke publik, untuk dinilai kapasitas dan kapabilitasnya dari tiap-tiap orang. "Dengan pendekatan ini, diharapkan KPK dapat dikembalikan seperti dulu, yang demokratis (tidak ada kendali kekuasaan)," kata Busyro. •



Peneliti ICW,
Kurnia Ramadhana



Peneliti Transparency International
Indonesia, Izza Akbarani

TOXIC

Gunawan Effendi

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto tak membawa toxic person (orang beracun, bermasalah) ke dalam pemerintahan seperti menyengat dinamika politik dalam negeri dalam proses transisi pemerintahan. Ya, menjadi perhatian publik sebagaimana terlihat dari jumlah pembaca yang membuka berita mengenai orang toxic di pemerintahan itu.

Di momen-momen transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden yang terjadwal pada 2024, Menko Luhut mengemukakan pesannya ke Prabowo yang memenangi Pilpres. "Untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ujar Luhut dalam acara "Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Hotel JW Marriott Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. "Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," kata dia.

Salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintahan yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,'" katanya.

Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Luhut meyakini ke depannya, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Pada 2045, kata dia, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.

Tentu saja pernyataan Luhut yang tak menyebut nama atau lembaga regulator toxic itu menimbulkan banyak tanda tanya. Entahlah apakah Luhut mengemukakan nama-nama itu ketika berbicara di depan Presiden dan Presiden terpilih.

Toh ada yang berupaya menafsirkan pernyataan Luhut itu. Intelektual Rocky Gerung, misalnya, melihatnya dari perspektif penyusunan kabinet. Menurut dia, Luhut cemas proposalnya belum diterima oleh Prabowo. "Luhut punya proposal, Jokowi juga

punya proposal," ungkapnya dalam tayangan Youtube saluran Forum News Network yang dipandu Hersubeno Arief.

Lebih dari itu, Rocky menyebut nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa A Muhaimin Iskandar. "Cak Imin itu politisi matang... Yang nggak bisa dikendalikan... Dia proxy Anies juga itu," kata Rocky.

Cak Imin yang ditanya soal toxic mengaku tak mengetahui siapa sosok toxic yang dimaksud Luhut. "Saya juga tidak ngerti maksudnya siapa," kata Cak Imin di sela kunjungan bersama Anies Baswedan di Banda Aceh, Aceh, Jumat malam, 3 Mei 2024.

Rocky juga menyebut Presiden ke-enam Susilo Bambang Ydhoyono. "...Banyak juga yang toxic dilihat dari perspektif Pak SBY," ungkapnya.

Menurut dia, toxic itu menyangkut pewarnaan kabinet terkait berapa portofolio (kursi) yang diperoleh Demokrat. "Kita lihat nanti berapa dan apa kata SBY," sambung Rocky.

Jadi, sambung Rocky, tak mungkin kita menggunakan istilah resmi toxic person atau toxic politician. "Itu juga semua politisi itu toxic sebetulnya tuh," ujarnya.

Tapi ungkapan Luhut mengenai toxic sebetulnya berada dalam konteks pro-kontra terhadap policy (kebijakan) digitalisasi sistem pemerintahan. Jika toxic itu dikaitkan dengan digitalisasi, ada fakta menarik, yakni segera beroperasinya Starlink, penyedia jasa layanan internet dari Amerika Serikat yang lekat dengan nama pendirinya: Elon Musk.

"Secara resmi, kami akan meluncurkan Starlink dalam waktu dua minggu dari sekarang," ujar Menko Luhut masih di acara yang berlangsung di Hotel JW Marriott Jakarta. Ia mengemukakan

peluncuran Starlink berdampak baik bagi Indonesia karena terdapat banyak titik buta di Indonesia yang membutuhkan akses ke internet.

Menko Luhut menambahkan bahwa saat ini Indonesia bersama Starlink sudah menandatangani kesepakatan dan lisensi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan internet berbasis satelit tersebut di Indonesia. "Saya sudah berbicara dengan Elon (Elon Musk, pemilik Starlink) hari ini, tiga hari yang lalu. Kami akan melakukan sesuatu, namun belum secara resmi kami umumkan. Saya rasa, kami akan mengumumkan hal itu di Bali secepatnya," kata Luhut di acara yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Observer Research Foundation (ORF). ●





NFO KHUSUS

BEA CUKAI ANTARA ASAP DAN API

**Tak ada asap jika
tiada api. Kelu-
han terhadap
layanan petugas
Bea dan Cukai
adalah asapnya.
Apinya? Ya regu-
lasi.**



Seorang pria merobek tas bermerek Hermes karena keberatan membayar bea masuk impor yang dikenakan terhadap barang bawaannya. Ya, Hermes sudah dikenal luas sebagai merek tas mahal dan kerap menjadi tayangan flexing (pamer kekayaan).

Dalam tayangan video di media sosial yang mulai viral pada 1 Mei 2024 itu, tampak seorang perempuan petugas Bea dan Cukai (BC) mengamati barang bawaan penumpang yang melintasi terowongan perangkat pemindai X Ray. Petugas kemudian memeriksa barang

tuk tas ini ya seharga 36.800 Hongkong Dollar. Kalau dikurs di USD jadi 4.000," ucap si petugas.

Penumpang pria lalu mengatakan bahwa tas itu dibeli seharga 1.000 USD. "Mbak saya belinya 1.000 Dollar nih Mbak," ungkapnya.

"Tapi ini gimana?" jawab si petugas seraya memperlihatkan invoice Hermes yang diberikan oleh si penumpang wanita.

"Gini aja mbak, diambil aja siapa yang mau 1.000 Dollar kayak gitu. Gak apa-apa," sahut pria tersebut.

"Kita nggak beli tas juga Pak, jadi gi-

gal aja deh Mbak," sahut penumpang.

Tak urung petugas BC mengarahkan penumpang tadi ke ruang pemeriksaan untuk diminta keterangan lebih lanjut. Tapi penumpang bersikeras kepada petugas dengan mengatakan tas Hermes yang mereka bawa merupakan barang palsu.

Hitung punya hitung, bea yang harus dibayar oleh sepasang penumpang itu mencapai sekitar Rp 26.557.000. Alhasil, pasangan itu lebih memilih merobek tasnya.

"Saya ndak terima lho Pak. Saya robek saja boleh Pak? Saya robek aja," kata si



bawaan sepasang penumpang yang tiba dari luar negeri dan hendak keluar dari area pabean, diperkirakan berada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

Rupanya pasangan penumpang tersebut membawa sebuah tas mewah bermerek Hermes. Langsung saja petugas meminta invoice (kuitansi tagihan) tas tersebut untuk mengecek harganya.

"Oh ini invoice-nya ya," kata si petugas BC. Selanjutnya petugas menjelaskan bahwa pembawa tas itu harus membayar pajak atas barang bawaannya karena sudah melebihi batas pembebasan bea masuk.

"Nah ternyata ini kan ada invoice un-

mana dong," sahut petugas.

Si penumpang kembali menegaskan bahwa tas Hermes itu adalah palsu. Malah ia bersumpah tas mewah itu dibeli seharga 1.000 Dollar.

"Yang ini palsu kok, saya berani sumpah belinya 1.000 Dollar," tegas penumpang pria yang menolak untuk membayar pajak.

Sedangkan yang sudah dicek oleh petugas, kata penumpang, bukanlah invoice tas Hermes bermasalah itu.

"Seumpama ada invoice aslinya, gak apa-apa pakai invoice aslinya," jelas petugas.

"Gak ada invoice. Ini palsu, saya ting-

penumpang pria.

Penumpang perempuan pun bereaksi. "Buang sampah, di mana tong sampahnya?" ungkapnya dengan nada ketus.

Beberapa tayangan video juga menayangkan bea mahal yang harus dibayarkan warga melalui instansi BC. Malah bisa saja terjadi nilai yang harus dibayar jauh lebih mahal dari harga barang impor bawaan penumpang atau paket kiriman dari luar negeri melalui perusahaan jasa titipan (jastip). Seperti pengalaman Radhika yang juga viral di media sosial.

Lelaki bernama Radhika itu berkisah membeli sepatu khusus sepak bola dari

luar negeri dengan harga sekitar Rp10 juta yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan oleh jasa pengirim, Radhika haru membayar bea masuk Rp31,81 juta.

Ia pun mempertanyakan besaran bea masuk tersebut. "Halo Bea Cukai, gua mau nanya sama kalian, kalian tuh netapin bea masuk dasarnya apa ya?" ujarnya.

"Gua kan baru beli sepatu, gua beli ini sepatu harganya Rp10,3 juta, shipping Rp1,2 juta, total Rp11,5 juta," sambung Radhika.

Cukai (DJBC) pun menanggapi keluhan Radhika. Melalui akun resmi X (twitter), @beacukaiRI, instansi ini menjelaskan, besaran bea masuk Rp31,81 juta ditetapkan dengan menghitung denda administrasi atas pengiriman yang dilakukan importir atau jasa kiriman bersangkutan, yakni DHL.

Pengenaan denda disebabkan kesalahan penetapan nilai pabean atau CIF (cost, insurance, freight). Semula, DHL memberitahukan CIF atau nilai pabean atas barang yang dibeli oleh Radhika sebesar 35,37 dollar AS atau Rp562.736.

Namun, setelah dilakukan pemerik-

sal tagihan yang dikenakan sebesar Rp30,93 juta.

"Besaran sanksi administrasi berupa denda dikenakan sesuai PP Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan," ungkap DJBC.

Dengan adanya pengenaan sanksi administrasi tersebut, DJBC mengimbau kepada Radhika untuk berkonsultasi dengan jasa kiriman yang digunakan, yakni DHL.

"Adapun status pemeriksaan serta rincian tagihan dapat diakses secara terbuka dan real time oleh pemilik barang



"Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, Rp31.810.343, itu perhitungan dari mana?" ungkapnya.

Menurut hitungan Radhika, total besaran bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan seharusnya hanya sekitar Rp5,89 juta. "Dan ini juga perhitungan yang gua pakai menggunakan aplikasi kalian, Mobile Bea Cukai, Rp5,8 juta," katanya.

Ia mengemukakan, tidak masuk akal jika besaran bea masuk lebih besar dari barang yang dibeli. "Tolonglah Bea Cukai, sekarang mana ada sih bea yang lebih besar dari barangnya," ucap dia.

Rupanya Direktorat Jenderal Bea dan

saan, nilai pabean atas barang tersebut adalah 553,61 dollar AS atau Rp8,81 juta. "Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3," kicau DJBC.

DJBC pun merincin besaran bea masuk dan pajak impor sepatu bola bermasalah itu: Bea masuk 30 persen sebesar Rp2,64 juta, PPN 11 persen Rp1,26 juta.

Kemudian, PPh impor 20 persen Rp2,29 juta dan sanksi administrasi Rp24,74 juta. Dengan demikian, to-

melalui beacukai.go.id/barangkiriman atau dengan menghubungi @bravobeacukai dan Kantor Pelayanan Bea Cukai yang menangani paket," tulis DJBC.

Ihwal sepatu bola Radhika ini, tak kurang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapinya. Harap maklum, DJBC memang salah satu portofolio kementeriannya.

Bu Menkeu mengemukakan pada kasus itu ditemukan indikasi bahwa harga yang diberitahukan perusahaan jasa titipan (PJT) dalam hal ini DHL lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing). Oleh sebab itu, BC mengoreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk

• INFO KHUSUS

dan pajaknya.

"Saudara Radhika Althaf mengeluhkan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. Sesudah diteliti, ternyata ditemukan bahwa persoalannya adalah pada nilai sepatu tersebut yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL, di mana nilai yang dilaporkan oleh DHL lebih rendah dari harga sebenarnya," kata Menkeu Ani dalam penjelasannya yang diunggah di akun Instagram resminya, Minggu, 28 April 2024.

Atas kesalahan tersebut, pembayaran denda membuat harga sepatu impor Rp 10 juta dikenakan bea masuk Rp 31 juta.

Sri Mulyani menyebut denda itu dikenakan kepada DHL.

"Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, jadi bukan oleh saudara Radhika Althaf. Saat ini masalah ini sudah selesai. Sepatu tersebut telah diterima oleh penerima barang dan kewajiban kepabeanan telah diselesaikan," ungkap Bu Menkeu.

Selanjutnya Sri Mulyani meminta jajaran BC meningkatkan lagi perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai K/L yang harus dilaksanakan sesuai am-

anat undang-undang (UU). "Saya minta kepada Bea Cukai untuk terus bekerja sama dengan para stakeholder karena saya sangat yakin bahwa di era digital ini banyak sekali masyarakat tentu akan memberikan masukan feedback dan itu sangat bermanfaat. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat untuk memperbaiki Bea dan Cukai," ujar Menkeu Ani.

Lebih dari sekadar portofolio, tanggapan Menkeu Ani sebenarnya terkait dengan regulasi yang ia tandatangani. Terutama Peraturan Menteri Keuangan



(PMK) Nomor 96 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Peraturan ini mengatur tentang kegiatan impor barang yang dilakukan oleh lokapasar, e-commerce dan sebagainya yang disebut sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Elektronik atau PPMSE.

Ketentuan tersebut sebenarnya sudah ditandatangani pada 15 September 2023 dan diundangkan pada 18 September. Awalnya, PMK ini akan berlaku 60 hari setelah diundangkan, pertengahan November persisnya. Namun, pemerintah memutuskan untuk mempercepat penerapan aturan tersebut pada 17 Oktober 2023.



Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi mengemukakan aturan yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2023 ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan dengan aturan sebelumnya. "Latar belakang mengapa terbit PMK ini, di samping untuk melindungi UMKM juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mengurangi impor barang konsumsi," kata dia dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023.

Serangkai dengan itu, pada Kamis, 26 Oktober 2023, tiga menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuan-

gan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menggelar kegiatan pemusnahan barang impor ilegal senilai Rp49,951 miliar. Kegiatan itu dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu Airlangga mengatakan, barang impor yang dimus-

Zulhas dalam kesempatan yang sama mengemukakan untuk total nilai barang impor yang dimusnahkan itu mencapai Rp50 miliar atau Rp49,951 miliar.

"Total nilai yang akan dimusnahkan atau dihibahkan nilainya hampir Rp50 miliar, Rp49,951 miliar ya. Jadi hampir Rp50 miliar, memang sebagian besar pakaian tadi," jelasnya.



nahkan itu antara lain pakaian bekas, besi baja non standar, alat kesehatan, makanan minuman. Kemudian alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, mainan anak, elektronik yang tidak memiliki manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan SNI. "Banyak asosiasi yang melakukan komplain dan tentunya barang impor yang ilegal ini sangat mengganggu performance UKM atau IKM kita," kata Airlangga di lokasi kegiatan.

Adapun tindakan yang dilakukan Pemerintah atas impor barang ilegal yang sudah disita itu, dilakukan dengan pemusnahan dan hibah. Mendag-

Zulhas menambahkan tindakan yang dilakukan Pemerintah ini akan melindungi pelaku usaha di dalam negeri. "Mudah-mudahan kerja sama terus seperti ini, yang selama ini sudah baik kita akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan terus kerja sama seperti yang kita lakukan, maka industri dalam negeri terlindungi dan juga untuk kita bisa ber-teman dengan baik," ujarnya.

Jadi, apinya sudah menyala sejak Oktober 2023. Sedangkan asapnya masih memedihkan mata; setidaknya hingga Mei tahun berikutnya. Bea dan Cukai berada di tengah-tengahnya. ●

SETELAH 7 BULAN PERJALANAN

Hanya dalam pekan pertama Mei 2024, viral sudah puluhan video yang isinya teridentifikasi kesaksian warga yang tiba dari luar negeri terganggu kenyamanannya saat menjalani pemeriksaan petugas Bea dan Cukai. Belum lagi rangkaian pemberitaan media online yang menambah narasinya.

Boleh jadi itu adalah kampanye, upaya untuk mempengaruhi pandangan atau opini publik. Tayangan video yang viral itu tampak spontan, namun terekam leluasa baik secara audio

maupun visual. Toh dari tanggapan-tanggapan netizen, warga yang aktif di media sosial, tayangan itu lebih memicu tanggapan negatif terhadap personel dan institusi jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dengan kata lain, tayangan video itu lebih bersifat kampanye negatif, bahkan hitam jika mengandung misinformasi hingga hoax (kabar bohong).

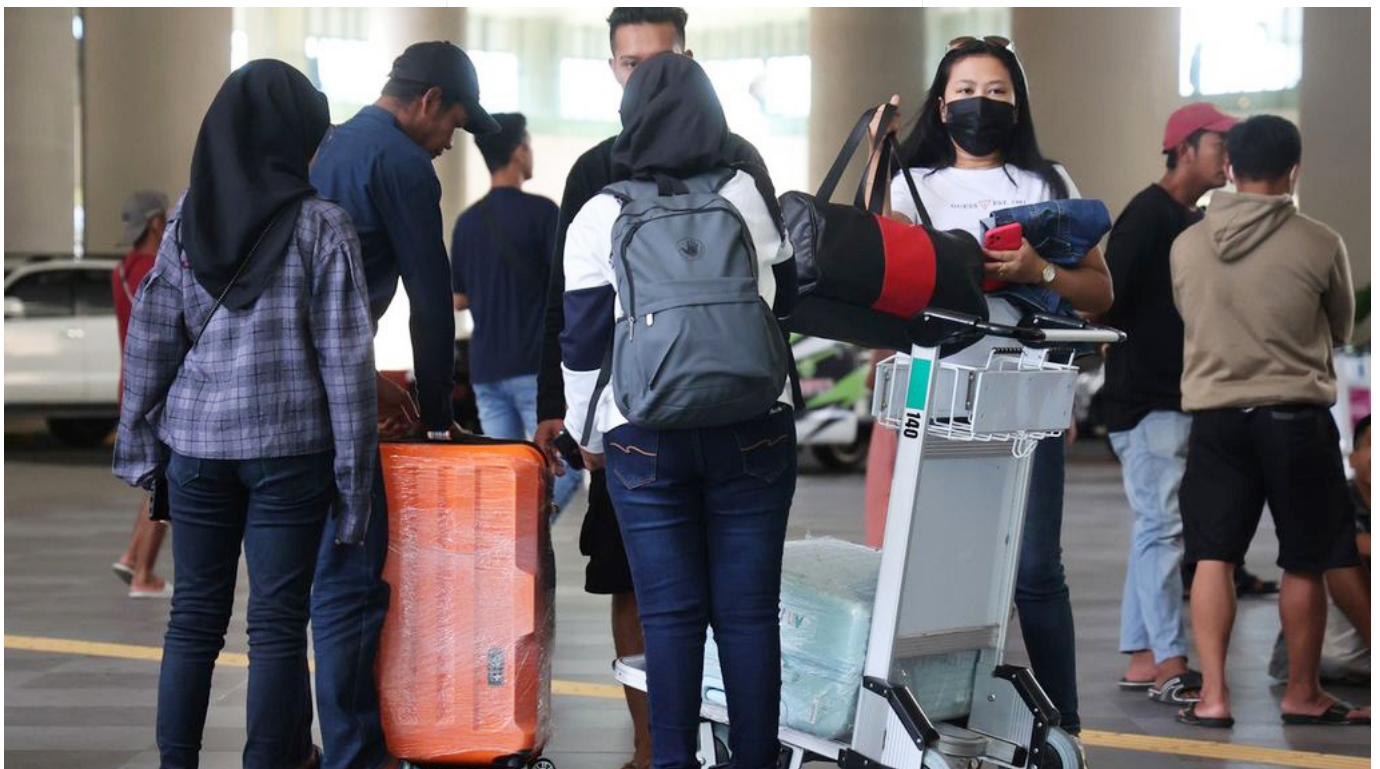
Lebih dari itu, muncul dugaan bahwa tayangan-tayangan tadi merupakan kegiatan intelijen yang sistematis. Kegiatan intelijen, salah satu batasan-nya adalah upaya dan tindakan yang mencakup investigasi, pengamanan, maupun penggalangan yang bersifat taktis maupun strategis. Toh Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya memiliki lengan intelijennya sendiri.

Tak urung, pengamat intelijen Stepi Anriani pun angkat bicara soal Bea dan Cukai. Dengan berbagai pengala-

man di institusi Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN), Stepi mengemukakan, isu yang beredar belakangan ini diduga berasal dari pihak-pihak yang dengan sengaja ingin melemahkan serta merusak citra Bea dan Cukai.

Hal ini termasuk pada isu Bea Cukai yang dituduh menggunakan buzzer untuk menaikkan reputasi. "Entah apa motifnya. Tetapi, apa yang dituduhkan bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik institusi Bea Cukai," ungkapnya dalam pernyataan resmi, Selasa, 7 Mei 2024.

Ditjen Bea Cukai sendiri telah membantah telah menyewa jasa konten kreator atau influencer sebagai buzzer di media sosial. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto menyatakan Bea Cukai tidak pernah ada kontak atau tawaran kerja dengan agensi tertentu untuk me-



nyewa buzzer.

"Kami tidak menggunakan jasa buzzer untuk mendiskreditkan opini masyarakat khususnya terkait apa yang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini," tegasnya, dalam keterangan tertulis Senin, 6 Mei 2024.

Meski demikian, instansi tersebut mengaku pernah bekerja sama dengan beberapa influencer untuk mengedukasi masyarakat umum mengenai layanannya dan memaksimalkan media sosial untuk publisitas mereka. "Namun, kami pernah bekerja sama dengan beberapa influencer dalam mengedukasi masyarakat terkait layanan kepabeanan dan cukai," sambungnya.

Menurut Nirwala, selain menggandeng beberapa influencer, Bea Cukai juga secara aktif dan rutin memberikan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat. "Layaknya organisasi lain yang memahami pentingnya peran media sosial dan influencer dalam membantu menyebarkan dan menyederhanakan informasi yang kami miliki, kami juga turut mengoptimalkan penggunaan fungsi-fungsi tersebut," ujarnya.

Pernyataan tersebut dikeluarkan Bea Cukai setelah content creator dengan akun TikTok @awbimax mengunggah tangkapan layar di akun media sosialnya mengenai tawaran dari sebuah agensi untuk bekerjasama dengan Bea Cukai. Unggahan itu kemudian viral dan mendapat banyak tanggapan dari warganet.

Dalam tayangan TikTok Bima Yudha di akun @awbimax, ia membagikan sebuah tangkapan layar berupa pesan chat dari pihak agensi yang menawarkan dirinya untuk melakukan campaign bersama Bea Cukai. Pihak agensi itu menyebut bahwa kerja sama ini bukan seperti buzzer karena job desk (uraian kerja) Bima kelak adalah membagikan cerita positif tentang pengalaman pribadinya yang berkaitan dengan Bea Cukai.

"Saat ini agensi kami sedang ada campaign bersama dengan lembaga Bea Cukai. Campaign ini bukan seperti buzzer, lebih ke POV (point of view, sudut pandang) seorang KOL (key opinion leader, pengarah opini kunci)

terkait pengalaman mereka yang berhubungan dengan Bea Cukai," kata agensi.

Sedangkan Bima mematok harga yang sangat mahal, yakni Rp100 juta per video. Selanjutnya, tayangan video itu pun memicu beragam reaksi netizen, antara lain, Bea Cukai salah memilih influencer yang bisa diajak untuk kerja sama.

Alasannya, Bima dikenal sebagai influencer yang kerap mengkritik pemer-

bermasalah juga mendukung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjalankan semua tugas dan program Kemenkeu," sambungnya.

Ia berharap masyarakat memberikan dukungan bagi Bea Cukai, khususnya bagi para pegawainya yang berkinerja baik. "Bea Cukai adalah milik publik dan negara yang harus dijaga martabat dan wibawanya," ungkap Stepi yang berpengalaman menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan



intah. "Tercium Bea Cukai sedang memperbaiki nama baiknya," ungkap salah satu netizen.

Sedangkan Stepi mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bea Cukai merupakan tumpuan bagi negara yang fokus membantu persoalan keuangan, fiskal, membantu penerimaan negara, dan menjaga stabilitas negara dari krisis ekonomi dunia. "Hal itu terbukti dengan tidak menghalangi penyelidikan dan penyidikan anggotanya yang

dosen intelijen di Universitas Indonesia.

Menurut dia, masyarakat seharusnya tidak menjadikan kesalahan oknum sebagai dosa institusi serta turut mendukung perbaikan yang dilakukan Bea Cukai. "Jika oknum lembaga terlibat maka harus dievaluasi, bukan lembaga kemudian dicaci maki. Karena, masih banyak pegawai yang berdedikasi dan tulus dalam bekerja," ujar Stepi yang juga menggeluti bisnis coffee shop (kedai kopi) di kawasan Jakarta Selatan.

Toh apakah sekadar kampanye atau kegiatan intelijen, rangkaian aneka tayangan video mengenai Bea Cukai pada akhirnya terkait dengan sisi politik berupa kebijakan (policy) pemerintah yang pelaksana lapangannya adalah institusi berseragam biru itu. Dalam konteks negara, pengguna akhir (end user) lembaga intelijen adalah kepala pemerintahan, Presiden.

Nah, kebijakan yang terkait dengan tayangan-tayangan video tentang Bea dan Cukai itu dapat ditelusuri dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mengetatkan sejumlah impor barang pada awal Oktober 2023, tujuh bulan

yang diubah ada 327 kode pos untuk produk tertentu, untuk pakaian jadi ada 328 kode pos, dan untuk tas ada 23 kode pos. Selain itu, lanjut Airlangga, ada perubahan aturan pengawasan barang-barang yang dilarang atau dibatasi (lartas) menjadi border atau diawasi dalam kawasan pabean.

"Saat sekarang yang sifatnya post-border (setelah melintas batas negara) diubah menjadi border (di batas negara). Dengan persetujuan impor dan juga laporan surveyor. Indonesia sendiri sudah menangani beberapa komoditas baik yang ada lartas itu ada 60 persen dan nonlartas ada 40 persen,"



sebelum Stepi Anriani melihatnya dari sudut pandang intelijen.

Pada Jumat, 6 Oktober 2023, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berbicara kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. "Pemerintah, tadi arahan Bapak Presiden untuk fokus kepada pengetatan impor komoditas tertentu, komoditas yang dipilih adalah mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, dan juga produksi tas," ujar Airlangga.

Airlangga menyebut bahwa jumlah Harmonized System Code (HS Code)

jelasan.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengawasan kepada importir umum, dari awalnya post-border menjadi border. Akibat dari perubahan post-border menjadi border tersebut, kata Airlangga, maka ada regulasi yang harus diperbaiki di sejumlah kementerian/lembaga.

"Jadi peraturan menteri pertanian harus dilakukan perubahan, (menteri) perdagangan, (menteri) perindustrian, Badan POM, kemudian Kementerian Kesehatan, menteri ESDM (energi dan sumber daya mineral), dan (menteri) kominfo (komunikasi dan informatika). Bapak Presiden minta peraturan menteri turunannya ini bisa segera direvisi dalam waktu dua minggu," ucapnya.

Begitu banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kebijakan ini. Sedangkan Bea dan Cukai adalah instansi yang paling intens berurusan langsung dengan arus keluar-masuk barang di perbatasan negara. Maka implikasinya, Bea Cukai pula yang lebih banyak tersorot dibandingkan misalnya dengan jajaran Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau badan karantina Kementerian Pertanian.

Mudah dipahami, kebijakan pembatasan impor itu pun sudah melalui kegiatan intelijen, setidaknya kajian, mengenai ketahanan ekonomi nasional terkait neraca perdagangan (balance trade), kondisi pasar dalam negeri,



Namun, kami pernah bekerja sama dengan beberapa influencer dalam mengedukasi masyarakat terkait layanan kepabeanan dan cukai.

serta prediksinya di masa mendatang. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Moe-giarso mengatakan kebijakan yang diambil ini dipicu oleh adanya serbuan barang impor, terutama dari China.

"Ada dampak dari ketegangan antara US dengan China kan sehingga dari dampak itu barang-barang produksi yang ada di China itu kan juga enggak bisa masuk ke pasar US, EU, sehingga kan dia nyari pasar," kata Susi, Selasa, 10 Oktober 2023.

Akibatnya, China mengarahkan barangnya ke Asia, terutama Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan pasar besar. Barang China ini menyerbu pasar-pasar di dalam negeri termasuk pasar tradisional. ●

6 POIN PENTING KIRIMAN BARANG LUAR NEGERI

Memang soal teknis, tapi penting dipahami. Itulah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Peraturan ini mengatur tentang kegiatan impor barang yang dilakukan oleh lokapasar, e-commerce dan sebagainya yang disebut sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Elektronik atau PPMSE.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Fadjar Donny Tjahjadi menuturkan aturan yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2023 ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan dengan aturan sebelumnya. "Latar belakang mengapa terbit PMK ini, di samping untuk melindungi UMKM juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mengurangi impor barang konsumsi," kata dia.

Berikut ini enam poin penting dalam PMK 96 Tahun 2023:

1. Skema kemitraan PPMSE dan DJBC

Perbedaan pertama adalah pada skema kemitraan antara PPMSE dan Ditjen Bea Cukai. Dia mengatakan dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 199 Tahun 2019, pola kemitraan bersifat opsional. Namun, dalam PMK 96 kemitraan antara PPMSE dan Ditjen Bea Cukai bersifat mandatori (wajib). Kemitraan itu khususnya diwajibkan kepada PPMSE yang melakukan impor lebih dari 1.000 kiriman barang dalam periode satu kalender.

Dengan kemitraan ini Ditjen Bea Cukai dapat lebih mengawasi barang yang masuk melalui PPMSE. "Untuk dapat menyelesaikan barang kiriman, PPMSE yang bermitra wajib menyampaikan e-catalog dan e-invoice barang kiriman, nanti kami bandingkan Consignment Note barang kiriman itu. Kami harapkan Bea Cukai bisa mengetahui harga sebenarnya barang kiriman itu," kata Donny.

2. Perlakuan PPMSE dalam Sistem

Selanjutnya, perbedaan kedua ada-

lah perlakuan PPMSE dalam proses importasi barang kiriman. Sebelumnya, PPMSE dianggap sebagai mitra Ditjen Bea Cukai. Namun, dalam PMK 96 2023, PPMSE dianggap sebagai importir.

Donny mengatakan e-commerce yang melakukan impor barang itu dianggap sangat mengetahui mengenai transaksi, hingga pengangkutan barang dari luar negeri yang mereka lakukan. Dengan penetapan status sebagai importir ini, kata dia, maka PPMSE menjadi pihak yang akan dimintai tanggung jawab apabila terjadi kesalahan data impor yang diserahkan ke Bea Cukai.

"Nanti yang bertanggung jawab adalah importir dalam hal ini PPMSE, termasuk terkait pengenaan sanksi administrasi berupa denda kalau mereka melakukan pemberitahuan yang salah," kata Donny.

3. Jenis Komoditas yang Terkena MFN

Donny menjelaskan PMK 96 Tahun 2023 menambah empat komoditas baru yang dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN). Sebelumnya dalam PMK 199, sudah ada empat komoditas yang terkena tarif MFN, yakni tekstil dan produk tekstil; alas kaki/sepatu; tas; dan buku. PMK 96 2023, kata Donny, menambah empat komoditas lainnya yang terkena tarif MFN, yakni sepeda (25-40%); jam tangan (10%); kosmetik (10-15%); besi dan baja (0-20%). Donny mengatakan pengenaan tarif MFN empat komoditas baru ini dilakukan mengingat pesatnya jumlah impor komoditas tersebut. "Impornya sangat tinggi sekali, khususnya kosmetik. Inilah yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan industri dalam negeri," kata dia.

4. Ketentuan terkait Consignment Note

Donny mengatakan dalam PMK baru Consignment Note akan diberlakukan sebagai pemberitahuan pabean. Pengesahan ini, kata dia, dilakukan untuk

memperjelas perikatan hukum antara importir dengan Ditjen Bea Cukai. "Sehingga kalau ada wanprestasi konsekuensinya importir akan bertanggung jawab," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan Bea Cukai juga akan menambahkan elemen data terkait Consignment Note untuk memudahkan post audit dan apabila terjadi pembatalan. Dia mengatakan penegasan mengenai CN ini juga akan mempercepat pelayanan Bea Cukai untuk importir. "Kami ingin tetap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelaku usaha," katanya.

5. Sistem Pemberitahuan Pabean & Penetapan Tarif Pabean

Donny mengemukakan PMK 96 2023 mengubah paradigma sistem pemberitahuan pabean dan penetapan tarif pabean hasil perdagangan dari official assessment menjadi self assessment. Dia mengatakan dalam aturan terdahulu, apabila importir melakukan kesalahan dalam pemberitahuan tidak ada sanksi dari Bea dan Cukai. Namun dalam aturan baru yang menerapkan self assessment ini, kata dia, terdapat konsekuensi sanksi apabila importir melakukan kesalahan pemberitahuan jumlah dan nilai pabean. "Diberikan sanksi berupa denda," kata dia.

6. Ketentuan Ekspor Barang Kiriman

Donny mengatakan PMK 96 2023 tidak hanya mengatur soal impor, tetapi juga ekspor. Menurut dia, aturan ekspor perlu dibuat karena meningkatnya perdagangan lintas negara melalui e-commerce dari Indonesia ke luar negeri. "Kami perlu fasilitasi industri dan UMKM," kata dia.

Menurut Donny, PMK 96 menegaskan tentang batasan kilogram yang bisa diekspor menggunakan dokumen Consignment Note dan pemberitahuan ekspor barang (PEB). Dokumen CN, kata dia, akan diakui sebagai dokumen pemberitahuan pabean ekspor sehingga bisa dipakai untuk mengurus restitusi pajak. ●



ANTARA MEDSOS DAN KEPEDULIAN SOSIAL

Setelah tujuh bulan pengetatan barang impor dan bawaan penumpang bandara internasional oleh petugas Bea Cukai, mungkin masih banyak yang kesal melihat video viralnya di berbagai media sosial. Toh Bea Cukai tetap lekat dengan kepedulian sosial. Dalam evakuasi korban bencana erupsi Gunung Ruang, Sulawesi Utara, salah satunya.

Kapal Negara (KN) dengan Nomor Lambung BC 6002 itu berpangkalan di Pelabuhan Donggala-Pantoloan yang berseberangan, di kawasan teluk dekat Kota Palu, Sulawesi Tengah. Namun, erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau, Tagulandang, Biaro), Sulawesi Utara, justru menjadi unjuk kinerja KN BC 6002 sebagai multiple purposes vessel (MPV), dibandingkan dengan, misalnya mobil sport utility vehicle (SUV).

Sejatinya, KN BC 6002 adalah Fast Patrol Boat (kapal patroli cepat). Bersama KN BC 60001 yang berpangkalan di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan

Riau, kapal ini mulai meluncur pada 2016. Dua kapal inventaris BC yang terbesar di antara ratusan kapal lainnya.

Produksi galangan kapal dalam negeri, PT Dumas Tanjung Perak Shipyards, KN BC 60002 memiliki panjang 60 meter. Tersedia tempat pendaratan helikopter (helipad) di palkanya.

Perangkat water canon, direct launch RIB, dan anti-corrosive ICCP systems menjadi pelengkap lainnya. Sedangkan daya jelajah patrolinya mencapai 3.638 Nautical miles (Nm) setara 6.737 kilometer untuk menjangkau seluruh wilayah perairan Indonesia. KN BC 6002 berpangkalan di PSO Pantoloan dengan pertimbangan dapat menjang-

kau daerah rawan pengawasan di kawasan timur Indonesia: Selat Karimata, kawasan utara Teluk Bitung, hingga sejauh timur ke arah Papua.

Begitulah, kali ini dari Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Pantoloan, KN BC 6002 dapat melayari dengan mudah Selat Makassar menuju Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Pada Kamis, 2 Mei 2024, kapal ini mengevakuasi ratusan warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang dari Dermaga Bahoyi, Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Kepala PSO Bea Cukai Pantoloan, Minhajuddin Napsah, mengungkapkan, proses evakuasi dimulai pada pukul 09.30 Waktu Indonesia Tengah

(WITA) di Dermaga Bahoyi, Kecamatan Tagulandang. Proses evakuasi dilakukan oleh kru Kapal BC 60002 bersama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) Lantamal VIII Manado, Polisi Sektor (Polsek) Tagulandang, dan Badan SAR Nasional (Basarnas) Manado.

Setelah proses evakuasi selesai, kapal tiba dan sandar di Pelabuhan Bitung pada pukul 15.45 WITA. Jumlah pengungsi yang berhasil dievakuasi oleh tim ke kapal patroli Bea Cukai berjumlah 243 orang yang terdiri dari 110 laki-laki dan 133 perempuan. "Rincian korban yang berhasil kami evakuasi terdiri dari 173 dewasa, 51 anak-anak, 14 lansia, tiga orang sakit, dan dua ibu hamil," ujar Minhajuddin, Jumat, 3 Mei 2024.

Tak hanya sekali KN BC 6002 bolak-balik mengevakuasi. Pada Jumat pagi, 3 Mei 2024, sebanyak 83 warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang dievakuasi menggunakan KN BC 6002 dari Pelabuhan Buhias, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), menuju Pelabuhan Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Komandan Kodim 1301 Sangihe Letkol Inf Suhendro Alim Prayogo menjelaskan evakuasi yang dilakukan pada Jumat, 3 Mei 2024 dimulai pukul 07.00 WITA hingga pukul 11.30 WITA. "Kami terus mengawal proses evakuasi warga yang terdampak. Hari ini (Jumat) evakuasi menggunakan KN Bea Cukai sebanyak 83 jiwa" Jelas Letkol Suhendro.

Total 83 warga yang dievakuasi, terdiri dari 35 laki-laki dan 48 perempuan. KN bea Cukai berangkat dari Pelabuhan Buhias, Kecamatan Tagulandang, menuju Pelabuhan Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pada pukul 11.30 Wita.

Selain itu, dari dermaga Tagulandang, tak kurang 337 pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang telah dievakuasi KN BC 6002. Pelaksanaan evakuasi dari pelabuhan Tagulandang menuju dermaga TNI AL di Bitung berlangsung dua tahap: Pertama pada Selasa, 30 April 2024 234 jiwa dan Jumat, 3 Mei 2024 103 jiwa.

Sejumlah 103 pengungsi yang diangkut pada Jumat sore dilabuhkan di

Dermaga Satrol. Selanjutnya pengungsi dibawa ke Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bitung.

Kepala Kantor Bea Cukai Bitung Firman Bunyamin menjelaskan pihaknya telah bekerja sama dengan otoritas terkait dalam hal ini TNI Angkatan Laut, petugas kesehatan, tim evakuasi darat dan pemerintah setempat untuk melakukan penjemputan serta penanganannya sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Ia mengemukakan, selama proses evakuasi menuju Bitung pihaknya mengutamakan pelayanan prima.

Terlebih para pengungsi baru saja menghadapi situasi yang kemung-

kinan besar mengganggu psikologi mereka. "Memang kami sangat konsisten terhadap keselamatan yang utama perempuan, anak-anak dan lansia, sehingga kami memilah-milah yang kategori tadi kami masukkan terlebih dahulu, bahkan kami masukan ke dalam ruangan yang lebih nyaman. Pada saat evakuasi kami buat senyaman mungkin, kita buat mereka sehappy mungkin," ungkap Bunyamin kepada wartawan di Pelabuhan Tagulandang.

Ia menjelaskan, proses evakuasi yang menggunakan kapal jenis BC 60002 belum bisa dipastikan akan sampai kapan, hal ini akan disesuaikan dengan instruksi. Yang jelas pasca erupsi kem-



bali Gunung Api Ruang pada Kamis, 30 April 2024 subuh, sambung Bunyamin, jajaran BC di Bitung terus bersiaga. "Kami standby 24 jam 7 hari seminggu. Jadi kapanpun kami ada perintah, ada instruksi, kami bergerak," ujarnya.

Untuk kondisi emergency seperti ini, sambungnya, tidak ada jadwal yang dapat disusun. "Kita tidak bisa mengeset waktu kapan, sampai kapan, tapi situasi yang akan menentukan kapan kami akan berhenti," ungkapnya.

Dalam pada itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

dampak Gunung Ruang, selain Kota Manado, Bitung dan Minahasa Utara. Sejauh ini BNPB dan masyarakat menerima berbagai berita hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena hanya membuat warga semakin takut dan bingung.

Pernyataan lain yang disampaikan Kepala BNPB itu juga soal pengungsi agar tidak kembali segera ke tempat asal, sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah. "Saat ini pemerintah fokus pada penanganan warga yang mengungsi serta distribusi bantuan

yang kita langgar, kira-kira begitu. Dan kalau sudah ditentukan kita juga berharap dalam waktu yang tidak lama, masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik," jelas AHY saat meninjau lokasi pada Minggu, 5 Mei 2024.

Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam mempercepat pengurusan lahan relokasi bagi korban terdampak erupsi Gunung Ruang. Namun sebelum dilakukan sertifikasi tanah, saat ini masih terdapat proses penghitungan nilai serta nego-



(BNPB) Suharyanto mengingatkan kepada pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, agar tidak percaya dengan hoaks atau berita-berita bohong. "Banyak hoaks yang menyebar di sejumlah media sosial, tidak usah dipercaya. Biar saja informasi yang benar dari pemerintah," kata Suharyanto saat bertatap muka dengan pengungsi dari Pulau Tagulandang yang dievakuasi di Aula Kadademahe GMIST Imanuel Ondong, Siau, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu, 4 Mei 2023.

Siau merupakan ibukota dari Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang menjadi tempat pengungsian warga ter-

yang menjadi kebutuhan utama warga," jelasnya.

Sedangkan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa lahan relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara (Sulut) sudah berstatus clean and clear. Jadi, status kepemilikan tanah dan batasnya sudah jelas, demikian juga dari segi tata ruang tidak masuk ke dalam kawasan hutan.

Lahan dengan luas 10 hektar itu terletak di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). "Pada prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada sengketa, tidak ada sesuatu

siasi antara pemerintah dengan pemilik lahan.

"Timeline-nya sangat ditentukan oleh seberapa cepat appraisal dilakukan, kemudian negosiasi terjadi dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian ada ganti untung, bukan ganti rugi, kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang memiliki lahan di sini. Setelah itu segera kita urus, kita ingin percepat segala sesuatunya," ujarnya.

Nah, begitu banyak perhatian terhadap korban erupsi Gunung Ruang. Institusi Bea Cukai dengan kepedulian sosialnya tentu menjadi salah satu bagian utama. ●

info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter : @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv

